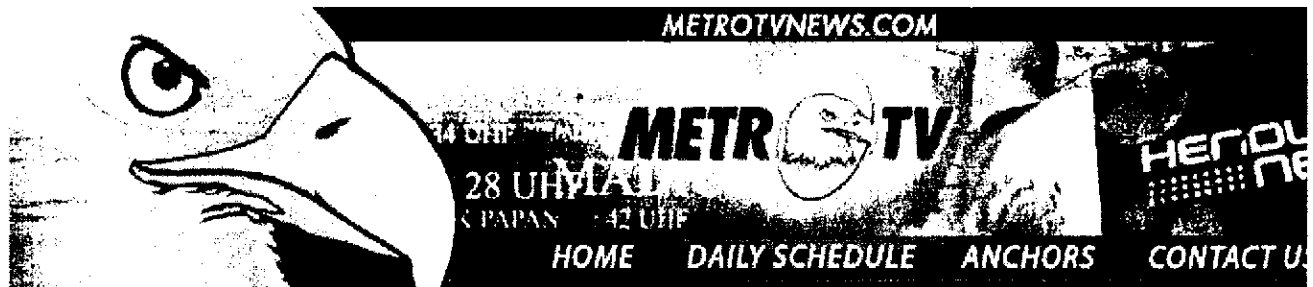


APPENDIX B.2
CLIPPING : Media Coverage



POLKAM

HUKUM & KRIMINAL

EKONOMI

SOSIAL BUDAYA

OLAHRAGA

METROPOLITAN

NUSANTARA

INTERNASIONAL

UMUM

HEADLINE NEWS

METRO PAGI

METRO SIANG

METRO HARI INI

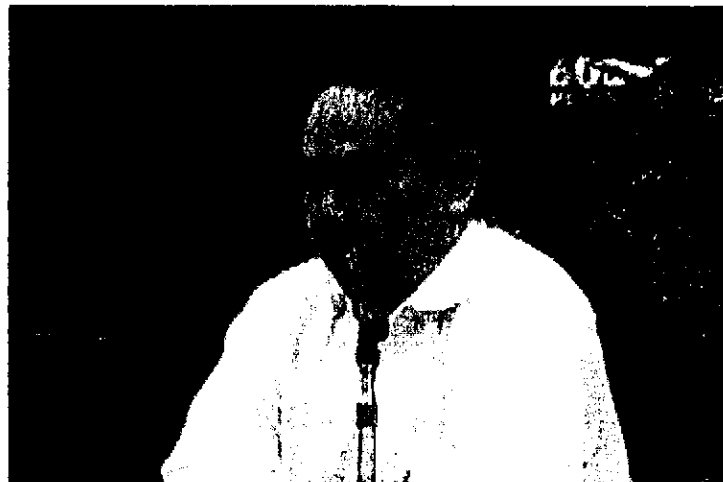
METRO MALAM

PRESS RELEASE

BERITA AKTUAL

15/08/2005 19:01 - Polkam
Headline News

MAYORITAS MASYARAKAT INDONESIA MENOLAK PARNPOL LOKAL



Syaiful Mujani, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (Metro TV)

PENCARIAN BERITA

Programs Aktual
Search News

Metrotvnews.com Jakarta: Mayoritas masyarakat Indonesia dan partai politik tidak setuju dengan rencana berdirinya partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam. Kesimpulan itu didapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) dari hasil jajak pendapat terhadap 1.400 responden di 32 provinsi. Hasil survei diumumkan pihak LSI di Jakarta, Senin (15/8).

Survei LSI dilakukan dengan menggunakan metode *multi-stage random sampling*. Survei menyimpulkan, 76 persen responden menyatakan tidak setuju dengan gagasan pembentukan parpol lokal di NAD. Hanya 13 persen yang menyatakan setuju. Namun, menurut LSI, gagasan pembentukan partai lokal sangat didukung masyarakat Aceh. Survei menyimpulkan empat dari sepuluh warga Serambi Mekah mendukung lahirnya parpol lokal. Beberapa pengamat dan politisi menilai, dukungan pembentukan partai lokal oleh warga Aceh karena mereka sangat menginginkan Bumi Aceh kembali damai.

BERITA LAINNYA:

- [Warga Aceh Menyambut Haru](#)
- [Belasan Ribu Warga Bertahan di Masjid Baiturrahman](#)
- [Presiden Yudhoyono Berterima Kasih](#)
- [Selamat Datang Damai di Aceh](#)
- [Kabut Asap Tebal Menyelimuti Asahan dan Tanjungbalai](#)

Parpol Lokal Tidak Populer

JAKARTA - Secara nasional, wacana pembentukan partai politik (parpol) lokal di Aceh tidak populer. Namun, di kalangan masyarakat Aceh, wacana itu ternyata terindikasi mendapatkan sambutan yang positif.

Demikian hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) seperti disampaikan oleh Direktur Eksekutif LSI, Saiful Mudjani kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/8). Survei itu dilakukan terhadap 1.397 responden di 32 provinsi dan berlangsung antara 28 Juli hingga 2 Agustus 2005.

Menurut Mudjani, dari hasil survei itu terlihat kalau 75,8 persen responden tidak setuju dengan gagasan parpol lokal. Responden yang setuju pembentukan parpol lokal hanya 6,9 persen.

Namun, fakta yang berbeda ditunjukkan oleh responden yang ada di Aceh. Jumlah responden Aceh yang setuju pembentukan parpol lokal adalah 58,6 persen. Sedangkan yang tidak setuju sebanyak 6,9 persen.

LSI juga menanyakan responden tentang perundingan yang dilakukan antara pemerintah dan pimpinan GAM. Hasilnya, sebagian besar (74,6 persen) responden mendukung perundingan damai di Helsinki itu.

"Dukungan yang besar terhadap proses perundingan damai ini bisa saja menjadi faktor yang mempengaruhi dukungan terhadap wacana pembentukan parpol lokal di Aceh," katanya.

Berdasarkan latar belakang politiknya, responden yang pada pemilu lalu memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) paling besar menolak pembentukan parpol lokal. Sebanyak 83,3 persen pemilih PDIP menolak pembentukan parpol lokal.

Responden yang pernah memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan responden terbanyak yang setuju terhadap pembentukan parpol lokal, yaitu 10,2 persen. "Tapi, memang sebagian besar responden yang memilih parpol nasional, menolak pembentukan parpol lokal," katanya.

Dikatakan pula, jika indikasi bahwa masyarakat Aceh setuju pembentukan parpol lokal adalah benar, hal itu menjadi tantangan bagi parpol nasional. (O-I)

Last modified: 16/8/05

Tanggal 16/8/2005

UTAMA

1. GAM Siap Ikuti Aturan
2. Anggaran Pendidikan 2006 Rp 31,5 Triliun
3. Trimedya: MoU Tak Lagi dalam Koridor NKRI
4. Asap di Medan Makin Tebal
5. 120 Rumah di Penjaringan Terbakar
6. Citra Indonesia Naik
7. Refleksi 60 Tahun Kemerdekaan RI

NASIONAL

1. 849 Senjata GAM Akan Diserahkan
2. Pluralisme Tak Bisa Ditolak
3. NU dan Muhammadiyah Nyatakan NKRI Harga Mati
4. Parpol Lokal Tidak Populer
5. Nota Kesepahaman RI-GAM
6. Arah Kebijakan Yudhoyono-Kalla Belum Jelas
7. Tindak Tegas Anggota Polri "Bekingi" Tanah Sengketa
8. Rahardi Sekamar dengan Mantan Bupati Kepri
9. Pemberantasan Korupsi Jangan Diskriminatif
10. Perjanjian Helsinki Dinilai Rugikan Indonesia
11. Lagu Kebangsaan "1/3 Indonesia Raya"
12. Golkar Dukung Adi Warsita di Pengadilan
13. Kapolri Dituntut Berantas Preman Terorganisasi di Sumsel
14. Relawan Yudhoyono Bentuk Ormas Kerakyatan
15. Pesawat Polri Tergelincir di Pondok Cabe
16. Mulyana Dituntut 3 Tahun
17. Sekilas

INTERNASIONAL

1. Memagari Potensi Disintegrasi Bangsa Diplomasi RI
2. Singkat

EDITORIAL OPINI

1. 60 Tahun Berkonstitusi
2. Seandainya Tiada HR 2601 WashWatch
3. Perenungan Perjalanan Bangsa Indonesia
4. Karikatur
5. Kita Telah Merdeka Tajuk Rencana
6. Sasaran
7. SUARA PEMBACA



1. Usaha Perikanan Terancam Bangkrut
2. Pertamina Luncurkan Solar Ramah Lingkungan
3. Laba Bersih Telkom Tumbuh 47,6 Persen
4. Pengusaha Optimistis Prospek Bisnis Membaik
5. Ditemukan 529 Spesies Ikan Baru

INDEPENDENCE
CELEBRATION

detikNews | detikFinance | detikFood | detikHot | detiki-Net | detikSport | detikHealth | Foto | Indel
Info Iklan | SMSiklan | Sepakbola | Ticket Box | newsUpdate | detikShop | News@Pondok Indah
:: Lifestyle | Cupid | Jodoh | 123 X-Fun | Iguana | boleh ::

Tahapan **BCA**Polling LSI:
Parpol Lokal Tidak Populer

Anton Aliabbas - detikcom

Jakarta - Nota kesepahaman (MoU) RI-GAM di Helsinki hujan dukungan. Tetapi, gagasan pembentukan partai politik lokal justru tidak laku. Demikian hasil polling Lembaga Survei Indonesia (LSI).

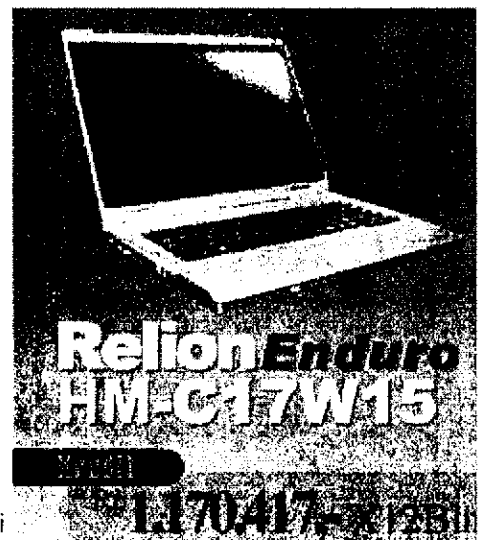
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif LSI Saiful Muljadi dalam jumpa pers di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (15/8/2005).

Polling LSI dilakukan terhadap 1.397 responden di 32 provinsi pada 28 Juli hingga 2 Agustus 2005 dengan metode *multistage random sampling* dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan *margin error* kurang lebih 2,62 persen.

Hasil survei menunjukkan 75,8 persen responden tidak setuju dengan gagasan parpol lokal dan hanya 6,9 persen yang menyatakan setuju parpol lokal.

Tapi khusus untuk responden Aceh, banyak yang menyetujui pembentukan parpol lokal, yakni 58,6 persen. Sedangkan yang tidak setuju hanya 6,9 perser

Selain itu, survei menunjukkan sekitar 74,6 persen mendukung perundingan yang dilakukan pemerintah dengan GAM untuk perdamaian. Sedangkan yang



Tural





detikNews

15/08/2005 14:49 WIB
Kesepakatan Helsinki
Lebih Banyak
Mudharatnya Bagi RI

detikNews

15/08/2005 14:44 WIB
DPR Akan Gugat
Pemerintah Jika Draf
Aceh Damai Menyimpang

detikNews

15/08/2005 14:37 WIB
Diiringi 25 Kerabat,
Rahardi Naik Kijang Butut
ke Cipinang

detikNews

15/08/2005 14:32 WIB
Parpol Lokal Tidak
Populer

detikNews

15/08/2005 14:27 WIB
24 Tahanan GAM di
Malang Saksikan
Penandatanganan Damai

tidak mendukung 11,3 persen.

"Dukungan terhadap perundingan ini kemungkinan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap dukungan pembentukan parpol lokal di Aceh, meski mungkin saja faktor ini tidak mempunyai kaitan dengan isu parpol lokal," urai Saiful.

Menurut dia, responden yang memilih PDIP dalam pemilu lalu merupakan yang paling tertinggi yang tidak menyetujui parpol lokal, yakni sebanyak 83,3 persen. Sedangkan yang menyetujui parpol lokal sebanyak 4,8 persen.

Sedangkan responden yang memilih PKS, yang paling tinggi menyetujui keberadaan parpol lokal yakni 10,2 persen. Sedangkan yang tidak setuju mencapai 73,5 persen.

"Mungkin ketika gagasan parpol lokal muncul, massa pendukung PDIP yang paling kuat menolak gagasan itu dan bisa saja sikap partai ini merupakan cerminan dari sikap pendukungnya," tutur Saiful.

LSI berkesimpulan, untuk sementara gagasan tentang parpol lokal di Aceh tidak populer. "Tetapi ini tidak berarti masyarakat tidak mendukung adanya perundingan masyarakat dengan GAM," ujarnya.

LSI juga mengindikasikan gagasan parpol lokal mendapat dukungan dari rakyat Aceh. Meski demikian, lanjut Saiful, pihaknya belum dapat memastikan karena *margin error* untuk survei yang respondennya berasal dari Aceh mencapai kurang lebih 18 persen.

Bila indikasi bahwa masyarakat Aceh menginginkan partai lokal itu benar. Maka kehadiran parpol lokal di Aceh akan menjadi tantangan bagi parpol nasional dalam mengartikulasikan kepentingan konstituen di Aceh.

Pengamat politik CSIS Rizal Sukma menilai, ada tiga faktor yang menjadi dominan dalam penolakan masyarakat terhadap isu parpol lokal, yakni terkait disintegrasi bangsa, terlalu mengakomodasi GAM dan kesediaan berunding adalah strategi GAM untuk memperoleh kemerdekaan.

"Sedangkan kenapa masyarakat Aceh mendukung parpol lokal karena konteks perdamaian yang menonjol," ujar Rizal. (aan)

Baca juga:

- Mensesneg: Parpol Lokal akan Diatur dalam UU Otsus NAD

SMS Iklan

notebook toshiba, sony, ibm, dell ready stock. baru dan second/refurbished.
visit <http://www.rajannotebook.com> - rajannotebook.com (6281 29283447)





SINAR HARAPAN

HARIAN UMUM SORE

SINAR HARAPAN

Selasa, 16 Agustus 2005

NASIONAL

Survei LSI: Rakyat Tak Dukong Parpol Lokal

Halaman Utama

Tajuk Rencana

Nasional

Ekonomi

Uang & Efek

Jabotabek

Nusantara

Luar Negeri

Olah Raga

Iptek

Hiburan

Feature

Mandiri

Ritel

Hobi

Wisata

Eureka

Kesehatan

Cafe & Resto

Hotel & Resor

Asuransi

Otomotif

Properti

Budaya

CEO

Opini

Foto

Karikatur

Komentar Anda

Tentang SH

Oleh
Inno Jemabut

Jakarta - Meski mendukung perundingan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah, tapi masyarakat tidak mendukung pembentukan partai politik (parpol) lokal sebagaimana tercantum dalam butir kesepakatan yang ditandatangani di Helsinki, Senin (15/8).

Hal tersebut dikemukakan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani dalam acara jumpa pers di Jakarta, Senin (15/8) berdasarkan polling LSI 28 Juli - 2 Agustus 2005 yang dilakukan terhadap 1397 responden di 32 provinsi.

Hasil riset menunjukkan, 75,8 persen responden tidak setuju dengan gagasan parpol lokal dan hanya 6,9 persen yang menyatakan setuju parpol lokal. Dalam konteks pembentukan partai politik lokal di Aceh, 76,2 persen tidak menyetujui, meski 75 persen warga reponden menyatakan mendukung perundingan Helsinki.

Alasannya, perundingan telah dilakukan berulang-ulang untuk menciptakan perdamaian di Aceh sementara gagasan untuk membentuk partai politik lokal adalah sesuatu yang baru bagi masyarakat. Selain itu penjelasan yang sangat minim dari pemerintah mengenai partai lokal dalam hubungannya dengan sistem kepartaian nasional saat ini cukup berpengaruh.

Saiful Mujani juga menjelaskan banyaknya dukungan terhadap perundingan di Helsinki saat ini merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap dukungan pembentukan parpol lokal di Aceh. Selain itu survei tersebut juga menunjukkan bahwa partai politik yang memiliki basis masa di Aceh dalam pemilu legislatif 2004 lalu tidak serta menolak pembentukan partai politik lokal di Aceh. Responden dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya, 21,7% menyetujui partai lokal sementara 73,9% menolak. Demikian juga halnya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 24,5% menyetujui sedangkan 71,4% menolak. Sementara responden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 6,2% menyetujui dan 92,4% menolak. Disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6,7% menyetujui sementara 90,5% menolak serta Partai Golkar 12,4% menyetujui sedangkan 86% menolak.

Menanggapi hasil polling tersebut, pengamat politik dari Centre for Social and International Studies (CSIS) Rizal Sukma mengatakan setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi penolakan masyarakat atas gagasan pembentukan partai politik lokal tersebut. Pertama, kehadirannya terkait dengan masalah disintegrasi bangsa; kedua, kalau dilihat terlalu mengakomodasi tuntutan GAM; dan ketiga, masyarakat melihatnya sebagai strategi GAM untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Sementara Ketua Komisi II Ferry Mursydan Baldan mengatakan kalau pembentukan partai lokal disetujui maka nantinya ada ruang bagi revisi UU Otonomi Khusus Aceh. Namun ia memandang keinginan pembentukan partai politik lokal di Aceh lebih karena ingin berpartisipasi dalam politik. "Kalau seperti itu maka saya kira tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan. Tapi, saya kira pemerintah harus lebih

aktif memberikan penjelasan mengenai hal tersebut," jelasnya.

Copyright © Sinar Harapan 2003



18 August, 2005

Cari

:: Berita

Survei LSI: Masyarakat Dukung Perundingan Damai

Reporter: AK-38 - Jakarta, 2005-08-16 11:16:07

Jakarta, acehkita. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan 75 persen masyarakat Indonesia mendukung perundingan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dilakukan pemerintah. Sedangkan yang tidak setuju hanya sekitar 11 persen saja dan selebihnya tidak mempunyai pendapat. Hasil survei ini dipaparkan Saiful Mujani, Direktur Eksekutif LSI, di hadapan wartawan di Hotel Nikko Jakarta, Senin (15/8).

"Dari survei menunjukkan bahwa sekitar 7 dari 10 orang Indonesia dewasa mendukung perundingan yang dilakukan pemerintah dengan GAM. Hanya satu orang yang tidak menerima sedangkan sisanya tidak berpendapat," papar Mujani.

Selain meminta pendapat mengenai perdamaian, tambahanya, LSI pun meminta pendapat masyarakat berkaitan dengan partai lokal. Karena gagasan tentang partai lokal bukan hanya persoalan politik lokal Aceh saja tapi juga persoalan politik nasional. Terutama karena yang memutuskan boleh tidaknya partai politik lokal adalah elit nasional di Jakarta.

Ternyata dari hasil survei, justru terbalik dengan hasil survei mengenai perdamaian. Dari hasil survei yang dilakukan akhir bulan Juli dan awal Agustus ditemukan sekitar 75,8% warga Indonesia menyatakan tidak setuju terhadap gagasan partai lokal tersebut. Sedangkan yang setuju hanya 6,9 persen lebih rendah dari yang tidak menjawab (17,3%).

"Ini menunjukkan bahwa partai lokal belum populer di mata publik Indonesia. Tetapi di mata publik Aceh partai lokal ini mendapat dukungan yang besar," jelas pria berkacamata ini.

Meskipun besarnya dukungan masyarakat Aceh ini terhadap partai lokal, kata Saiful Mujani, tidak bisa ditafsirkan langsung masyarakat Aceh semua setuju dengan gagasan ini. Karena sampel yang diambil terlalu sedikit yaitu hanya 29 orang dari jumlah sampel sebanyak 1.450 orang. Karena itu, sikap warga Aceh tersebut hanya indikasi sangat awal dan sementara.

Adanya perbedaan ini menunjukkan masyarakat memandang perundingan dengan GAM dan dukungan terhadap gagasan partai lokal merupakan dua hal berbeda. Perbedaan ini, menurut Mujani, dapat dipahami karena perundingan untuk perdamaian sudah cukup tersosialisasikan, sedangkan gagasan partai lokal relatif baru untuk masyarakat Indonesia sekarang ini.

Karena masalah partai politik ini secara khusus berkaitan dengan pemilihan umum di Aceh, LSI juga akan segera melakukan survei khusus suara publik Aceh tentang gagasan partai politik lokal ini. "Untuk perbandingan sistematis apakah ada perbedaan berarti antara sentimen nasional dan sentimen masyarakat Aceh terhadap gagasan partai lokal tersebut," tandasnya. [dzie]

Baca juga:

Megawati Tidak Setuju Partai Lokal

2005-08-1	Anggota Remisi D
2005-08-1	Pasca-Te GAM "Ti
2005-08-1	1.832 Na Perofeh
2005-08-1	234 Nar Lhokseu
2005-08-1	Warga L Berani K
2005-08-1	Pengadil Surut
2005-08-1	AWG De HAM di A
2005-08-1	Kompen ABPN
2005-08-1	TNI/Pol Di Aceh
2005-08-1	Wewena Diatur di
2005-08-1	Presiden Tangan /
2005-08-1	Pemanta Polisi
	Index Be



18 August, 2005

Cari

:: Berita

PDIP Tolak Partai Lokal

Reporter: AK-38 - Jakarta, 2005-08-16 11:17:22

Jakarta, acehkita. Gagasan partai lokal yang bergulir seiring dengan kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) membuat partai-partai politik yang ada bak kebakaran jenggot. Pasalnya, partai lokal ini mengancam keberadaan mereka di daerah, khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Belum juga terbentuk, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah ketakutan dengan partai lokal ini.

"Pembentukan partai lokal merupakan suatu kemunduran dalam perpartaian kita," ujar Sutradara Ginting, politisi dari PDIP, saat ditemui di Hotel Nikko, Senin (15/8).

Ia melanjutkan, sebagai sebuah negara kebangsaan semua partai harus berideologi nasional sedangkan untuk manajerialnya dilakukan secara lokal. Sehingga apa yang dilakukan partai politik semuanya ditunjukkan untuk kepentingan nasional, bukan hanya untuk kepentingan lokal saja. Menurutnya, di semua negara di dunia tidak ada partai yang tidak berideologi secara nasional.

Berkaitan dengan gagasan partai politik di Aceh, Ginting mengatakan ada pemahamar yang salah berkaitan dengan ini. Selama ini partai politik lokal dianggap bagian dominan dari perdamaian di Aceh. "Ini satu hal yang berbeda. Bukan berarti yang menolak partai lokal menolak perdamaian," sanggahnya.

Ia sepakat, akan perlu diakomodasi para bekas anggota GAM dalam sebuah *political home*. Tetapi tidak perlu dijabarkan dalam sebuah partai politik, yang jelas-jelas lebih bersifat kedaerahan.

Sedangkan politisi dari Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, menegaskan kemungkinan berdirinya partai lokal di Aceh. Bila merujuk Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua, partai lokal secara aturan sudah dicantumkan di sana. Sehingga setiap orang Papua berhak untuk membentuk partainya sendiri.

"Persyaratannya ya seperti syarat partai nasional. Misalnya harus ada di setengah jumlah provinsi di Indoensia, tersebar minimal di sekian kabupaten kota dan lainnya," terang Ferry.

Sedangkan saat ditanya format kepartaian di Aceh, Ferry mengatakan masih ada waktu untuk membahasanya dalam 18 bulan ke depan. Sehingga semua pihak tidak perlu ketakutan secara berlebihan akan wacana partai lokal ini. Karena yang penting perdamaian di Aceh terwujud dahulu, sedangkan implikasi di belakang perdamaian itu masih ada waktu untuk membicarakannya.

Sementara itu, Ketua DPR, Agung Laksono, mengatakan dewan siap untuk menjaga kesepakatan damai yang diambil pemerintah. Begitu juga halnya dengan perubahan-perubahan perundang-undangan sebagai konsekuensi perjanjian ini, DPR siap membantu. "Untuk format partai lokal kita menunggu pengajuan dari pemerintah," tandas Agung saat ditemui di Istana Merdeka. [dzie]

Baca juga:

- Hantam Dukung Kehadiran Partai Politik Lokal
- Megawati Tidak Setuju Partai Lokal
- GAM Akui Capai Kesepakatan soal Partai Lokal

2005-08-1	Anggota Remisi D
2005-08-1	Pasca-Terorisme GAM "Tiga
2005-08-1	1.832 Negeri Peroleh
2005-08-1	234 Nara Lhokseu
2005-08-1	Warga Lhokseu Berani K
2005-08-1	Pengadilan Surut
2005-08-1	AWG Dukung HAM di Aceh
2005-08-1	Komponen ABPN
2005-08-1	TNI/Polri Di Aceh
2005-08-1	Wewenang Diatur di Aceh
2005-08-1	Presiden Tindakan
2005-08-1	Pemantauan Polisi
2005-08-1	Index Berita

Selasa, 16 Agt 2005

Parlok Tak Populer, Kecuali di Aceh

JAKARTA - Lembaga Survey Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbarunya kemarin. Survei secara nasional tersebut menjajaki gagasan parlok (partai lokal) sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik di Aceh secara damai. Hasilnya, parlok tidak populer secara nasional, kecuali di Aceh.

"Kami yakin sampel kita tidak terlalu jelek. Tapi, ini masih tentatif dan belum konklusif," kata Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani. Selain Saiful, pembahas lain survei itu adalah Rizal Sukma (CSIS), Ferry Mursidan Baldan (Partai Golkar), dan Sutradara Ginting (PDIP).

Survei tersebut dilakukan mulai 28 Juli sampai dengan 2 Agustus 2005. Sampelnya tersebar di 32 provinsi dengan jumlah responden 1.450 orang. Mereka dipilih dengan metode multistage random sampling.

Dari jumlah itu, hanya 1.397 sampel akhir yang valid dan dianalisis. Jumlah sampel tersebut ditetapkan untuk memenuhi margin error sekitar 2,62 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Hasilnya, hampir 76,2 persen publik nasional tidak setuju dengan gagasan parlok. Namun, ini bukan berarti mereka tidak mendukung perundingan antara GAM dan Indonesia. Ada 75 persen dari populasi nasional yang mendukung perundingan itu," sambungnya. Hanya 11 persen yang tidak setuju dan sisanya tidak menyatakan pendapat.

Dari seluruh sampel, 29 responden berada di Provinsi NAD. "Memang jumlah sampel ini terlalu sedikit jika dibandingkan dengan standar LSI, yakni 400 responden. Tapi, ada indikasi awal yang perlu diuji bahwa dari sampel yang sedikit itu, hampir semua atau 86,2 persen warga NAD setuju dengan gagasan parlok." Dari 10 warga Aceh, 7 orang mendukung parlok.

LSI akan menindaklanjuti indikasi awal itu dengan survei berikutnya di Provinsi NAD. "Bila temuan nanti terbukti relatif konsisten, berarti ada gap antara opini publik nasional dan publik NAD tentang parlok ini," sambungnya.

LSI juga menganalisis sampel yang didapatnya itu. Kali ini para responden dikelompokkan menurut partai politiknya. Hasilnya, responden yang identik dengan PDIP lebih banyak tidak setuju dengan parlok di Aceh (92,2 persen), lalu PKB (90,5), dan paling kecil PKS (71,4).

Menanggapi hasil survei itu, Rizal Sukma, yang putra Aceh, mengatakan tidak seberapa terkejut dengan hasil itu. Publik nasional cenderung apatis terhadap parlok karena beberapa sebab. Salah satunya dicurigai identik dengan GAM dalam usahanya memerdekakan diri.

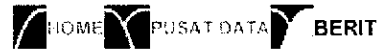
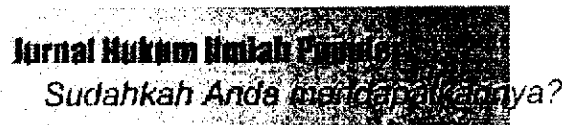
"Sedangkan untuk publik Aceh, mengapa mereka dukung parlok itu, karena parlok dipercaya jalan untuk saja damai. Kalaupun dikatakan Aceh pasti damai tanpa parpol, mereka tentu akan setuju saja," katanya. Rakyat Aceh menginginkan damai.

Sutradara Ginting mengatakan survei ini cukup fair. "Tapi lebih baik jangan bicara parlok dulu. Soal gencatan senjata saja belum tentu bisa," ujarnya. Dia meminta supaya parlok jangan ditaruh sebagai variabel dominan dalam perdamaian Aceh. Memang harus ada political home, tapi tak perlu dengan parlok. "Ini tantangan bagi partai nasional," ujarnya.

Ferry punya pendapat lain. Menurut dia, parlok boleh ada, namun tentu dengan hak terbatas. Misalnya, hanya berhak menggelar pilkada, namun tidak berhak untuk pemilu legislatif. "Soal bagaimana bentuk jelasnya, apa itu parlok, kita tunggu keterangan pemerintah." (naz)

<< :: *Kembali*

copyright © 2003 Jawa Pos dotcom



Kamis, 18 Agustus 2005

Klini

Berita

LSI: Partai Lokal Bisa Populer di Aceh, Tetapi tidak untuk Nasional.

[15/8/05]

Meski gagasan pembentukan partai lokal tidak populer, namun mayoritas responden mendukung proses perdamaian Pemerintah dan GAM.

Menjelang ditandatanganinya *memorandum of understanding* (MoU-nota kesepahaman) perdamaian antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki Finlandia, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Senin (15/8) mengumumkan hasil survei nasional isu partai lokal.

Survei itu dilaksanakan selama 29 Juli - 2 Agustus 2005 itu untuk merespons gagasan partai lokal dalam pengertian partai lokal secara umum dan partai lokal khusus untuk Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Hasilnya? Dari 1397 responden yang tersebar di 32 propinsi di Indonesia, mayoritas (75%) tidak setuju dengan gagasan pembentukan partai lokal. Hanya 6,9% yang menyatakan setuju, dan selebihnya tidak berpendapat.

Hasil survei juga tidak jauh berbeda terhadap gagasan pembentukan partai lokal di Aceh, yakni 76,2 % tidak setuju. Akan tetapi, proporsi yang setuju dengan partai lokal untuk NAD lebih besar dibanding proporsi yang setuju dengan gagasan partai lokal secara umum, yakni 13,8%.

Yang menarik, data survei tentang perundingan damai pemerintah dan GAM menunjukkan bahwa 74% responden mendukung perundingan yang dilakukan pemerintah dengan GAM. Sedangkan 11,3% menolak dan sisanya tidak berpendapat. Dapat disimpulkan bahwa, meskipun gagasan pembentukan partai lokal tidak populer, bukan berarti masyarakat tidak mendukung perundingan antara pemerintah dengan GAM.

Mengapa orang di luar Aceh menolak gagasan partai lokal, menurut Rizal Sukma, peneliti *Center for Strategic International Study* (CSIS) karena mereka berpikiran bahwa pembentukan partai lokal di Aceh merupakan perubahan strategi perjuangan GAM. Dari perjuangan senjata ke perjuangan politik.

Hasil temuan LSI ini direspons positif oleh Sutradara Ginting, anggota DPR dari PDIP. Menurutnya, survei LSI cukup fair dalam membuat kesimpulan. Namun, Sutradara menanyakan mengapa tidak dilakukan *indepth research* (penelitian mendalam) dalam survei.

Ditemui usai acara, Saiful Mujani, direktur eksekutif LSI menekankan bahwa indikasi ini masih sangat awal dan sementara. Hal tersebut menurutnya, dikarenakan jumlah sampel yang melibatkan warga NAD terlalu sedikit (29 responden). "Setelah ini kami akan melakukan survei khusus di NAD," kata Saiful. Selain itu, belum adanya pengertian formal tentang partai lokal menjadi masalah krusial dalam penelitian LSI.

Patut dicatat, keberadaan partai lokal tidak memiliki pijakan hukum dalam UU

LOGIN

Nama :

Password :

[Daftar D



Aktual

Kadilmiltama B: Melalui surat kep KMA/JP.IV/033/Agung mengang Basar SH sebag. Utama (Kadilmilt yang baru. Sona lama Mayjen So Mabes TNI karer pensiun. Sebelum Oditur Jenderal ini, ia berhak me jabatan sebesar Nomor 56 Tahun administrasi dan dialihkan dari Ma

Terbar

- [17/8/05] Be: Pollycarpus Terdakwa T
- [16/8/05] Be: Turut Korup Terancam 7
- [16/8/05] Be: Susongko: 'BPK itu Sua
- [16/8/05] Be: Investor Asi Hutan Tanai
- [16/8/05] Be: Buku Pandu Diperbahart
- [26/2/05] Wa: Humphrey F Terapkan Fi (35 tanggap
- [11/8/05] Fol: Surat Kuasa Penggabun (1 tanggap
- [9/2/05] Prof: Once: Dari l (43 tanggap

Partai Politik maupun UU Pemerintahan Daerah. Akibatnya, Pemerintah berencana merevisi aturan yang ada.

(CR-1)

Isu Hari

- Dugaan Per
- Dualisme A Litigasi
- RUU KUHP
- Dugaan Per KPU
- Divestasi VI

Tanggapan

Strategi Lain Dari GAM

[16/8/05] - Sebagai orang Indonesia yang cinta damai, saya sangat mendukung kesepakatan damai antara pemerintah dengan GAM. Tetapi terus terang saya sangat meragukan itikad baik dari GAM tentang ide pembentukan partai lokal. Saya punya catatan tentang komentar dari Ismail Sahputra, juru bicara GAM yang dilansir oleh "The Economist" London, 13 Mei, thn. 2000 : "We still demand independence, not autonomy." So, Pak SBY dan tim harus berhati hati dan jangan merubah hukum yang sudah jadi hanya untuk suatu harapan yang masih samar-samar.

Fauna Alwy <falwy@dps9m1.ialf.edu>



[Home](#) | [Tentang Kami](#) | [Redaksi](#) | [Mitra Kami](#) |
 Informasi yang tersedia di www.hukumonline.com tidak ditujukan sebagai suatu nasehat hukum, namun hanya memberikan gambaran umum terhadap suatu informasi atau permasalahan hukum yang sedang diha
 Akses dan penggunaan situs ini tunduk pada [Syarat dan Ketentuan](#) © 2003

::: Berita :::

LSI: Partai Lokal Bisa Populer di Aceh, Tetapi tidak untuk Nasional.

[15/8/05]

Meski gagasan pembentukan partai lokal tidak populer, namun mayoritas responden mendukung proses perdamaian Pemerintah dan GAM.

Menjelang ditandatangani *memorandum of understanding* (MoU-r kesepahaman) perdamaian antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM Helsinki Finlandia, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Senin (15/8) mengumumkan hasil survei nasional isu partai lokal.

Survei itu dilaksanakan selama 29 Juli – 2 Agustus 2005 itu untuk merespon gagasan partai lokal dalam pengertian partai lokal secara umum dan partai lokal khusus untuk Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Hasilnya? Dari 1397 responden yang tersebar di 32 propinsi di Indonesia, mayoritas (75%) tidak setuju dengan gagasan pembentukan partai lokal. Hanya 6,9% yang menyatakan setuju, dan selebihnya tidak berpendapat.

Hasil survei juga tidak jauh berbeda terhadap gagasan pembentukan partai lokal Aceh, yakni 76,2 % tidak setuju. Akan tetapi, proporsi yang setuju dengan partai lokal untuk NAD lebih besar dibanding proporsi yang setuju dengan gagasan partai lokal secara umum, yakni 13,8%.

Yang menarik, data survei tentang perundingan damai pemerintah dan GAM menunjukkan bahwa 74% responden mendukung perundingan yang dilakukan pemerintah dengan GAM. Sedangkan 11,3% menolak dan sisanya tidak berpendapat. Dapat disimpulkan bahwa, meskipun gagasan pembentukan partai lokal tidak populer, bukan berarti masyarakat tidak mendukung perundingan antara pemerintah dengan GAM.

Mengapa orang di luar Aceh menolak gagasan partai lokal, menurut Rizal Suki peneliti *Center for Strategic International Study* (CSIS) karena mereka berpikiran bahwa pembentukan partai lokal di Aceh merupakan perubahan strategi perjuangan GAM. Dari perjuangan senjata ke perjuangan politik.

Hasil temuan LSI ini direspons positif oleh Sutradara Ginting, anggota DPR dan PDIP. Menurutnya, survei LSI cukup fair dalam membuat kesimpulan. Namun Sutradara menanyakan mengapa tidak dilakukan *indepth research* (penelitian mendalam) dalam survei.

Ditemui usai acara, Saiful Mujani, direktur eksekutif LSI menekankan bahwa indikator ini masih sangat awal dan sementara. Hal tersebut menurutnya, dikarenakan jumlah sampel yang melibatkan warga NAD terlalu sedikit (29 responden). "Setelah ini kami akan melakukan survei khusus di NAD," kata Saiful. Selain itu, keberadaan pengertian formal tentang partai lokal menjadi masalah krusial dalam penelitian LSI.

Patut dicatat, keberadaan partai lokal tidak memiliki pijakan hukum dalam UU Partai Politik maupun UU Pemerintahan Daerah. Akibatnya, Pemerintah berencana merevisi aturan yang ada.

[Tutup Window]

detik.com



GOAL 2006

AKU HONTOK LANGSUNG
PILAU DUNIA
DI JERMAN!!

FLC XI detik
www.de

FREE GIFT Ballpoint Hat Socks Keychain

detikNews | detikFinance | detikFood | detikHot | detiki-Net | detikSport | Foto | Indeks
Info Iklan | SMSiklan | Sepakbola | Ticket Box | newsUpdate | detikShop | News@Pondok Indah
:: Lifestyle | Cupid | Jodoh | 123 X-Fun | Iguana | boleh ::



Salurkan Aspirasi Anda



Survey LSI: Indonesia Masih Berpeluang Dikudeta Militer

Anton Aliabbas - detikcom

Jakarta - Masyarakat Indonesia ternyata menolak keterlibatan tentara yang masih aktif terlibat dalam politik praktis. Tapi sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat berpeluang untuk dikudeta militer.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Riset Lembaga Survey Indonesia (LSI) Syaiful Mujani dalam jumpa pers di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (4/10/2005).

Survey LSI tentang supremasi sipil dan pertahanan nasional itu, dilaksanakan pada 1.137 responden yang tersebar di 33 provinsi. Metode yang digunakan, *multi stage random sampling* pada 22-26 September 2005. Dengan *margin error* kurang lebih 2,9%. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara wawancara dan tatap muka.

Hasilnya, secara umum masyarakat Indonesia menolak keterlibatan tentara yang masih aktif dalam politik praktis. Hanya 24% masyarakat yang menyetujui



detikNews
05/10/2005 12:27 WIB
Dian-dian Sutiyoso
Keluarkan SK Kenaikan
Tarif Busway

detikNews

05/10/2005 10:18 WIB
 Hari Pertama Puasa,
 Restoran & Warteg di
 Jakarta Tetap Buka

detikNews

05/10/2005 12:00 WIB
 Presiden SBY: Negara
 Tak Akan Pernah
 Lupakan Jasa TNI di
 Aceh

detikNews

05/10/2005 11:57 WIB
 Presiden Minta TNI
 Berperan dalam
 Pemberantasan
 Terorisme

detikNews

05/10/2005 11:55 WIB
 Digelar Kursus
 Menyeterika Pakaian
 bagi Kaum Pria

tentara yang masih aktif untuk menjadi Presiden. Kondisi ini menurun jika dibandingkan tahun 2004 yang mencapai 34%. Namun, angka ini lebih tinggi pada awal masa reformasi 1999 lalu, yang mencapai angka 13%.

Sedangkan untuk angka 24% itu, lanjut Syaiful, masih berada di atas ambang toleransi negara demokrasi yang sudah mapan. Mengenai keterlibatan militer dalam politik praktis, hanya menghasilkan nada setuju sebesar 10%.

"Angka bagi Indonesia ini termasuk dalam kriteria negara-negara demokrasi baru yang belum stabil. Ini artinya, masih terbuka kemungkinan kudeta oleh tentara," ungkap Syaiful.

Namun Syaiful menilai, kuatnya penolakan publik terhadap keterlibatan tentara dalam politik praktis, dapat mencegah kemungkinan tentara mau melakukan petualangan politik. Selain itu, hasil survey menggambarkan, mayoritas masyarakat responden secara umum masih mendukung keberadaan teritorial TNI, mulai dari tingkat desa (babinsa) hingga provinsi.

"Publik pada umumnya masih melihat peran penting kehadiran kekuatan teritorial untuk keamanan dan ketertiban masyarakat," lanjut Syaiful.

Melihat fenomena ini, Syaiful menganggap, demokrasi di Indonesia masih sangat rentan terhadap kemungkinan keterlibatan tentara. Keterlibatan tentara ini dalam masalah yang tidak terkait dengan prinsip reformasi sipil.

Dari hasil survey, hanya sekitar 24-28% masyarakat yang menyatakan tidak perlu keberadaan koramil hingga kodam. Sedangkan, masyarakat yang mendukung keberadaan kodam, berada dalam kisaran 55-58% dan sisanya 17-18% menyatakan tidak tahu.

Namun, masyarakat mendukung gagasan agar TNI tidak memiliki perusahaan apapun (sekitar 59%). Hanya 29% yang menyatakan dukungannya terhadap keberadaan perusahaan milik TNI. Sejauh ini, ungkap Syaiful, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi semakin meningkat untuk tahun 2005, mencapai angka 73%, yang meningkat dari tahun 2004 sebesar 62%.

Masyarakat juga menilai, Amerika merupakan negara yang menjadi ancaman bagi Indonesia. "Lebih banyak warga yang merasa yakin, negara kita sedang berada dalam ancaman negara lain, sekitar 47%. Sedangkan yang tidak yakin mencapai 39%, tidak tahu 14%," jelas Syaiful.

Secara keseluruhan, Syaiful menyimpulkan dukungan publik terhadap prinsip supremasi sipil sudah sangat kuat. Namun, belum solid dalam pemberian dukungan atas pelaksanaan prinsip tersebut.

"Masih lemahnya dukungan publik ini dapat menoleransi keterlibatan tentara dalam kehidupan sosial politik yang seharusnya menjadi wilayah sipil. Selama kinerja polisi melindungi masyarakat tidak bagus, maka kehadiran tentara untuk keamanan akan tetap diperlukan masyarakat," jelas Syaiful. (ism)

Baca juga:

- Jaga Kepulauan Natuna, TNI Tambah Pasukan
- Panglima TNI:



detikNews | detikFinance | detikFood | detikHot | detiki-Net | detikSport | Foto | Indeks
Info Iklan | SMSiklan | Sepakbola | Ticket Box | newsUpdate | detikShop | News@Pondok Indah
:: Lifestyle | Cupid | Jodoh | 123 X-Fun | Iguana | boleh ::



ASIAN CUP 2006...!!
www.detik.com

Salurkan Aspirasi Anda

6-Parlemen DIY

HUT ke-60 TNI, antara Politik Praktis dan Kado Panglima Baru

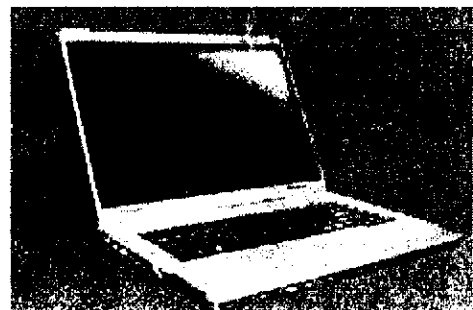
Ismoko Widyaya - detikcom

Jakarta - 60 Tahun berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih dibayang-bayangi keterlibatan dalam dunia politik praktis. Berdasarkan survey Lembaga Survey Indonesia (LSI) masyarakat Indonesia menolak keterlibatan tentara yang masih aktif terlibat dalam politik praktis.

Rabu (5/10/2005) tepat 60 tahun kelahiran TNI di bumi Indonesia. Perayaan HUT ke-60 TNI kali ini dipusatkan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Sedikit sejarah tentang TNI. Cikal bakal TNI dicetuskan Presiden Soekarno pada 23 Agustus 1945, dengan nama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Setelah Oktober 1945, Pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Markas Besar TKR ditempatkan di Yogyakarta.

Berulang kali berganti nama hingga menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dan sesuai Keputusan Menhankam/Panglima TNI Nomor :



Enduro

Model

Rp **1.170.417,-** XI2B

Total



detikNews

05/10/2005 11:47 WIB
Hari Pertama Pusa,
Restoran & Warteg di
Jakarta Tetap Buka

detikNews

05/10/2005 12:00 WIB
Presiden SBY: Negara
Tak Akan Pernah
Lupakan Jasa TNI di
Aceh

detikNews

05/10/2005 11:57 WIB
Presiden Minta TNI
Berperan dalam
Pemberantasan
Terorisme

detikNews

05/10/2005 11:47 WIB
D digelar Kursus
Menyeterika Pakaian
bagi Kaum Pria

Skep/259/P/IV/1999, ABRI menjadi TNI. Perubahan ini diikuti dengan pemisahan diri Polri dari ABRI.

Walaupun beberapa kali berganti 'baju', TNI tak pernah luput dari kritikan berbagai kalangan. Sebut saja hasil survey yang dikumpulkan LSI pada 22-26 September lalu. Seperti diberitakan, Selasa (4/20/2005) kemarin Direktur Riset Lembaga Survey Indonesia Syaiful Mujani menyatakan, dari 1.137 responden yang tersebar di 33 provinsi, hanya 10% yang mendukung keterlibatan militer dalam politik praktis.

Dalam pengambilan sampelnya, LSI menggunakan metode *multi stage random sampling*. Dengan *margin error* kurang lebih 2,9%. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara wawancara dan tatap muka.

Syaiful menilai, kuatnya penolakan publik terhadap keterlibatan tentara dalam politik praktis, dapat mencegah kemungkinan tentara mau melakukan petualangan politik. Syaiful pun menganalisa, di negara Indonesia sebagai negara demokrasi baru yang belum stabil, masih terbuka kemungkinan kudeta oleh tentara.

Pekerjaan rumah TNI tidak hanya itu. di HUT ke-60 TNI, DPR mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi kado berupa, pengumuman nama calon Panglima TNI. Inilah harapan DPR setelah Polri mendapat 'kado' calon Kapolri baru saat menjelang HUT ke-59.

Seperti diketahui, pada 5 Juli lalu, anggota Komisi I DPR Djoko Susilo meminta Presiden segera mengajukan nama calon panglima TNI, pengganti Jenderal TNI Endriartono Sutarto. Disarankan, surat pengajuan calon panglima TNI sebaiknya dikirim pada awal Agustus 2005. Sehingga, pada peringatan HUT ke-60 TNI, sudah ada nama panglima baru.

Bagaimana pun juga, Dirgahayu TNI...! (ism)

Baca juga:

- Survey LSI: Indonesia Masih Berpeluang Dikudeta Militer
- Jaga Kepulauan Natuna, TNI Tambah Pasukan
- Panglima TNI:
Inventarisasi Bisnis TNI Final
- Puluhan Anggota TNI Bertrok dengan Polisi di Gianyar

SMS Iklan

jual tanah kebun 2.950m2 lokasi sisi jalan utama ds jonggol, bu, tp, hg
350rb/m2 - indra (628128546668)

Lihat

Pasang



Minority believe military should keep powers

Hera Diani
The Jakarta Post/Jakarta

Challenges still loom for a democratic state in Indonesia where civilians reign supreme, with a significant minority of people still believing military posts are vital for public order and security.

The survey, released on Tuesday by the Indonesian Research Institute (ISI), shows that a clear majority of Indonesians believe territorial military commands should be abolished.

Out of 1,137 people from 33 provinces interviewed in the survey on civilian supremacy and national defense, 55 percent to 58 percent of them disapproved of the territorial military commands at district, regional and provincial levels. However, a significant

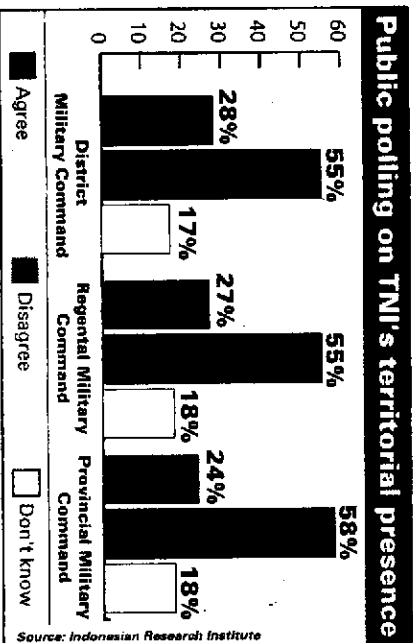
minority of 24 percent to 28 percent of those surveyed still thought the military commands should be kept in the regions.

The survey, which was conducted in September, also revealed that just over half of the interviewees agreed that the decision to proclaim a state of emergency or declare war should be made by the government and legislators.

Fewer, only 30 percent of the respondents, wanted to give the military that authority.

The survey revealed, unsurprisingly, that 82.2 percent of those interviewed agreed that the military's main role was to defend the state from external threats.

However, support for the military in politics seems to be dropping, with only 24 percent of people surveyed of the view that the country



should be led by former military officer, a drop from 34 percent last year.

The majority approved of the TNI's decision to quit politics, although some 26 percent of them could accept the military's continued involvement in politics. A large majority, around

68 percent of people, agreed that active military members should not occupy legislative posts, nor become the president, while between 51 percent and 60 percent suggested that only the government and the House of Representatives should decide the defense budget.

Fears that the military would ignore the role of civilian leaders were also high, with less than 50 percent of people believing that a civilian defense minister would have the authority to control and command military generals.

Most people, however, support reducing the military's powers and agree that the state should be solely responsible for financing the military and should increase the salaries of its members. They thought the military should be banned from engagement in businesses.

ISI executive director Saiful Mujani said the findings showed that while democratic impulses were the majority, a significant minority still believed in the importance of the military in politics and business.

Military observer Salim Said said the continued support for the military could have something to do with the unpopularity of the police and House members. "The people lack trust in the police. They also do not appreciate the performance of House members. The civilian political system's failure also encourages the military's involvement in politics," he told a discussion about the survey. Meanwhile, legislator Effandy Choiry from Commission I on security, defense and foreign affairs said he believed many in the military had no intention of letting civilians take away their special political and economic powers. "Don't heap the blame on legislators or the failure of civilians. We all are still learning, so give us a chance. The military has reigned supreme for years," he said.

POLITIK & HUKUM

REFORMASI TNI

Dukungan terhadap Supremasi Sipil Belum Solid

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki Hari Jadi Ke-60 TNI tanggal 5 Oktober, ternyata dukungan publik terhadap implementasi supremasi sipil atas TNI belum solid. Publik masih memberikan toleransi kemungkinan keterlibatan tentara dalam bidang politik praktis.

Belum solidnya dukungan atas supremasi sipil itu adalah hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipaparkan Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani di Jakarta, Selasa (4/10). Hasil survei itu dibahas pengamat militer Salim Said dan Agus Widjojo serta Wakil Ketua Komisi I DPR Effendy Choirie.

Survei itu dilakukan pada 22-26 September terhadap 1.137 orang yang tersebar di 33 provinsi. Saiful memaparkan, sebanyak 82 persen responden setuju tugas utama TNI adalah pertahanan negara dari ancaman negara lain. Secara umum publik menolak keterlibatan tentara aktif dalam politik, yakni rata-rata di atas 60 persen. Namun, masih ada yang menghendaki tentara

aktif terlibat dalam politik, yakni untuk menduduki jabatan anggota DPRD, DPR, presiden, gubernur, dan bupati. Ini yang dimaksud Saiful sebagai belum solidnya dukungan atas supremasi sipil.

Saiful berpendapat, belum solidnya implementasi supremasi sipil paling tidak ada tiga alasan utama, yakni tidak puas masyarakat atas pelaksanaan demokrasi, kinerja polisi yang buruk, dan ancaman negara lain.

Menanggapi hasil survei, Effendy Choirie mengungkapkan, hingga kini UU No 34/2004 yang mengamanatkan agar TNI menghormati supremasi sipil belum diimplementasikan.

Agus Widjojo beralasan, tidak sepenuhnya TNI dipersalahkan tidak menghormati supremasi sipil karena yang bertanggung jawab mereformasi TNI adalah otoritas sipil. Sedangkan Salim Said berpendapat, kemungkinan masuknya tentara dalam politik praktis terutama karena kegagalan politisi sipil mempertahankan demokrasi. (BUR)

Reformasi TNI Butuh Dorongan Politisi Sipil



HUT TNI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memeriksa barisan pasukan TNI yang pada Rabu (5/10) lalu memperingati hari ulang tahunnya (HUT) ke-60.

PEMBARUAN VEKURSIAN GORO

Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kembali agar prajurit TNI tidak kembali ke panggung politik. Presiden meminta agar TNI tetap netral dalam menyikapi permasalahan bangsa.

Menurut Presiden, sebagai tentara rakyat, TNI harus bersikap netral. Kalau pun dituntut keberpihakannya, TNI hanya dapat membela kepentingan rakyat dan negara, bukan kepentingan pribadi, kelompok, suku, agama, dan ras.

"TNI juga harus bersikap netral terhadap semua kekuatan politik di masyarakat. TNI harus berpihak kepada bangsa dan negara, bukan kepada kekuatan politik, sehingga TNI juga bisa mendorong proses demokratisasi," ujar Presiden.

Pernyataan presiden itu sejalan dengan arah reformasi yang digulirkan sejak 1998. Namun, survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan kecenderungan yang lain.

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.137 orang antara 22-26 September 2005 itu, masih terbuka peluang TNI untuk kembali ke panggung politik. Alasannya, masih belum ada pandangan yang solid di kalangan masyarakat Indonesia tentang prinsip-prinsip supremasi sipil. Sayangnya, survei itu tidak menanyakan juga kepada kalangan TNI, masih adakah keinginan mereka untuk kembali ke pang-

gung politik.

Berdasarkan hasil survei LSI itu, sebanyak 82 persen responden setuju jika tugas utama TNI adalah mempertahankan negara dari ancaman luar. Menurut Direktur Eksekutif LSI, Saiful Mujani, sentimen terhadap keterlibatan TNI aktif dalam politik praktis setiap tahun selalu berbeda.

Namun, menurut dia, secara keseluruhan masih cukup banyak masyarakat yang setuju kalau Indonesia harus dipimpin kembali oleh TNI. "Masih ada anggota masyarakat yang menghendaki tentara aktif terlibat dalam politik, misalnya sebagai anggota DPRD, DPR, presiden, gubernur, dan bupati. Hal ini menunjukkan kalau dukungan atas supremasi sipil belum solid," kata dia.

Menurut Saiful, ada beberapa faktor yang membuat dukungan terhadap implementasi prinsip-prinsip supremasi sipil belum solid. Faktor itu antara lain evaluasi publik terhadap pelaksanaan demokrasi yang dianggap belum baik.

Selain itu, publik juga masih meragukan kinerja kepolisian yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban dalam negeri. Bila kinerja polisi dinilai buruk, dukungan terhadap pelaksanaan supremasi sipil juga lemah. Akibatnya, masyarakat akan terus mendambakan kehadiran tentara sebagai kekuatan untuk menjaga ketertiban dalam negeri.

Pandangan berbeda disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Effendy

Choirie. Dia mencurigai bahwa belum ada keseriusan di kalangan TNI untuk tunduk pada supremasi sipil.

Dia tidak yakin kalau TNI mau melaksanakan Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI yang merupakan produk hukum yang dibuat oleh otoritas sipil. TNI dinilai tidak mempunyai niat baik untuk tidak kembali berpolitik.

Cari Pembeneran

"Misalnya dalam kasus keikutsertaan sejumlah anggota TNI aktif dalam pemilihan kepala daerah. Dalam UU 34/2004 sudah tegas dilarang. TNI menggunakan UU tentang pemerintahan daerah sebagai pembeneran keikutsertaan mereka dalam pilkada. Padahal, UU TNI merupakan *lex specialis* yang harus dipatuhi TNI," kata dia.

Effendy menegaskan, institusi TNI pada era reformasi ini harus dilepaskan pada posisi yang sebenarnya. Sudah saatnya TNI untuk tunduk dalam supremasi sipil. Reformasi TNI tidak dapat dilakukan oleh mereka sendiri.

Pengamat politik Salim Said mengatakan, tentara tidak akan kembali ke panggung politik tanpa ada dorongan dari politisi sipil. Dorongan tentara masuk ke politik akan akan semakin kuat jika setiap kekuatan politik sipil saling bertikai.

"Biasanya, ciri-ciri negara yang dipimpin oleh militer adalah terjadi perpecahan di kalangan masyarakat-

nya atau istilahnya *fragmented society*. Kondisi itu mengakibatkan tidak ada rasa saling percaya di kalangan masyarakat. Tentara pun akhirnya menjadi rebutan dari pihak-pihak yang saling bertikai," kata Salim.

Selain itu, kembalinya TNI ke panggung politik juga karena ada kebutuhan praktis dari masyarakat terhadap keberadaan mereka. Masyarakat yang kecewa dengan ketidakmampuan polisi sebagai institusi sipil untuk menjaga keamanan, misalnya, akan kembali berharap peran itu diambil kembali oleh TNI.

Mantan Kepala Staf Teritorial TNI, Agus Widjojo berpendapat, TNI tidak dapat disalahkan sepenuhnya dalam masalah penghormatan supremasi sipil. Sebab, menurut dia, tanggung jawab dalam mereformasi TNI adalah otoritas sipil.

"Seharusnya Menteri Pertahanan yang merupakan orang sipil ditanya tentang implementasi UU TNI. Menhan seharusnya menegur Panglima TNI yang mengizinkan prajuritnya ikut dalam pilkada. TNI tidak bisa disalahkan sepenuhnya," kata Agus.

Namun, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto meyakinkan masyarakat kalau TNI serius menjalankan reformasi internal. Beberapa langkah sudah dilakukan untuk mewujudkan reformasi itu seperti menyerahkan seluruh bisnis militer kepada negara.

SINAR HARAPAN

NASIONAL

Kinerja Politisi Lemah

Dukungan Supremasi Sipil Tak Solid

Oleh
INNO JEMABUT

Jakarta - Kemauan masyarakat agar TNI tak lagi terlibat dalam politik cukup besar. Namun, dukungan terhadap implementasi prinsip-prinsip supremasi sipil belum solid.

Buruknya kinerja para politisi dinilai ikut bertanggung jawab terhadap lemahnya dukungan publik terhadap supremasi sipil. Kesimpulan ini muncul dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang diluncurkan di Jakarta, Selasa (4/10).

Survei yang dilakukan 22-26 September 2005 ini dilakukan terhadap 1.137 responden yang tersebar di 33 provinsi. Mayoritas responden masih memberikan toleransi pada keterlibatan tentara dalam menjaga keamanan dan ketertiban yang seharusnya dilakukan oleh polisi.

Toleransi semacam ini padahal akan menjadi pintu masuk bagi TNI untuk terlibat dalam proses politik. Sentimen publik ini, menurut LSI, seiring dengan sifat Undang-Undang Pertahanan yang masih membuka celah bagi keterlibatan TNI dalam wilayah di luar pertahanan negara, yakni membantu pemerintah daerah dan polisi.

Buruknya kinerja politisi sipil menjadi salah satu faktor penyebab tak solidnya dukungan publik terhadap supremasi sipil dan memberikan toleransi lebih besar terhadap kepemimpinan tentara.

Tak solidnya dukungan

ini berimbas pada lemahnya tuntutan penghapusan kekuasaan teritorial. Selain itu, dukungan atas kepemimpinan sipil atas TNI dalam wujud Menteri Pertahanan yang berasal dari kalangan sipil juga cukup lemah. Ini mencerminkan masih lemahnya kerangka kelembagaan yang mengatur wewenang Menteri Pertahanan dan Panglima TNI di mana Menhan lebih berperan pada masalah administratif.

Pengamat militer Agus Widjoyo menilai situasi ini memang merupakan karakter negara dalam keadaan transisi demokrasi. Hal ini juga disebabkan kultur bangsa Indonesia yang sangat tradisional dan takut terhadap masa depan yang tak pasti.

"Kultur kita memang enggan terhadap perubahan. Masa depan memang tidak pernah pasti. Karena itu kita merasa takut. Sebaliknya, kita khawatir meninggalkan masa lalu yang sudah pasti," ungkapnya kepada SH, Selasa (4/10).

Menurutnya, jika masyarakat menganggap politisi sipil masih berada di bawah dominasi militer dan menilai kondisi tersebut sebagai sesuatu yang permanen, demokrasi dengan tingkat supremasi sipil tidak akan tercapai.

Kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi, ada pada otoritas politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat. TNI dan polisi hanya alat pemerintah yang tidak dipilih oleh rakyat secara langsung. "TNI dan polisi tidak perlu berpolitik seperti terjadi di masa lalu," ujarnya.

I N T E R N A S I O N A L

Masih Terbuka Peluang TNI Berpolitik

JAKARTA - Peluang Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk berpolitik masih terbuka lebar. Hal itu dikarenakan dukungan terhadap implementasi prinsip-prinsip supremasi sipil di kalangan masyarakat belum solid.

Hal itu merupakan kesimpulan dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif LSI, Saiful Mujani kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/10). Pemaparan hasil survei itu ditanggapi oleh pengamat militer Salim Said, Agus Widjojo, dan Wakil Ketua Komisi I DPR, Effendy Choirie.

Survei LSI itu dilakukan pada rentang waktu 22 hingga 26 September 2005. Survei dilakukan terhadap 1.137 responden yang tersebar di 33 provinsi. "Dukungan publik terhadap keharusan TNI tidak terlibat dalam politik, dan membatasi TNI pada tugas pertahanan negara sangat kuat. Tapi, dukungan terhadap implementasi supremasi sipil belum begitu solid sehingga masih terbuka peluang bagi TNI untuk berpolitik," kata dia.

Berdasarkan hasil survei LSI, sebanyak 82 persen responden setuju jika tugas utama TNI adalah pertahanan negara dari ancaman luar. Hal itu membuktikan kalau secara umum masyarakat Indonesia menolak keterlibatan tentara aktif dalam politik praktis.

Menurut Saiful, sentimen terhadap keterlibatan TNI aktif dalam politik praktis setiap tahun selalu berbeda. Namun, secara keseluruhan masih cu-

kup banyak, meski masih di bawah angka 50 persen, masyarakat yang setuju kalau Indonesia dipimpin oleh TNI aktif.

Dijelaskan, pada 1999, masyarakat yang setuju Indonesia dipimpin TNI aktif sebanyak 13 persen. Jumlah itu terus meningkat. Pada 2004 angkanya mencapai 34 persen dan pada 2005 sedikit menurun hanya sekitar 24 persen.

"Masih ada anggota masyarakat yang menghendaki tentara aktif terlibat dalam politik, misalnya sebagai anggota DPRD, DPR, presiden, gubernur, dan bupati. Hal ini menunjukkan kalau dukungan atas supremasi sipil belum solid," kata dia.

Menurut Saiful, ada beberapa faktor yang membuat dukungan terhadap implementasi prinsip-prinsip supremasi sipil belum solid. Faktor itu antara lain evaluasi publik terhadap pelaksanaan demokrasi yang dianggap belum baik. Selain itu, publik juga masih meragukan kinerja kepolisian yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban dalam negeri. Bila kinerja polisi dinilai buruk, dukungan terhadap pelaksanaan supremasi sipil juga lemah. Akibatnya, masyarakat akan terus mendambakan kehadiran tentara sebagai kekuatan untuk menjaga ketertiban dalam negeri.

"Buruknya kinerja politisi sipil juga berdampak pada kuatnya toleransi publik terhadap kepemimpinan tentara. Sebab, pelaksanaan demokrasi bergantung pada kinerja politisi sipil," kata dia. (O-1)

LSI: Masih ada pintu bagi TNI untuk berpolitik

Oleh BAMBANG DWI DAMUWARTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Menyambut hari jadi TNI hari ini, dukungan publik terhadap kehadiran TNI tidak teribat dalam politik dan bisnis, hanya membatasi diri pada tugas pertahanan negara sangat kuat, namun masih terbuka kemungkinan ada pintu bagi TNI untuk kembali berpolitik.

Meski dukungan terhadap kepemimpinan sipil atas militer sangat kuat tapi dukungan terhadap implementasi prinsip-prinsip supremasi sipil belum begitu solid. Publik masih mentoleransi kemungkinan keterlibatan tentara dalam keamanan-keterlibatan yang menjadi tanggungjawab polisi. Keterlibatan dalam keamanan-

an domestik ini potensial menjadi pintu masuk bagi masih terlibatnya TNI dalam proses politik. Sentimen publik ini sejalan dengan sifat UU Pertahanan 2004 yang masih membuka celah bagi keterlibatan TNI dalam wilayah diluar pertahanan, meski sudah ada UU No. 34/2004 khusus tentang TNI.

Hal itu mengemuka dalam temuan Lembaga Survey Indonesia (LSI) yang dihasilkan dari survei terhadap 1137 responden di 33 provinsi dengan proporsi 42% kota dan 58% desa yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif LSI Syaitul Mufdani. Kemungkinan kembalinya peran sosial politik TNI terbutu-ka akibat lemahnya peran polisi dalam menjamin keamanan-

an masyarakat yang menjadi tanggungjawab mutlak kepolisian.

Sebanyak 82,2% responden setuju tugas utama TNI hanya dalam bidang pertahanan dan rata-rata 68% setuju anggota TNI yang belum pensiun tidak boleh jadi anggota DPR, DPRD, Presiden, Gubernur serta Bupati.

Terdapat kepemimpinan Menhankam sipil atas Panglima TNI, sebanyak 50% responden yakin Menhankam sipil mampu memimpin TNI, 45% yakin Menhankam sipil dapat memerintah dan mengendalikan para jenderal, 60% yakin komando sipil atas TNI akan membuat TNI semakin kuat. Namun, dalam implementa-

sinya publik masih kurang percaya terhadap kinerja aparat kemanan dari sipil padahal pembubaran komando teritorial merupakan bagian dari implementasi supremasi sipil. Sebanyak 55% tidak setuju Kodim dibubarkan, 55% tidak setuju Kodim dibubarkan dan 58% tidak setuju Kodam dibubarkan.

Menanggapi hal itu, pengamat militer Salim Said menjelaskan ada dua hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan respon antara tuntutan supremasi sipil dengan implementasinya yaitu kurangnya informasi dan interpretasi yang berbeda.

"Tapi faktor yang mungkin jadi penyebab utama adalah kebutuhan pragmatis di masyarakat atas keamanan, hingga saat ini masyarakat masih belum percaya terhadap polisi," jelasnya.

LSI, dalam penjelasannya menilai belum solidnya masyarakat mendukung implementasi supremasi sipil terjadi akibat tiga faktor yaitu kinerja demokrasi yang belum memuaskan, kinerja pemerintah yang buruk dan ancaman dari negara-negara lain.

Terkait ancaman dari luar, 51% responden menilai Amerika adalah ancaman yang paling utama, 19% menyatakan Malaysia sebagai ancaman. Namun diantara negara-negara tetangga yang menjadi ancaman, Malaysia menduduki urutan pertama sebesar 20,7%.

BERITA UTAMA

SURVEI LSI

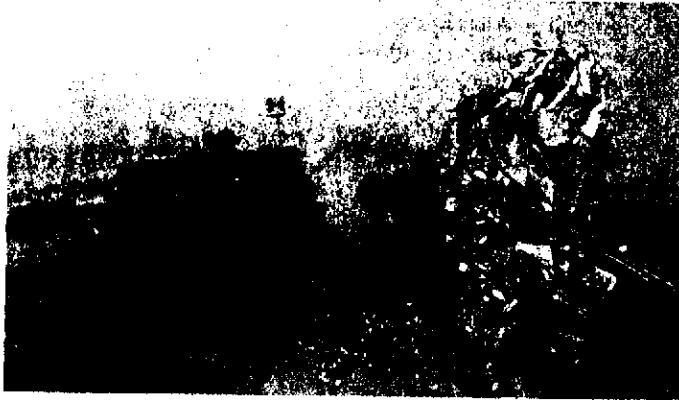
TNI Harus Menerima Insentif

JAKARTA – Dukungan masyarakat terhadap keharusan TNI tidak terlibat dalam politik praktis sangat kuat. Masyarakat juga mendukung TNI membatasi dirinya hanya pada tugas pertahanan negara. Begitu juga dukungan terhadap keharusan TNI untuk tidak berbisnis juga kuat. Untuk itu, TNI harus menerima insentif.

Namun, dukungan terhadap implementasi prinsip-prinsip supremasi sipil belum begitu kuat. Artinya, masyarakat masih menoleransi keterlibatan tentara dalam keamanan dan ketertiban yang menjadi tanggung jawab polisi. Padahal, keterlibatan dalam keamanan domestik ini potensial menjadi pintu masuk TNI dalam proses politik praktis.

Hal itu tertuang dalam temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipublikasikan di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, kemarin. Survei LSI yang dilakukan pada 22-26 September 2005 ini melibatkan 1.137 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Responden dipilih berdasarkan metode *multistage random sampling* dengan *margin error* 2,9%. "Hasil survei kami menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menolak keterlibatan tentara aktif



FOKUS PERTAHANAN: TNI saat latihan perang di Kalbar, belum lama ini.

dalam politik praktis," kata Direktur LSI Saiful Mudjani, kemarin.

Dari hasil survei tersebut, diketahui bahwa tingkat toleransi (dukungan, Red.) masyarakat terhadap keterlibatan tentara aktif dalam politik praktis tergolong kecil, yakni 26%.

Namun dibandingkan negara-negara demokrasi yang sudah mapan, tingkat toleransi yang terungkap dari hasil survei ini masih tergolong tinggi. Di Jerman misalnya, toleransi terhadap keterlibatan tentara dalam politik praktis hanya 1%, AS 7%, Korea Selatan 4%, dan Argentina 4%.

"Ke depan, angka ini (tingkat toleransi, Red.) harus semakin

kecil. Di negara-negara yang demokrasi sudah mapan, dukungan atas keterlibatan tentara dalam politik praktis di bawah 10%," katanya. Saiful menjelaskan, tingkat toleransi masyarakat terhadap keterlibatan TNI aktif dalam politik praktis, sejalan dengan perkembangan demokrasi yang terdapat di negara itu.

Dari hasil survei lembaganya tersebut, Saiful mengakui bahwa posisi Indonesia masih berada pada level negara-negara yang demokrasi belum stabil, seperti Turki. "Sekalipun demokrasi di Turki sudah berlangsung sejak 1950-an, tapi demokrasi tidak berkembang," ujarnya. (havid vebri)

LSI: Meski Terancam, Rakyat Tolak Militer

MH Thamrin, Warta Kota

Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, meskipun merasakan munculnya ancaman yang datang dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS), Malaysia, dan Australia, rakyat tetap menolak kehadiran TNI di dunia politik dan membatasi dirinya hanya pada tugas pertahanan negara.

Menurut hasil survei LSI yang dipublikasikan di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (4/10) itu, ancaman penyerbuan sebagaimana dialami Irak dan Afghanistan menimbulkan bayang-bayang ketakutan pada rakyat. Sementara ancaman pencaplokan wilayah seperti Ambalat oleh Malaysia dan kemungkinan Papua oleh Australia, telah menjadi pemahaman publik.

Namun survei juga membuktikan bahwa rakyat tetap memilih supremasi sipil dibandingkan kembalinya militer ke panggung kekuasaan. Juga ditemukan bahwa dukungan rakyat agar TNI tidak terlibat dalam politik dan membatasi dirinya hanya pada tugas pertahanan negara, sangatlah kuat.

Namun menurut Saiful Mujani yang membacakan hasil survei itu dalam diskusi yang menampilkan pengamat militer Salim Said, Ketua PKB/anggota DPR Effendy Choirie, dan Letjen (Pur) Agus Widjojo itu, dukungan atas implementasi prinsip-prinsip supremasi sipil belum solid. Responden masih memberikan toleransi pada kemungkinan keterlibatan militer dalam masalah keamanan domestik dan ketertiban, yang berpotensi menjadi pintu masuk bagi terlibatnya TNI dalam proses politik, padahal tugas itu menjadi tanggung jawab polisi.

"Sentimen publik ini kongruen (sebangun) dengan sifat UU Pertahanan 2004 yang masih membuka celah bagi keterlibatan TNI dalam wilayah di luar pertahanan negara, yakni membantu pemerintah daerah dan polisi," kata Saiful.

Menurut dia, penghapusan kekuatan teritorial sebagaimana dikehendaki oleh norma demokrasi, diketahui masih lemah dukungannya di masyarakat. Dari sini, lanjutnya, keterlibatan militer dalam kehidupan sosial-politik domestik dapat masuk.

"Praktik supremasi sipil kemudian menjadi persoalan rumit dan dapat mengganggu proses pematangan demokrasi kita," katanya.

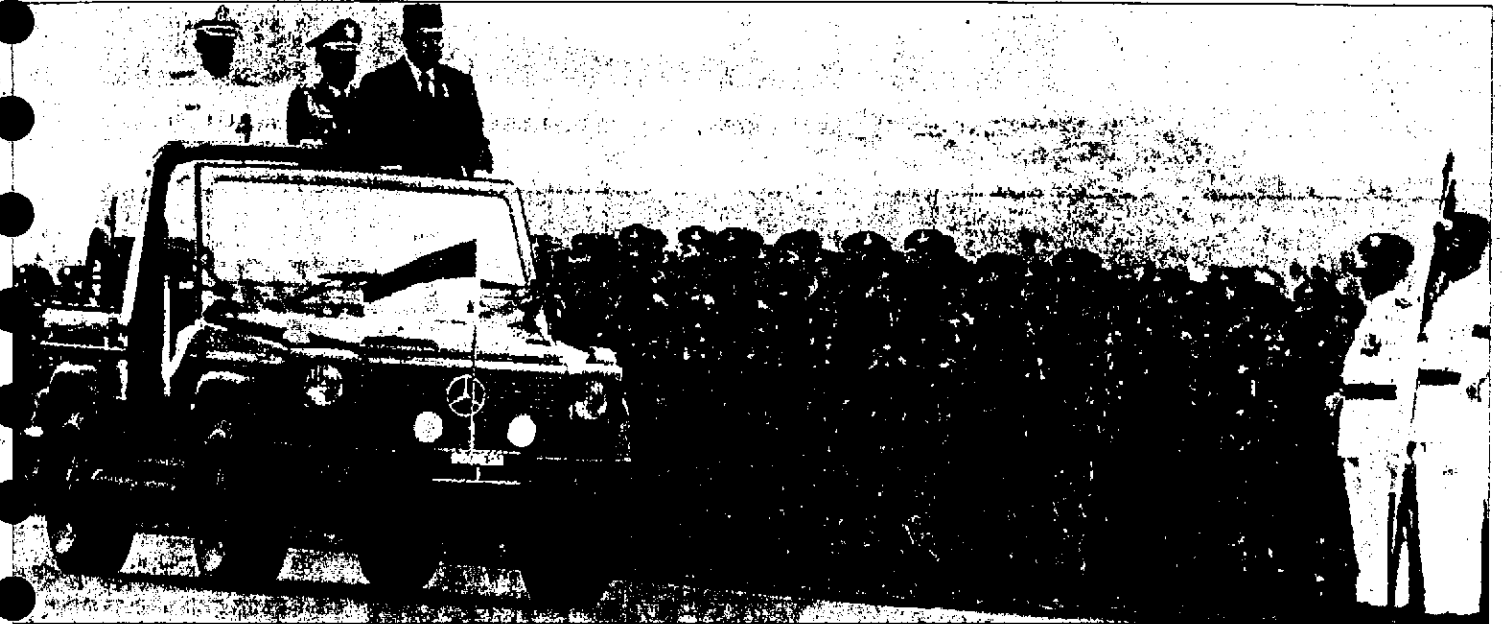
Namun survei LSI ini juga menemukan bahwa dukungan publik terhadap kepemimpinan sipil atas TNI dalam wujud menteri pertahanan sipil juga belum solid. Kenyataan ini, kata Saiful, juga mencerminkan masih lemahnya UU yang mengatur hubungan wewenang Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang menunjukkan bahwa Menhankam lebih berperan hanya untuk hal-hal administratif.

"Buruknya kinerja politisi sipil bertanggung jawab terhadap kuatnya toleransi publik terhadap kepemimpinan tentara. Demikian juga dalam hal keamanan. Bila kinerja polisi dinilai buruk maka dukungan terhadap pelaksanaan supremasi sipil juga lemah. Kehadiran tentara sebagai kekuatan untuk ketertiban domestik akan terus dirasakan manfaatnya," kata Saiful. (moe)



Saiful Mujani

Reformasi TNI Butuh Dorongan Politisi Sipil



PEMBARUAN/TC KURNIAN TORO

HUT TNI - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memeriksa barisan pasukan TNI yang pada Rabu (5/10) lalu memperingati hari ulang tahunnya (HUT) ke-60.

Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kembali agar prajurit TNI tidak kembali ke panggung politik. Presiden meminta agar TNI tetap netral dalam menghadapi permasalahan bangsa.

Menurut Presiden, sebagai tentara rakyat, TNI harus bersikap netral. Kalau pun dituntut keberpihakannya, TNI hanya dapat membela kepentingan rakyat dan negara, bukan kepentingan pribadi, kelompok, suku, agama, dan ras.

"TNI juga harus bersikap netral terhadap semua kekuatan politik di masyarakat. TNI harus berpihak kepada bangsa dan negara, bukan kepada kekuatan politik, sehingga TNI juga bisa mendorong proses demokrasi," ujar Presiden.

Pernyataan presiden itu sejalan dengan arah reformasi yang digulirkan sejak 1998. Namun, survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan kecenderungan yang lain.

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.137 orang antara 22-26 September 2005 itu, masih terbuka peluang TNI untuk kembali ke panggung politik. Alasannya, masih belum ada pandangan yang solid di kalangan masyarakat Indonesia tentang prinsip-prinsip supremasi sipil. Sayangnya, survei itu tidak menanyakan juga kepada kalangan TNI, masih adakah keinginan mereka untuk kembali ke pang-

gung politik.

Berdasarkan hasil survei LSI itu, sebanyak 82 persen responden setuju jika tugas utama TNI adalah mempertahankan negara dari ancaman luar. Menurut Direktur Eksekutif LSI, Saiful Mujani, sentimen terhadap keterlibatan TNI aktif dalam politik praktis setiap tahun selalu berbeda.

Namun, menurut dia, secara keseluruhan masih cukup banyak masyarakat yang setuju kalau Indonesia harus dipimpin kembali oleh TNI. "Masih ada anggota masyarakat yang menghendaki tentara aktif terlibat dalam politik, misalnya sebagai anggota DPRD, DPR, presiden, gubernur, dan bupati. Hal ini menunjukkan kalau dukungan atas supremasi sipil belum solid," kata dia.

Menurut Saiful, ada beberapa faktor yang membuat dukungan terhadap implementasi prinsip-prinsip supremasi sipil belum solid. Faktor itu antara lain evaluasi publik terhadap pelaksanaan demokrasi yang dianggap belum baik.

Selain itu, publik juga masih meragukan kinerja kepolisian yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban dalam negeri. Bila kinerja polisi dinilai buruk, dukungan terhadap pelaksanaan supremasi sipil juga lemah. Akibatnya, masyarakat akan terus mendambakan kehadiran tentara sebagai kekuatan untuk menjaga ketertiban dalam negeri.

Pandangan berbeda disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Effendy

Choirie. Dia mencurigai bahwa belum ada keseriusan di kalangan TNI untuk tunduk pada supremasi sipil.

Dia tidak yakin kalau TNI mau melaksanakan Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI yang merupakan produk hukum yang dibuat oleh otoritas sipil. TNI dinilai tidak mempunyai niat baik untuk tidak kembali berpolitik.

Cari Pembeneran

"Misalnya dalam kasus keikutsertaan sejumlah anggota TNI aktif dalam pemilihan kepala daerah. Dalam UU 34/2004 sudah tegas dilarang. TNI menggunakan UU tentang pemerintahan daerah sebagai pembeneran keikutsertaan mereka dalam pilkada. Padahal, UU TNI merupakan *lex specialis* yang harus dipatuhi TNI," kata dia.

Effendy menegaskan, institusi TNI pada era reformasi ini harus diletakkan pada posisi yang sebenarnya. Sudah saatnya TNI untuk tunduk dalam supremasi sipil. Reformasi TNI tidak dapat dilakukan oleh mereka sendiri.

Pengamat politik Salim Said mengatakan, tentara tidak akan kembali ke panggung politik tanpa ada dorongan dari politisi sipil. Dorongan tentara masuk ke politik akan semakin kuat jika setiap kekuatan politik sipil saling bertikai.

"Biasanya, ciri-ciri negara yang dipimpin oleh militer adalah terjadi perpecahan di kalangan masyarakat-

nya atau istilahnya *fragmented society*. Kondisi itu mengakibatkan tidak ada rasa saling percaya di kalangan masyarakat. Tentara pun akhirnya menjadi rebutan dari pihak-pihak yang saling bertikai," kata Salim.

Selain itu, kembalinya TNI ke panggung politik juga karena ada kebutuhan praktis dari masyarakat terhadap keberadaan mereka. Masyarakat yang kecewa dengan ketidakmampuan polisi sebagai institusi sipil untuk menjaga keamanan, misalnya, akan kembali berharap peran itu diambil kembali oleh TNI.

Mantan Kepala Staf Teritorial TNI, Agus Widjojo berpendapat, TNI tidak dapat disalahkan sepenuhnya dalam masalah penghormatan supremasi sipil. Sebab, menurut dia, tanggung jawab dalam mereformasi TNI adalah otoritas sipil.

"Seharusnya Menteri Pertahanan yang merupakan orang sipil ditanya tentang implementasi UU TNI. Menahan seharusnya menegur Panglima TNI yang mengizinkan prajuritnya ikut dalam pilkada. TNI tidak bisa disalahkan sepenuhnya," kata Agus.

Namun, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto meyakinkan masyarakat kalau TNI serius menjalankan reformasi internal. Beberapa langkah sudah dilakukan untuk mewujudkan reformasi itu seperti menyerahkan seluruh bisnis militer kepada negara.

Rabu, 05 Okt 2005

Rapor Intelijen Dinilai Buruk

JAKARTA - Kinerja intelijen di negeri ini kembali disorot negatif. Anggota DPR RI Effendi Khoirie mengungkapkan, terjadinya peledakan bom Bali II yang menewaskan puluhan nyawa membuktikan bahwa kinerja intelijen Indonesia gagal dalam mengantisipasi adanya teror di tanah air.

"Pemerintahan Megawati maupun SBY tidak mampu berbuat banyak terhadap aksi teror yang terus terjadi di Indonesia," kata Effendi dalam diskusi Supremasi Sipil dan Pertahanan Nasional yang diadakan Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Jakarta kemarin.

Effendi mengatakan, sebetulnya Komisi I DPR selalu mengingatkan intelijen tentang bahaya dari teror bom. "Kita juga sering bertanya seberapa jauh antisipasi menghadapi teror tersebut," tuturnya.

Namun, pihak intelijen selalu berdalih menghadapi keterbatasan dana dalam menjalankan perannya secara profesional. "Kekurangan-kekurangan intelijen kita diperparah tidak adanya landasan hukum yang kuat. Hanya melalui keppres yang merupakan produk masa lalu. Karena itu, semua pihak, baik DPR maupun pemerintah, agar dapat mendorong terciptanya undang-undang intelijen negara, sehingga kita mempunyai intelijen yang bisa diandalkan," ujar anggota DPR dari Fraksi PKB itu. Selain itu, menurut dia, koordinasi intelijen, baik polisi, TNI, maupun BIN, tidak berjalan semestinya.

Sementara itu, Letjen (pur) Agus Wijoyo mengatakan, gagalnya intelijen dalam mengantisipasi teror bom di Bali disebabkan intelijen Indonesia dalam transisi. Yaitu, adanya perubahan tatanan baru tentang fungsi intelijen dari masa lalu dengan fungsi intelijen saat ini.

Pada masa lalu, intelijen untuk tingkat nasional praktis ditangani BAIS yang mengikuti peran dan tugas pokok ABRI atau TNI. Dengan begitu, TNI memiliki peran sebagai lembaga penjaga negara.

"Sekarang peran TNI dipusatkan untuk menjalankan peran pertahanan nasional. Karena itu, fungsi intelijen, dalam hal ini BAIS, dibatasi dalam ruang lingkup peran organisasi TNI. Untuk tingkat nasional saat ini, penjaga negara adalah BIN. Seharusnya polisi juga diberi peran yang besar dalam hal intelijen," ujar Agus.

Dia menambahkan, BIN adalah bentukan baru yang mestinya memikirkan pengembangan dan pembinaan institusi sendiri agar kinerjanya bisa maksimal. Sementara itu, polisi karena pengalaman masa lalu selama ini selalu berperan yang sifatnya reaktif, mencari bukti-bukti, membuat police line, dan menyelidiki tersangka sehingga tidak terbiasa dengan sifatnya intelijen.

"Selama ini fungsi intelijen banyak ditangani intelijen militer. Karena itu, perlu pengaturan tatanan kebiasaan dan fungsi-fungsi koordinasi antarintelijen yang lebih baik," kata Agus.
(wws)

<< :: [Kembali](#)

- HOME
-  LIPUTAN KUSUS
-  WANITA
-  KESEHATAN
-  OTOMOTIF
-  TEKNOTREND
-  WISATA
-  BUDAYA
-  GRIYA
-  OLAHRAGA
-  GAMES
-  PENTAS
-  KONSULTASI

- ▶ **BERSEKUTUANG**
- ▶ **Setahun Pemerintahan Presiden Yudhoyono**
MENTERI PERTAHANAN Masih Membuat Militer Tetap Dominan
- ▶ **SURVEI LSI**
Anas: SBY Harus Perbaiki Kinerjanya
- ▶ **PARPOL LOKAL**
GAM Susun Draf RUU Pemerintahan di Aceh
- ▶ **KENAIKAN HARGA BBM**
Sekjen PKS: Tak Pernah Lagi Diajak Bicara SBY
- ▶ **TERORISME**
Koter Efektif Tapi Perlu Dikontrol
- ▶ **GOOD GOVERNANCE**
Jimly Asshiddiqie: Cegah Masyarakat Hiperregulasi
- ▶ **PEMERINTAHAN SBY-JK**
Habibie: Hubungan Presiden-DPR Pincang
- ▶ **KOMANDO TERITORIAL**
Pemerintah Jangan Lahirkan Ancaman Baru
- ▶ **PASCAPERDAMAIAN RI-GAM**
Naskah RUU Pemerintahan NAD akan Diseminarkan
- ▶ **UBUD**
Arief Budiman Buka UWRP 2005
- ▶ **KINERJA PEMERINTAH SBY-JK Dinilai**
Belum Sesuai Harapan
- ▶ **Setahun Pemerintahan Presiden Yudhoyono**
MENTERI KESEHATAN Sebuah Awal yang Lumayan Bagus

arsip



- ▶ **GEMPA BUMI**
Korban Tewas

SURVEI LSI

Supremasi Sipil Diinterpretasikan Berbeda-beda

Kamis, 6 Oktober 2005

JAKARTA (Suara Karya): Terkait hasil survei Lembaga (LSI) tentang tidak solidnya dukungan publik terhadap demokrasi, pakar politik militer Indonesia Salim Said mersebut dapat muncul sebagai akibat kurangnya informasi interpretasi atas istilah supremasi sipil.

LSI di Jakarta, Selasa (4/10), mengumumkan bahwa 82,2 persen warga Indonesia atau 8 dari 10 orang utama TNI adalah melaksanakan pertahanan negara dan lain tetapi hanya 45 persen yang yakin jika menghancurkan memerintah dan mengendalikan jenderal.

"Saya curiga ketidakkonsistenan publik untuk memilih sipil terutama diakibatkan oleh kurangnya informasi berbeda mereka atas istilah supremasi sipil," kata Salim

Kurangnya informasi mengakibatkan masyarakat tahu akan apa yang dimaksud dengan supremasi sipil secara langsung mereka mungkin memiliki interpretasi yang istilah supremasi sipil.

"Kejadian serupa terjadi sewaktu dilakukan polling syariat Islam. Saat itu hampir seluruh responden setuju apakah mereka setuju hukuman potong tangan, hukuman dan lain-lain, persentase jawaban responden berbeda

Itulah sebabnya, Salim menambahkan, sekali terhadap supremasi sipil tetapi tidak serta merta rincian dari prinsip-prinsip supremasi sipil.

Selain hal tersebut, Salim juga menggarisbawakan pengalaman praktis dari masyarakat yang kemudian untuk memberikan toleransi-toleransi bagi militer pada

Sementara itu Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani satu prinsip demokrasi adalah keputusan-keputusan strategis dibuat oleh pejabat-pejabat yang dipilih rakyat lewat termasuk yang berkaitan dengan pertahanan nasional.

"Karena itu menjadi mutlak agar tentara dibekali praktis karena ia tidak dipilih oleh rakyat, dan proses boleh bertumpu pada demokrasi, melainkan pada p Dalam demokrasi, tentara tidak boleh punya otoritas keputusan-keputusan mendasar dan strategis dalam

- 30.000 Jiwa Lebih
- SOLIDARITAS TIMOR LESTE
- Xanana Ingatkan Semua Pihak Jauhi Kekerasan
- TERORISME DI MALAYSIA
- Giliran Komisi Eropa Diteror
- PATROLI BERSAMA Jepang dan AS Ingin Amankan Selat Malaka
- Wapres: Banyak Peluang Ekonomi di Afsel
- Diplomatik Indonesia Teruskan Perundingan Soal Ambalat

arsip

WAJIB

- Din Syamsuddin*
- Sugiharto*
- JP Solossa*
- Siti Fadilah Supari*
- Jero Wacik*
- Fahmi Idris*

arsip

BERITA

- DARI ISTANA
- Wapres: Pemerintah Tak Pernah Akui JI
- DARI SENAYAN
- Razak Porosi Bantah Jadi Calo Anggaran
- DARI ISTANA
- Presiden Sosialisasikan Briket Batubara
- DARI SENAYAN
- Ketua MPR: Tindak Pelaku Penyimpangan Dana BBM
- DARI ISTANA
- PM Thailand dan PM Prancis Sampaikan Duka Cita
- DARI SENAYAN
- Anggota DPD Buka Posko Bom Bali

arsip

negara," ujarnya.

Oleh karena itu, Saiful menambahkan, pada dasarnya merencanakan, membuat, memutuskan, dan mempertahankan negara adalah pejabat publik yang dipilih secara

Prinsip supremasi sipil adalah kondisi di mana alat dan pelaksana pertahanan nasional. Terutama wewenang dan legitimasi untuk membuat keputusan pertahanan, karena yang punya wewenang untuk ini adalah parlemen. (Victor AS/Ant)

Politik | Hukum | Ekonomi | Metropolitan | Nusantara | Inter
Humor | Opini | About Us

Copy Right © 2000 Suara Karya Online
Powered by Hanoman-1

■ Jajak pendapat

Tetaplah di Barak, Jenderal

Publik menilai TNI tak lagi boleh berada di panggung politik. Kinerja Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dianggap baik, meski dibanding Wiranto ia kalah populer.

SUDAH jadi rahasia umum, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto bukan orang yang suka tampil di muka publik. Ada yang bilang, dia bahkan cenderung pemalu. Ia bekerja di lapangan, di balik meja, dan tak seperti jenderal atau mantan petinggi TNI lainnya, ia tak suka menyanyi di panggung hajatan terbuka. Itulah sebabnya ia bukan orang yang populer—setidaknya di mata responden jajak pendapat *Tempo*. Dibandingkan dengan bekas Panglima TNI lainnya—Wiranto, Widodo A.S., Try Sutrisno, atau Edi Sudradjat—ia paling tidak dikenal masyarakat.

Tapi, pada periode kepemimpinannya—lah TNI mendapat tugas berat. Sejumlah bisnis TNI—ladang usaha yang kerap dituding hanya memakmurkan para jenderal—dipotong. Tak lama lagi kendali bisnis itu akan dialihkan dari Markas Besar TNI ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, pada era Sutarto—lah perundingan Helsinki antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berlangsung dengan mulus. Bisik-bisik menyebutkan, diperpanjangnya masa jabatan Sutarto hingga tahun depan dilakukan untuk mengamankan pelaksanaan perjanjian damai itu.

Bagi publik, kinerja Sutarto memang tak kinclong-kinclong amat. Dalam skala penilaian sangat bagus sampai buruk, ia rata-rata dinilai bagus (bukan sangat bagus). Dalam memimpin TNI, ia dianggap berhasil dalam memastikan kedaulatan dan keutuhan Indonesia. Ia juga *legawa* dalam menempatkan TNI di bawah kendali sipil. Skor terendah didapatnya dalam hal penyelesaian konflik di Papua. Sedikit di atas itu, ia dianggap berhasil meyakinkan elemen TNI agar mendukung kesepakatan Helsinki. Bagi responden Aceh, Jenderal Sutarto dinilai paling sukses dibandingkan dengan Panglima TNI sebelumnya.

Di usia TNI yang ke-60—peringatannya jatuh 5 Oktober, Rabu pekan ini—responden menilai tak zamannya lagi tentara masuk ke panggung politik. Setelah reformasi 1998, peran politik TNI memang pelan-pelan dikurangi. Kini tak ada lagi korps baju hijau aktif yang duduk di kursi parlemen. Responden menilai tugas utama TNI adalah menjaga Indonesia dari serangan negara lain (44,1 persen) dan menjaga ketertiban dalam negeri (40,7 persen). Tugas yang terakhir sebetulnya diemban oleh polisi. Tapi, melihat lemahnya personel

Polri, responden masih memberi ruang bagi tentara untuk menjaga ketertiban dalam negeri. Data yang sedikit berbeda tampak pada jajak pendapat di Aceh. Responden di sana lebih tegas: hanya sedikit dari mereka yang menganggap TNI perlu berperan dalam keamanan dalam negeri.

Yang paling dikhawatirkan publik adalah soal bisnis tentara. Dalam soal yang satu ini, militer Indonesia memang merajalela. TNI memiliki berbagai bisnis, misalnya hotel, maskapai penerbangan, hak penebangan hutan, mal, dan yang lain. Itulah sebabnya, responden mendukung kalau bisnis TNI dirapikan, termasuk dengan menyerahkan pengelolaannya kepada Kementerian BUMN. Selain lebih transparan, di tangan BUMN bisnis militer diharapkan lebih profesional. Para jenderal yang sebelumnya menduduki posisi direktur dan komisaris bisa diganti profesional sipil jika dianggap tak berprestasi.

Selama ini bisnis TNI dianggap perlu dengan alasan untuk mengatasi anggaran negara yang cekak. Tapi, alih-alih kesejahteraan prajurit yang meningkat, faktanya malah para jenderal yang berkantong lebih tebal. Sebagian besar responden memang berpendapat bisnis tentara hanya untuk menyejahterakan petinggi TNI saja.

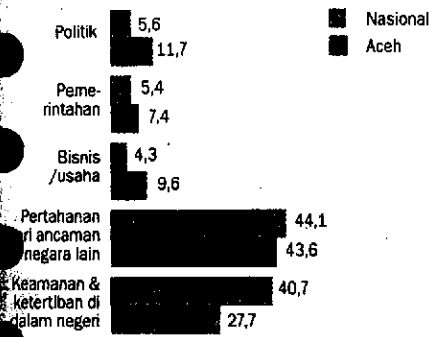
Anggaran untuk TNI memang harus ditingkatkan. Salah satu sumbernya adalah melalui bisnis tentara yang sudah dikelola BUMN. Sebagian responden berpendapat setelah itu militer tidak perlu ikut campur lagi: penyediaan anggaran sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan parlemen (48 persen). Sebaliknya, 37,4 persen responden berpendapat TNI masih boleh ikut campur dalam menentukan anggaran.

Enam puluh tahun memang usia yang tak pendek. Pembinaan TNI menjadi tentara yang profesional dan dibanggakan rakyat tak lagi bisa ditunggu. Tugas berat itulah yang kini disandang Jenderal Sutarto, atau siapa pun yang menggantikannya kelak.

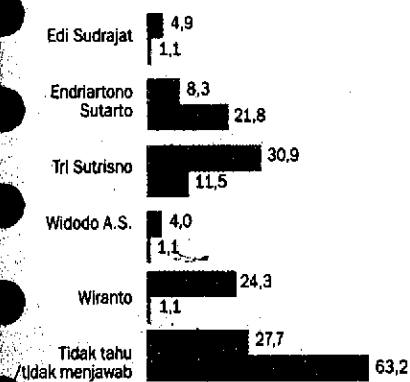
Arif Zulkifli



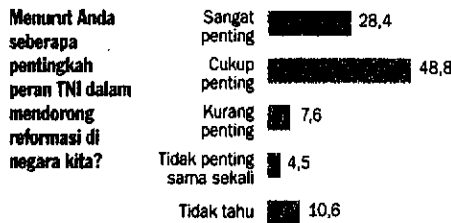
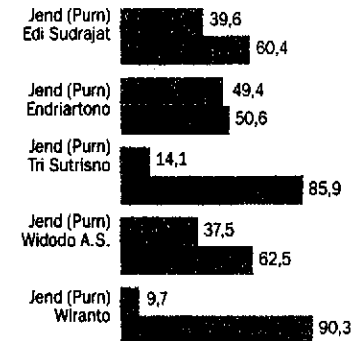
Menurut Anda apa prioritas pertama tugas TNI? (perbandingan responden nasional dan Aceh)



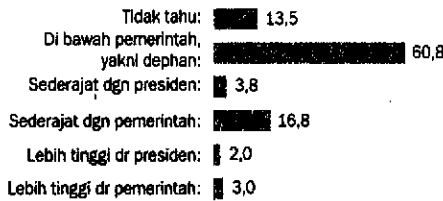
Di antara Panglima dan mantan Panglima TNI berikut ini, menurut Anda siapa yang paling berhasil?



Apakah Anda pernah mendengar nama-nama Panglima TNI atau mantan Panglima TNI berikut ini?



Menurut Anda dalam tata pemerintahan di Indonesia bagaimana TNI seharusnya ditempatkan?



Metode, Sampel, dan Jajak Pendapat

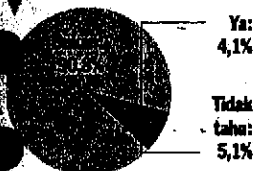
JAJAK pendapat ini dilakukan atas kerja sama antara majalah *Tempo*, Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan lembaga swadaya masyarakat Jerman, Friedrich Ebert Stiftung (FES). Survei dilakukan pada 22-25 September 2005 terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dan proporsional di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan jumlah dan teknik sampel tersebut, tingkat kesalahan (*margin of error*) jajak pendapat ini adalah plus-minus 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara tatap muka dilakukan oleh 120 pewawancara terlatih.

Sampel mula-mula ditetapkan sebanyak 1.200 orang. Proporsi sampel disesuaikan dengan proporsi penduduk di tiap-tiap provinsi. Dengan kata lain, provinsi yang sedikit penduduk akan mendapat sedikit sampel, dan provinsi yang banyak penduduk mendapat sampel yang lebih banyak.

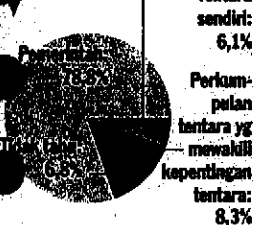
Di tiap provinsi, sampel dipilih berdasarkan proporsi desa dan kota (52 : 48) dan gender (50 : 50). Setelah itu, 120 desa/kelurahan dipilih secara acak. Di tiap desa/kelurahan, kemudian dipilih lagi lima RT secara random. Dan di tiap RT, kemudian secara random pula diambil dua kepala keluarga. Di tiap kepala keluarga, kemudian dipilih lagi secara acak satu orang laki-laki atau perempuan yang berumur 17 tahun atau lebih atau telah menikah. Orang inilah yang kemudian dijadikan responden. Setelah wawancara dilakukan, secara acak diambil 20 persen sampel untuk pengecekan ulang (*quality control*). Pada pengecekan ini tidak ditemukan kesalahan yang berarti.

Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dilakukan penambahan jumlah sampel (*oversample*) hingga tiga kali lipat (total 90 responden dari yang seharusnya 30 responden). Hal ini dilakukan agar tersedia sampel yang cukup untuk menganalisis Provinsi Aceh secara terpisah. Pada kasus Aceh, tingkat kesalahan penelitian adalah plus-minus 10 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

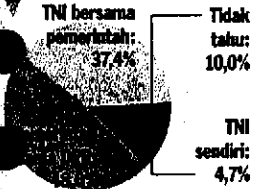
Sampel saat ini TNI masih bisnis. Apakah berbisnis merupakan tugas TNI?



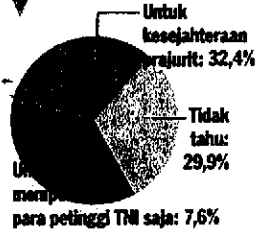
Siapakah yang harus memperjuangkan kesejahteraan anggota TNI?



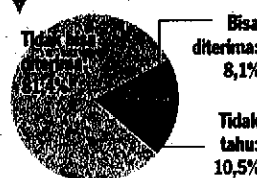
Siapakah yang harus bertanggung jawab untuk menyediakan anggaran untuk TNI?



TNI memiliki banyak usaha/bisnis. Menurut Anda untuk kepentingan siapa bisnis itu diadakan?



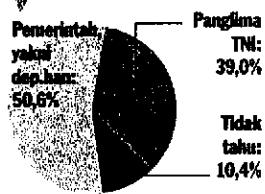
Anggota TNI disinyalir terlibat dalam sejumlah kegiatan melanggar hukum (pembalakan liar, penyelundupan, dll.). Jika hal itu dibakukan untuk mengatasi anggaran TNI yang terbatas, apakah hal itu bisa Anda terima?



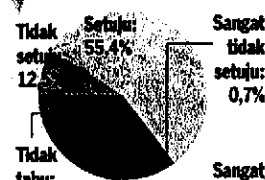
Panglima TNI saat ini berasal dari Angkatan Darat, sebelumnya dari Angkatan Laut. Menurut Anda apakah dengan demikian Panglima TNI berikutnya harus berasal dari Angkatan Udara?



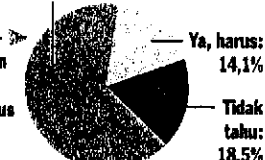
Lembaga mana yang harus mengatur dan mengendalikan TNI?



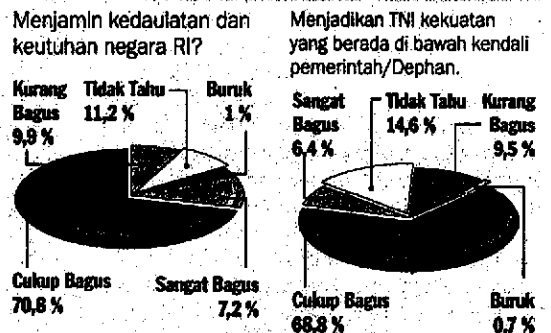
Ada upaya untuk menjadikan perusahaan TNI berada di bawah kendali Badan Usaha Milik Negara. Setujukah Anda?



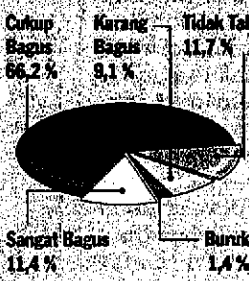
Tidak harus, tergantung pada pertimbangan Presiden dan dari persetujuan DPR: 67,4%



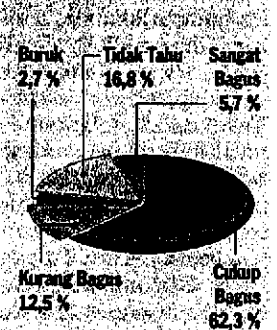
Menurut Anda, bagaimana kinerja Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto?



Menjadikan TNI institusi yang mendukung perjanjian Helsinki antara RI dan GAM



Mengatasi Gerakan Papua Merdeka?



Need this space to promote your ads?

CHINA PLUS HONGKONG PEMILIK CADANGAN DEVISA

Beranda

Profil

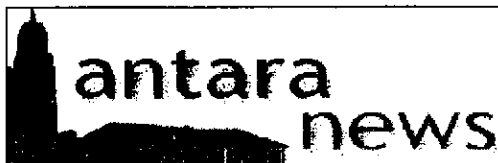
Kontak

Pendaftaran

Login

English Version

Cari Berita



October 7, 2005

[Kirim Berita](#) [Versi Cetak](#)



The Organization of
Asia-Pacific
News Agencies

Oct 06 20:17

LSI: POPULARITAS SBY-JK CAPAI ANGKA TERENDAH

Jakarta (ANTARA News) - Popularitas kinerja Presiden Susilo Bambang Wapres Jusuf Kalla (SBY-JK) meraih angka terendah dalam hampir satu tersebut memerintah, yaitu sekitar 63 persen atau turun sekitar 18 persen pada November 2004, demikian catatan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Direktur Eksekutif LSI, Saiful Mujadi, mengungkapkan hal itu di Jakarta mengumumkan hasil survei nasional tentang pendapat publik terhadap "Presiden-Wakil Presiden" yang merupakan hasil evaluasi publik periode 2 atas 1.137 responden di 33 provinsi.

"Secara umum terjadi penurunan yang cukup tajam atas kepuasan publik terhadap SBY-JK dalam rentang waktu sekitar satu tahun terakhir, yang mungkin karena kinerja tim ekonomi, karena angka itu keluar ketika pernyataan kenaikan menjadi wacana," kata Saiful.

Data LSI menyebutkan, sebulan setelah pemerintah bekerja (November 2004) 63 persen dari publik menyatakan bahwa keadaan ekonomi nasional saat itu dibanding satu tahun sebelumnya (2003).

Tetapi, survei LSI menunjukkan, setelah hampir satu tahun pemerintah bekerja (November 2005), penilaian negatif tersebut melonjak ke angka 47 persen. Sebaliknya, keadaan ekonomi nasional lebih baik dibanding satu tahun sebelumnya (2004) 76 persen menjadi 24 persen, dan selebihnya responden menyatakan tidak ada

"Tingkat optimisme publik juga menurun dalam kurun waktu yang sama. Yang sebelumnya 53 persen, kini menjadi 42 persen," kata Saiful.

LSI juga mencatat beberapa hal positif publik, di mana keadaan ekonomi nasional cukup baik untuk sementara dapat disangga oleh kinerja pemerintah di bidang ekonomi, yakni hukum-keamanan dan sosial.

Mayoritas publik menilai bahwa di dua bidang itu kinerja pemerintah cukup baik, di dua bidang ini sangat terkait erat dengan bidang ekonomi.

"Karena itu, dalam jangka yang tidak terlalu lama, kinerja di kedua bidang itu akan merosot, dan kemudian akan dinilai buruk oleh publik bila kondisi itu tidak membaik," katanya.

Rubrik

Umum

Ekonomi & Bisnis

Olahraga

Seni & Hiburan

Karangan Khas

Lingkungan

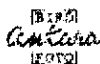
Info

Rilis Pers

Surat Pembaca

Galeri

Foto Berita



Atau dengan kata lain, Saiful menilai, kepuasan publik atas kinerja Presiden secara umum akan terus merosot, bila kinerja bidang ekonomi tidak memb- yang relatif cepat.

Jika itu terjadi, menurut dia, maka kepuasan publik atas kinerja Presiden pada umumnya akan terus merosot hingga menembus batas *electoral* (p yakni 61 persen, atau bahkan batas *psiko-politik* (50 persen).

Saiful juga menyebutkan bahwa jika penurunan kepuasan publik seperti i waktu yang tidak terlalu lama. dan tidak ada hasil atau upaya yang memulihkannya, maka penantian empat tahun akan menjadi terlalu panja

"Jika dalam waktu tiga bulan tidak ada perbaikan yang berarti, maka ba itu kemungkinan besar akan tembus, dan SBY-JK akan menjadi pemu disukai mayoritas warga," ujarnya.

Sebaliknya, Saiful menambahkan, bila ada perbaikan, maka kepuasan ; kinerja mereka akan kembali pulih, setidaknya tetap bertahan pada batas j

Sementara itu, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng meng sekalipun terjadi penurunan, tetapi popularitas Presiden Yudhoyono te level atas.

"Tidak banyak pemerintahan negara demokratis yang tetap mampu m popularitasnya setelah satu tahun diangka setinggi itu," ujarnya.

Ia mencotohkan, popularitas beberapa pemimpin negara yang lain, s George Bush dari Amerika Serikat (AS), Perdana Menteri (PM) Inggris Ton Australia John Howard.

Dia juga mengatakan bahwa keadaan itu akan segera pulih, sehing Presiden Yudhoyono akan kembali meningkat dalam waktu tiga bulan i LSI menggelar evaluasi publik kembali.

Lebih lanjut, Andi mengatakan bahwa pemerintah memang tidak boleh me polling, tetapi di sisi lain pemerintah juga tidak bisa memerintah berdasar

LKBN ANTARA Copyright © 2005 Syarat Penggunaan

Berita Lainnya

- ▶ Kasus Bagir Manen Bukhikan Gunung Es Korupsi di Indonesia
- ▶ Satu Jenazah Beirut Dikenal Diduga Asai Australia
- ▶ Polda Jatim Segera Sebar 10.000 Poster Pelaku Bom Bali II
- ▶ AS Tawarkan 10 Juta Dolar Bagi Penangkapan Otak Bom Bali 2002
- ▶ 15 TKI Dijadikan Pelacur di Singapura
- ▶ Muslim Ajaran Sathar'ah Mulai Laksanakan Puasa Karnis
- ▶ Dinilai Langgar UU Imigrasi Pria Mirip Di Azahan Benar Warga Singapura
- ▶ Angkutan Lebaran, PT KAI Bandung Waspada Lima Titik Rawan Bencana Alam
- ▶ Uang Suap Untuk Ketua MA Rp5 Miliar
- ▶ Gus Dur Tolak Pengaktifan Kotek

Copyright © 2005 LKBN ANTARA

Syarat Penggunaan



detikNews | detikFinance | detikFood | detikHot | detikNah | detikSport | Foto | Indeks
Info Iklan | SMSIklan | Sepakbola | Ticket Box | newsUpdate | detikShop | News@Pondok Indah
Lifestyle | Cupid | Jedoh | 123 X-Fun | Iguana | botch | mobile tren | fun dering | makan you :



Salurkan Aspirasi Anda

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap SBY-JK Capai Titik Terendah

Fitriya Ramadhanny | detikNews

Jakarta - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) mencapai titik terendah setelah satu tahun SBY-JK berkuasa.

Hal ini terungkap dalam hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai evaluasi kinerja SBY-JK. Survei yang dilakukan pada tanggal 22-26 September 2005 dengan responden 1137 orang di seluruh Indonesia ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terjadi dalam bidang ekonomi.

"Sumber utama penurunan ini dari bidang ekonomi. Pada awal pemerintahan, 21 persen masyarakat merasa keadaan lebih buruk dan 41 persen mengatakan lebih baik. Namun setelah satu tahun, 47 persen mengatakan lebih buruk dan hanya 24 persen yang mengatakan ekonomi jadi lebih baik," kata Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani di Hotel Sari Pan Pasific Jalan MH Thamrin, Jakarta. Kamis (6/10/2005).

Relion Laptop
M-PA24

Kredit
Rp 777.245,- x 12 Bln

Total



Berbagi Peduli di Bulan Suci



detikNews

01 SEPTEMBER 2005 18:40 WIB
Tingkat Kepuasan Publik
terhadap SBY dan Topik
TAK Terjawab

detikNews

01 SEPTEMBER 2005 18:40 WIB
Kritik PKPT Terhadap MA
Ratus Perbaikan di MA

detikNews

01 SEPTEMBER 2005 18:40 WIB
Terdapat Bom Bali I
Injeksi

detikNews

01 SEPTEMBER 2005 18:40 WIB
Dapat Bantuan
Kedatangan Downer
Untuk Lobi SBY Larang
JI

detikNews

01 SEPTEMBER 2005 18:40 WIB
Dapat Bantuan
Kedatangan Downer
Untuk Lobi SBY Larang
JI

Bahkan. Pada saat awal pemerintahan SBY-JK, tingkat kepuasan publik mencapai 80 persen pada bulan November 2004. Namun pada bulan September 2005 tingkat kepuasan publik menurun 18 persen menjadi 63 persen.

Saiful menambahkan, kenaikan harga BBM berkontribusi dalam berkurangnya tingkat kepuasan publik karena pada saat dilakukan survei, isu kenaikan BBM telah menjadi berita dan wacana publik walaupun harganya baru dinaikkan pada 1 Oktober 2005.

"Tingkat kepuasan publik ini terbantu oleh kinerja SBY-JK dibidang politik, hukum, keamanan, pendidikan, dan kesehatan, yang direspon dengan positif oleh masyarakat. Hal itu untuk sementara dapat menyangga kekecewaan masyarakat di bidang perekonomian," ujar Saiful.

Saiful merekomendasikan, dalam tiga bulan ke depan SBY harus melakukan perbaikan dalam kinerja ekonomi. Sebab, jika tidak maka angka kepuasan akan terus jatuh di bawah suara SBY dalam pemilu yaitu 61 persen.

"Bahkan, dapat menembus angka mayoritas 50 persen. Jika ini terjadi SBY akan menjadi pemimpin yang tidak disukai di masyarakat dan akan menimbulkan situasi rentan dalam semua hal," tambahnya.

Sebaliknya, Jubir kepresidenan Andi Mallarangeng, masih merasa optimis dengan hasil survei LSI. Menurutnya, 63 persen tingkat kepuasan publik adalah hasil yang baik mengingat banyaknya bencana alam dan terorisme yang menghambat kinerja SBY.

"Alhamdulillah masih dapat 63 persen masih di atas suara pemilunya sebesar 61 persen. Ini lebih baik daripada perolehan Bush, Blair, Schroeder dan John Howard," kilah Andi.

Andi mengakui, bidang ekonomi adalah masalah yang penting. Pemerintah pada saat tertentu harus mengambil keputusan yang tidak populer seperti menaikkan harga BBM.

"Ini adalah pilihan yang berat tapi ke depannya ini adalah bagian dari kepentingan jangka panjang masyarakat. Saya percaya tiga bulan ke depan persentasenya akan naik lagi," tandas Andi.

(ahm)

Baca juga:

- Presiden SBY: Negara Tak Akan Pernah Lupakan Jasa TNI di Aceh
- Ketua MPR: Presiden SBY Harus Tindak Menteri "Pebisnis"
- Indonesia & Singapura Sepakati Peningkatan Kerjasama
- Bom Bali II
SBY Kunjungi Restoran Raja's

SMS Iklan

jual tiger2004 modif sport touring aprilia dgn givi45 dijamin bagus hrg25jt - endri/depok (6281310727060)

SBY still popular despite a year of tough decisions

Hera Diani
The Jakarta Post/Jakarta

President Susilo Bambang Yudhoyono remains a popular president, with 63 percent of Indonesians satisfied with his performance in running the country, a new survey shows.

Similarly, 58 percent of the people were satisfied with Vice President Jusuf Kalla's performance, the survey released on Thursday by the Indonesian Research Institute (LSI) says.

The survey was completed in late September, before people were affected by the fuel price hikes and before the latest Bali bombs last weekend.

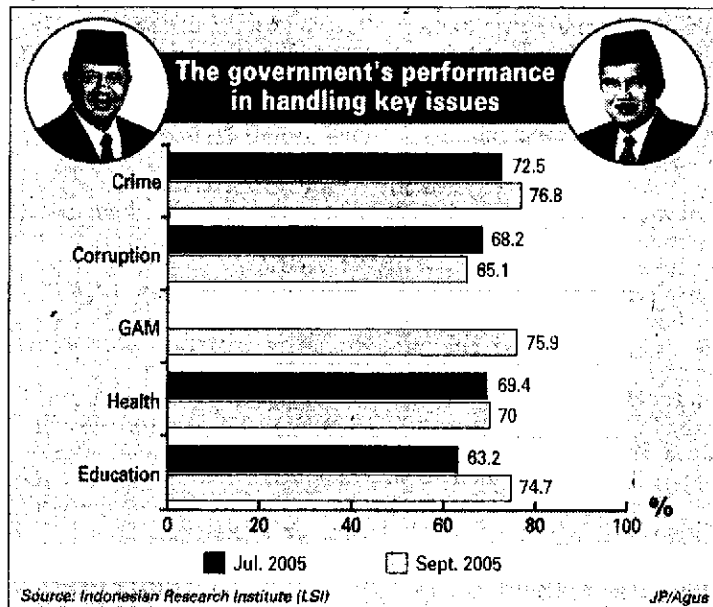
There was, however, a marked decline in Susilo's approval rating in the latest survey — from 80 percent for Susilo and 77 percent for Kalla in their post-election honeymoon period in the same survey last November.

Most people said they were still satisfied with the performance of the Susilo-Kalla administration in handling political and legal affairs, as well as security and social welfare issues.

Most of the 1,137 people from 33 provinces interviewed in the survey said the administration had done a good job in combating crime (76.8 percent), eradicating corruption (65.1 percent), settling problems with the Free Aceh Movement (GAM) (75.9 percent), health programs (70 percent) and education (74.7 percent).

The majority of people, however, were not happy with the government's performance in the economy, with only 24 percent of population saying that the national economic situation was better today than it was last year.

Almost half of the popula-



tion, or 47 percent, believed the economy had worsened in the past year. Negative sentiment was at the highest for the past two years. In October 2003, only 41 percent of those surveyed said they believed the economy had worsened.

Just over half of the population said the government had done a bad job in controlling rupiah's value, with 66.1 percent condemning the way it handled the fuel prices in reaction to the international fuel price hike.

The majority of the people also strongly criticized the government's efforts to guarantee fuel supplies and reduce unemployment and poverty rates.

With all the economic problems, only 42 percent of the respondents thought the economy would be better off in the year to come, with 24 percent saying the situation would not change and 15 percent thinking it would get worse.

Political analyst J.B. Kristiadi, from the Centre of Strategic and International

Studies (CSIS), said that considering the mountain of challenges faced by the Susilo-Kalla administration from the beginning, the people should be more realistic in judging its performance.

"A lot of tragedies occurred, such as the tsunami disaster and the recent Bali bombings. On the other hand, there are problems inherited from the previous administrations, including an ineffective political system and challenges from legislators," he told a discussion on the survey on Thursday.

Meanwhile, Institute for the Development of the Economy and Finance director (INDEF) Iman Sugema said the nation's economic indicators had worsened during the past year, with declining growth rates of exports, imports and investment, while the numbers of poor and unemployed people had increased.

"The team of economic ministers have been really weak at handling the economic problems," Iman said.

Indonesian leader's ratings plunge

Yudhoyono sunk by economic woes, despite being rated satisfactorily on other issues

BY DEVI ASMARANI
Indonesia Correspondent
IN JAKARTA

INDONESIANS think that President Susilo Bambang Yudhoyono is performing satisfactorily on just about everything — except the economy. And that exception has plunged his popularity to its lowest point since he took office 11 months ago.

The results of the latest poll, conducted late last month by a prominent think-tank, the Indonesian Survey Institute (LSI), showed that his approval rating had dropped to 63 per cent.

A similar poll done in November, a month after he assumed the presidency, showed a whopping approval rating of 80 per cent.

His deputy Jusuf Kalla suffered a similar fate, dropping from 77 per cent last November to 58 per cent in the latest one.

The latest poll, the fifth by the institute since last November, suggested that Indonesians think the President has not delivered on his promises to alleviate poverty, cut joblessness and control rising prices of basic needs.

Nearly half of the 1,000 respondents felt that the economy is worse than this time last year.

In fact, LSI executive director Saiful Mujani thinks that the President's rating would drop even further if the poll, held between Sept 22 and 26, was done after the announcement of fuel price hikes and the suicide bombings in Bali.

Both happened last Saturday.

Dr Yudhoyono was also rated poorly in controlling the rupiah, ensuring enough fuel supplies and attracting foreign investment.

But on the plus side, most respondents are satisfied with his handling of political, social and legal issues.

Sixty-five per cent of those surveyed think the government had done a good job fighting corruption, judging from the numerous cases involving high-profile suspects investigated and brought to court.

His success in forging peace with separatist rebels in Aceh is also hailed by more than three-quarters of the respondents.

Will the drop in ratings signal more dire consequences?

The short answer is that it is too early to tell, said political analyst with the Centre of Strategic International Studies, Mr Indra Pilliang.

But he added: "It shows how his non-populist policies are perceived as opening up a gap between him and the public who voted for him."

How can the President improve his standing?

Intensifying his meet-the-people sessions to sell his painful policies as necessary — from holding sessions at campuses to visiting the places where his fuel price hikes have hit the hardest, said Mr Indra.

At the same time, he must control inflation driven by fuel price hikes.

He must also ensure that his 4.5 trillion rupiah (\$\$760 million) cash grants for the poorest 16 million households to soften the impact of the hikes reach those who deserve it.

The government should also look into longer-term policies such as a switch to alternative energy, he said.

Mr Saiful of LSI said the next three months would be crucial for Dr Yudhoyono to prove to the public that he can manage the impact of the controversial fuel price hikes.

"If there is no significant improvement in the next three months, the public approval would likely break the psychological barrier of 50 per cent, and the sentiment of the majority of the people for the President and his VP could turn into a dislike," he said.

asmarani@sph.com.sg

**YUDHOYONO: RESOLVE IN UNCERTAINTY,
REVIEW PAGE 26**

NASIONAL

KINERJA SETAHUN SBY-JK VERSI LSI
Ekonomi Turun, Non-Ekonomi Positif

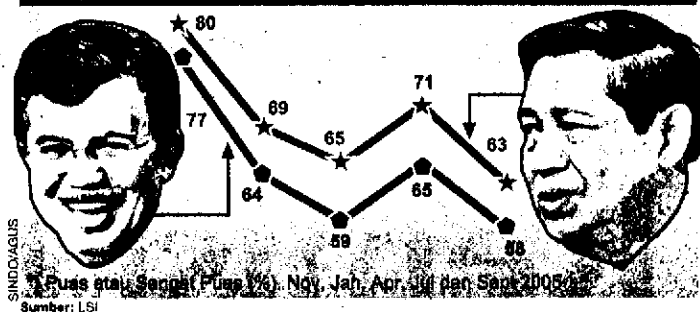
JAKARTA – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) selama setahun mengalami penurunan. Penurunan disebabkan kinerja bidang ekonomi. Sebaliknya, sektor nonekonomi dinilai masih positif.

Penilaian tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang pendapat publik terhadap "Kinerja Setahun Presiden-Wakil Presiden" yang dirilis di Jakarta, kemarin. Survei dilakukan pada 22-26 September 2005 atas 1.137 responden di 33 provinsi.

Disebutkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wapres mengalami penurunan yang cukup tajam. Sebanyak 63% responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden SBY. Sementara untuk Wapres sebesar 58%.

"Angka ini adalah tingkat kepuasan publik terendah dalam hampir satu tahun pasangan tersebut memerintah. Terjadi penu-

KEPUASAN PUBLIK ATAS KINERJA SBY-JK



runan sekitar 18% jika dibanding dengan survei November 2004," ujar Direktur Eksekutif LSI, Saiful Mujani, kemarin. (lihat grafis).

Menurutnya, sumber utama penurunan kepuasan publik atas kinerja Presiden dan Wapres karena bidang ekonomi. Sebulan setelah pemerintah bekerja (November 2004), sebanyak 21% publik menyatakan bahwa keadaan ekonomi nasional saat itu lebih buruk dibanding satu tahun sebelumnya.

Setelah hampir satu tahun pemerintahan SBY berjalan, penilaian tersebut bertambah menjadi 47%. Sebaliknya, yang meni-

lai keadaan ekonomi nasional lebih baik dibanding satu tahun sebelumnya menurun dari 41% menjadi 24%. Selebihnya menyatakan tidak ada perubahan.

Namun, penurunan sentimen positif publik yang cukup tajam terhadap keadaan ekonomi nasional untuk sementara dapat disanggah oleh kinerja pemerintah di bidang nonekonomi, yakni di bidang hukum-keamanan dan sosial. "Mayoritas publik menilai bahwa di dua bidang itu kinerja pemerintah cukup baik." Kinerja di dua bidang ini dinilai sangat terkait erat dengan bidang ekonomi. (havid vebri)

Rakyat Merdeka: Jumat, 7 Oktober 2005

GARA-GARA ABURIZAL Cs

Popularitas SBY Dikorting 17%

Jakarta, RM. Baru setahun memimpin negara ini, popularitas SBY merosot tajam. Banyak faktor yang membuat popularitas presiden pilihan rakyat itu kena korting 17 persen.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani mengungkapkan, selama satu tahun terakhir, kepuasan masyarakat terhadap kinerja SBY turun 17 persen dari 80 persen menjadi hanya 63 persen. Sumber utama penurunan tingkat kepuasan publik adalah

◆BERSAMBUNG KE HAL 7 //

Popularitas

..... dari halaman 1

karena keadaan ekonomi. Jika sebelumnya ada 28 persen masyarakat yang beranggapan kondisi perekonomian lebih buruk dari sebelumnya, sekarang jumlah meningkat menjadi 47 persen.

Mayoritas masyarakat atau 66 persen menilai kinerja pemerintah buruk dalam mengatasi masalah harga BBM. Dalam mengendalikan nilai tukar rupiah, pemerintah pun dianggap buruk oleh 50 persen masyarakat.

Penurunan itu dapat dilihat dalam sejumlah hal. Misalnya, dalam menjaga harga barang, tingkat kepuasan masya-

rakat turun dari 43,4 persen menjadi 25,5 persen. Dalam menjamin ketersediaan BBM, tingkat kepuasan masyarakat turun dari 30,4 persen menjadi 19,6 persen. "Kalau survei ini dilakukan setelah kenaikan harga BBM, mungkin popularitas SBY akan lebih merosot," terang Mujani.

Sedangkan, pengamat politik CSIS J Kristiadi berpendapat kemerosotan perekonomian yang terjadi setahun terakhir tak lepas dari buruknya kinerja tim ekonomi yang dipimpin Aburizal Bakrie. ■ IMI

Survei: Kinerja ekonomi buruk

Oleh BAMBANG DWI DJANUARTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Publik menilai kinerja setahun pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla dalam bidang ekonomi sangat buruk namun masih dinilai positif dalam bidang politik, hukum keamanan dan sosial.

Pasangan Yudhoyono-Kalla dinilai belum mampu mengurangi angka pengangguran, jumlah orang miskin, pengendalian harga-harga barang, menjaga stabilitas rupiah, menjamin ketersediaan BBM, mengatasi dampak kenaikan harga BBM dunia dan meningkatkan investasi.

Hal tersebut terungkap dari

hasil survei Evaluasi Publik Kinerja Setahun Presiden dan Wakil Presiden yang dibuat oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) terhadap 1.137 orang di 33 Provinsi pada 22-26 September 2005.

Direktur Eksekutif LSI Syaiful Mudjani mengatakan dalam dua bulan terakhir, penilaian negatif publik atas kinerja ekonomi pemerintah untuk mengatasi sebagian dari masalah ekonomi terus meningkat.

Pada Juli, hanya sekitar 32% masyarakat yang menilai pemerintah berkinerja baik dalam mengurangi pengangguran, sebulan kemudian angka kepercayaan merosot menjadi sekitar 24%. Penilaian positif

terhadap kinerja pemerintah dalam mengurangi kemiskinan juga merosot dari 40% menjadi 37% pada periode yang sama.

Penurunan penilaian positif publik atas kinerja pemerintah secara lebih tajam terjadi dalam jaminan bagi ketersediaan BBM di pasar domestik dari 30% menjadi 20% dan dalam mengendalikan harga dari 43% menjadi 25%.

Sebulan setelah pemerintah bekerja [November 2005] sebanyak 21% publik menyatakan keadaan ekonomi lebih buruk dari tahun sebelumnya, setelah hampir setahun pemerintah berjalan [September 2005], penilaian negatif tersebut melonjak ke angka 47%.

E K O N O M I M A K R O

Tingkat Kepuasan Merosot

JAKARTA — Tingkat masyarakat yang puas terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya, Jusuf Kalla, merosot menjelang genap setahun pemerintahan mereka. Pada bulan pertama keduanya berkuasa, tingkat masyarakat yang puas mencapai 80 persen, sedangkan pada bulan lalu jumlahnya berkurang, tinggal 63 persen. Merosotnya tingkat kepuasan itu terungkap lewat hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang diumumkan di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Syaiful Mujani, sumber utama kemerosotan itu berasal dari kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Bahkan ketidakpuasan telah dinyatakan oleh responden di 33 provinsi sejak sebulan setelah pemerintahan berjalan. Pada September 2005, penilaian negatif itu semakin melonjak. "Sebanyak 47 persen masyarakat menyatakan, keadaan ekonomi lebih buruk daripada setahun sebelumnya," kata Mujani.

Peneliti dari Pusat Studi Internasional dan Strategis (CSIS), J. Kristiadi, menyoroti para menteri ekonomi yang lebih banyak mementingkan kepentingan pribadi. Kristiadi menunjuk aktivitas partai dan berdagang. Tapi, dia menegaskan, tanggung jawab berada di tangan Presiden. "Seharusnya jika Presiden merasa tim ekonominya lemah, Presiden perlu bersikap tegas menyelesaikan masalah ini," katanya.

Pengamat ekonomi Faisal Basri dalam diskusi yang diselenggarakan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi di Menteng, Jakarta Pusat, juga menyatakan hal yang sama. "(Menteri Koordinator Perekonomian) Aburizal Bakrie dan Jusuf Kalla seperti saudagar dalam pemerintahan, sedangkan SBY lebih banyak pasif," kata Faisal.

Namun, juru bicara Presiden, Andi Mallarangeng, mengatakan dapat memaklumi kemerosotan tingkat kepuasan itu. Menurut Andi, menurunnya kinerja kabinet di bidang ekonomi lebih disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu naiknya harga minyak dunia. "Alhamdulillah, ternyata masih banyak yang percaya, walaupun banyak bencana yang terjadi pada tahun ini," ujarnya lagi. ● SUNARIAH | RENGGA DAMAYANTI

Kepuasan Rakyat Turun Tajam

Hasil Survei LSI terhadap Setahun Kinerja SBY-Kalla

JAKARTA—Ini peringatan bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasar survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), saat ini terjadi penurunan kepuasan publik yang cukup tajam terhadap kinerja presiden dan-Wapres dalam rentang setahun terakhir.

Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani mengungkapkan, penurunan tersebut sekitar 17 persen dari 80 persen pada survei November 2004 menjadi 63 persen pada survei September 2005. "Namun, penurunan tersebut terbilang masih lebih tinggi dibandingkan jumlah pemilih dalam Pemilu September 2004 sekitar 61 persen," jelasnya dalam dialog publik *Kinerja Setahun Presiden-Wakil Presiden* di Hotel Sari Pan Pacific, Jl Thamrin, kemarin.

Dalam dialog tersebut, hadir Juru Bicara Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng, Imam Sukema dari Indef, dan J. Kristiadi. Tampak juga pengamat militer Salim Said.

Mujani menegaskan, penurunan tersebut merupakan tingkat kepuasan publik terendah dalam hampir setahun SBY-Kalla memerintah. Menurut dia, sumber utama penurunan kepuasan publik adalah bidang ekonomi. Sebulan setelah pemerintah bekerja, November 2004, 21 persen publik menyatakan bahwa keadaan ekonomi nasional saat itu lebih buruk dibandingkan setahun sebelumnya.

"Untungnya, *polling* ini tidak kami lakukan usai kebijakan kenaikan harga BBM baru-baru ini dan bom Bali II. Sebab, dimungkinkan hasil survei ini akan menunjukkan penurunan popularitas SBY dan bisa saja jauh dari hasil yang sekarang," ungkapnya.

Yang menolong perolehan SBY-JK adalah faktor kinerja di bidang nonekonomi, yakni hukum, keamanan, dan sosial. Mayoritas publik menilai, di bidang itu, kinerja pemerintah cukup baik. Namun, kinerja di bidang tersebut sangat terkait dengan bidang ekonomi. Karena itu, dalam jangka tidak terlalu lama, kinerja di kedua bidang nonekonomi tersebut juga bisa merosot. Kemudian, bila kondisi ekonomi terus memburuk, publik pun akan menilai buruk.

Sementara itu, Kristiadi menyatakan, dalam setahun ini, dirinya belum melihat kinerja yang mengembirakan. Padahal, seperti dalam kondisi ekonomi sekarang, pemimpin harus lebih tegas dalam melakukan perbaikan. Begitu juga dengan Imam Sukema.

Kedua pakar tersebut menilai bahwa kondisi ekonomilah yang akan menjatuhkan popularitas SBY. "SBY harus lebih tegas terhadap kinerja tim ekonominya. Bila tim ekonominya tidak mampu memberikan formula terbaik guna mengatasi gejolak ekonomi, SBY bisa menggantinya," ujar Kristiadi.

Bila tak ada perbaikan dalam waktu dekat, tentu masyarakat akan menilai lain. Malahan, diperkirakan masyarakat tidak lagi percaya terhadap pemerintah bila tidak ada perbaikan nasib bagi masyarakat.

Andi berpendapat lain. Lelaki berkumis tebal tersebut enteng menjawab bahwa dirinya masih senang atas hasil survei tersebut. Dalam setahun ini, SBY memiliki pendukung yang masih di atas jumlah pemilihnya. (die/wws)

INDO-POS ♦ Jawa Pos News Network (JPNN)



Jumat 7 Oktober 2005

POLITIKA

Kualitas Tata Negara Menurun

Komersialisasi Jabatan Meningkatkan

JAKARTA, KOMPAS — Selama setahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terdapat masalah fundamental kepolitikan, yakni menurunnya kualitas karya ketatanegaraan (*statecraft*).

Penurunan kualitas karya ketatanegaraan itu tampak jelas antara lain pada ketidakjelasan bahkan ketegangan dalam keanggotaan susunan kelembagaan politik, seperti antara peran jabatan presiden dan wakil presiden.

Evaluasi tersebut disampaikan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) pimpinan Todung Mulya Lubis dalam Diskusi "Satu Tahun Pemerintahan SBY-JK" di Jakarta, Kamis (6/10).

Todung mengemukakan, dalam lima tahun ini rakyat akan tersandera oleh kompetisi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Dualisme kepemimpinan ini yang membuat ongkos (politik) menjadi mahal," ujarnya.

Menurunnya kualitas karya ketatanegaraan ini juga ditunjukkan makin kuatnya percampuran dan tumpang tindih di antara berbagai profesi politik, terutama antara jabatan kepartaian dan jabatan eksekutif. Hal lain, makin derasnya politik uang dan komersialisasi jabatan-jabatan politik di lembaga-lembaga tinggi negara.

Dalam setahun pemerintahan Yudhoyono-Kalla ini, kata dia, juga terjadi penurunan kualitas politik kebangsaan yang demokratis, yakni hilangnya kemampuan menopang dan mengelola keberagaman sosial, budaya, ideologi, dan politik dalam suatu modus yang demokratis dan setara.

Menurun

Menjelang satu tahun pemerintahan Yudhoyono-Kalla, kepuasan publik semakin menurun hingga 17 persen. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, pada November 2004 tingkat kepuasan publik terhadap Yudhoyono sebesar 80 persen dan pada September 2005 menjadi 63 persen.

Masyarakat menilai, kinerja pemerintahan yang paling buruk adalah bidang ekonomi. Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani kemarin dalam pemaparan hasil survei mengatakan, data survei terakhir diperoleh ketika pemerintah belum secara resmi mengumumkan besaran kenaikan harga BBM. (SIE/BUR)

Survei LSI tentang Setahun SBY-JK

"Bisa Makin Nyungsep!"

MH Thamrin, Warta Kota LEMBAGA Survei Indonesia (LSI), yang selama ini terkesan berpihak kepada pemerintah, melalui survei terbarunya menemukan bahwa kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla (SBY-Kalla) di bidang ekonomi, lebih buruk daripada kinerja pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Temuan hasil survei tentang satu tahun usia pemerintahan SBY-Kalla itu Kamis (6/10) kemarin dipaparkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Saiful Mujani, di hadapan pers di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Menurut Saiful, dari survei yang melibatkan 1.137 responden di 33 provinsi dan dilakukan pada 22-26 September 2005 itu, 47 persen responden menyatakan bahwa ekonomi Indonesia lebih buruk dibandingkan Oktober 2004 (41 persen).

Survei dilakukan sebelum pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Bila survei itu dilakukan sesudahnya, diperkirakan sentimen negatif publik atas keadaan ekonomi nasional akan menembus angka psikologis, 50 persen.

"Bagaimana persepsi masyarakat awal tahun depan? Itu semua tergantung kebijakan ekonomi yang ada, khususnya terkait kompensasi BBM. Jika kompensasi itu tidak berjalan, maka SBY-JK akan makin nyungsep," tegas Saiful.

Oleh sebab itu pula, ketika responden ditanyai tentang keadaan ekonomi Indonesia tahun depan dibandingkan saat ini, masih ada 42 persen responden yang menyatakan optimis akan membaik.

Bidang lainnya

Namun terkait bidang sosial, hukum, ke-



SB Yudhoyono



Jusuf Kalla

amanan, dan politik, hasil survei LSI, cukup menggembirakan bagi SBY-JK. Untuk bidang sosial, 70 persen responden menganggap SBY-JK berhasil menangani masalah kesehatan. Meskipun isu busung lapar dan flu burung menghantui masyarakat.

Bahkan, lanjut Saiful, 74,7 persen responden menilai SBY-JK berhasil menangani masalah pendidikan. Padahal, program biaya operasional sekolah (BOS) saat ini krusial, karena banyak dana yang tidak cair.

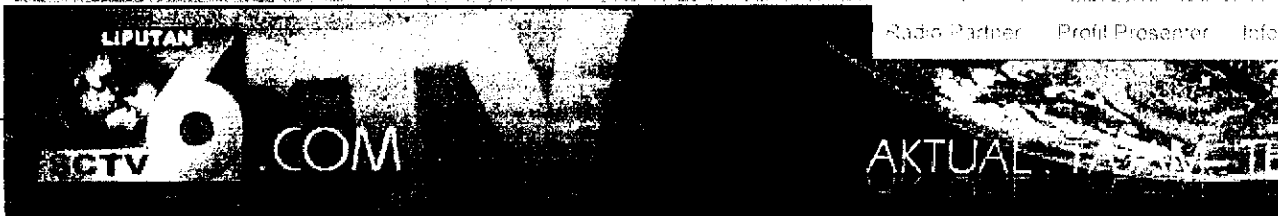
Yang lebih aneh lagi, di bidang hukum, 65 persen responden menganggap SBY-JK mampu menangani kasus korupsi, dan 75 persen menilai mampu memberantas praktik perjudian.

Hasil survei tersebut, khususnya di bidang politik, hukum dan keamanan, tampak membuat tercengang pengamat politik dari CSIS, J Kristiadi, yang hadir sebagai penanggap. Dia justru menyatakan curiga terhadap masyarakat.

"Saya melihat rakyat kita sudah sakit. Keadaan tidak aman, dibidang aman. Korupsi yang sudah gila-gilaan, masih dianggap biasa saja," tegasnya.

Menurut Kristiadi, kegagalan di bidang ekonomi tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada tim ekonomi. Tapi, SBY-JK selaku pemimpin pemerintahanlah, yang harus bertanggung jawab. "Untuk masalah ekonomi, bukan SBY yang keliru. Tapi tim ekonomi yang geblek! Namun, tidak ada anak buah yang bisa dipersalahkan, pemimpinlah yang bertanggung jawab. Untuk hal ini saya tak berani ngomong, yang pasti pemimpin itu harus tegas!" ucap Kristiadi.

Jurubicara Kepresidenan, Andi A Malarrangeng, yang hadir pada acara itu mengatakan, pada era demokrasi ini wajar jika ada orang berbeda pendapat. Namun, kata Andi, jika dilihat secara keseluruhan hasil survei LSI, 61 persen responden mengaku puas atas pemerintahan SBY-JK. (ver)



10.10.2005 - 13:49:02 WIB

Keyword : Masukkan kata kunci

Advance Search



Jentara

Sigi
Minggu, 09/10/2005



"Agar Para "Tinatid" Berpikir Seribu Kali"

Sibir Plus
Minggu, 09/10/2005



"Kemesraan Dewi Persik-Saiful Jamil di Bulan Ramadan"

Liputan6TV Politik

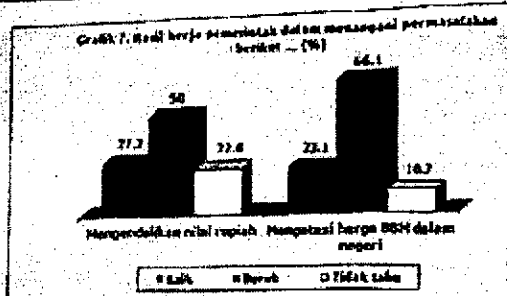
BREAKING NEWS

- LIPUTAN6 PAGI
- LIPUTAN6 SIANG
- LIPUTAN6 PETANG
- LIPUTAN6 MALAM
- DERAP HUKUM
- DIALOG KHUSUS
- POTRET
- BUSER
- SIGI

Kinerja Pemerintah

> **Kepuasan Rakyat atas Pemerintah Menurun**

Kinerja di bidang Ekonomi



07/10/2005 07:58

Lembaga Survei Indonesia mengatakan, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan SBY-Kalla menurun hingga 63 persen. Untuk meraih simpati rakyat, kinerja tim ekonomi harus diperbaiki.

Hasil survei opini publik yang dilakukan LSI.



Liputan6.com, Jakarta: Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla menurun. Penurunan kinerja duet ini disebabkan kebijakan yang tidak populer untuk menaikkan harga bahan bakar minyak pada 1 Oktober silam [traca Pemerintah Menaikkan Harga BBM].

Survei opini publik dilakukan LSI di 33 provinsi dengan 1.137 responden acak pada akhir September silam. Survei pada November tahun silam menunjukkan, para 60 persen responden menyatakan puas terhadap terpilihnya pasangan militer-pengusaha ini sebagai presiden dan wakil presiden. Namun data Septemb menunjukkan kinerja SBY-Kalla menurun hingga 63 persen.

Kepuasan publik merosot terutama karena kebijakan ekonomi seperti, menaikkan harga BBM serta nilai

rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Akibatnya pengangguran meningkat dan masa perekonomian pun menjadi tidak pasti.

Dari hasil survei ini LSI menyimpulkan pemerintahan SBY-Kalla harus memperbaiki kinerja tim ekonomi agar dapat mempertahankan popularitas di mata rakyat. Kondisi ekonomi yang terus memburuk dapat berpengaruh lebih jauh. Publik menjadi tidak percaya dengan pemerintahannya. (IAN/Aryo Adi Prabow Joni Marcos)

Kirim ke rekan Anda Kirim komentar Anda Lihat komentar (0)

Berita Sejenis

- 🕒 26/09/2005 19:04 **Putri Anne Peduli Rekonstruksi Aceh**
- 🕒 17/09/2005 09:12 **Yusri: Telekonferensi Tak Melan...**
- 🕒 16/09/2005 15:02 **Menhub Melantik Pejabat Baru**
- 🕒 16/09/2005 12:17 **Pekan Depan, APBN Perubahan Diaj...**
- 🕒 16/09/2005 13:12 **Yusri: Telekonferensi Presiden ...**
- 🕒 15/09/2005 12:16 **Presiden Menjawab Isu Ketidakhad...**
- 🕒 12/09/2005 07:22 **Dua Lelaki Mengganggu Acara Wapr...**
- 🕒 10/09/2005 06:28 **Partai Demokrat Mendukung Peromb...**
- 🕒 01/09/2005 15:11 **Rupiah Melemah, Kalla Mempersing...**
- 🕒 01/09/2005 11:58 **DPR Meminta Pemerintah Mempers...**
- 🕒 16/08/2005 15:58 **Bekas Aktivis GAM Diminta Menaat...**
- 🕒 04/08/2005 11:58 **SBY: Asia Pasifik Behas Kemiskin...**
- 🕒 28/07/2005 11:58 **Gaji Pejabat Negara Akan Dinaikkan**
- 🕒 22/07/2005 14:56 **Jaksa Agung Diminta Melawan Keja...**
- 🕒 07/07/2005 10:31 **Mantan Anggota GAM Diperbolehkan...**

Berita Terhangat

- 🕒 10/10/2005 11:04 **Bocah Berusia Lima Tahun I**
- 🕒 10/10/2005 10:58 **Muda-mudi Dipergoki Sedar**
- 🕒 10/10/2005 12:50 **Kurir Ganja Ditangkap di Pe**
- 🕒 07/10/2005 12:53 **Pedagang Kelontong Diramj**
- 🕒 10/10/2005 12:18 **Tersangka Pelaku Mutilasi E**

Surya Citra Televisi | Surya Citra Media | SCTV Community
Breaking News | Buser | Sigi | Derap Hukum | Potret

Copyright © 2000-2005 Surya Citra Televisi. All Rights Reserved.
Surya Citra Televisi is a Subsidiary Company of Surya Citra Media Tbk.

Presiden Menilai, Presiden Dinilai

Publik menilai rapor tim ekonomi merah. Kinerja non-ekonomi dan sosial masih dipandang baik. Kualitas ketatanegaraan merosot akibat tumpang-tindih jabatan partai dan jabatan eksekutif.

ADA dua kesibukan yang paralel pada waktu belakangan ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sibuk mencermati prestasi para pembantunya di kabinet. Masyarakat sibuk menghitung ponten yang pantas bagi "rapor" setahun pemerintahan Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Obrolan tentang ini bersipongang dari warung kopi yang sumpek sampai kafe teduh di pusat belanja; dari pojok angkutan kota sampai lobi-lobi perkantoran. Sejumlah biro riset dan lembaga swadaya masyarakat tak ingin ketinggalan dari momentum ini. "Terjadi penurunan kepuasan publik yang cukup tajam sampai 17-19 persen selama setahun pemerintahan SBY-JK," ujar Saiful Mujani, Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Menurut pantauan LSI, pada November 2004 duet ini mendapat modal kepercayaan 80 persen untuk mengelola pemerintahan. September 2005, sebelum pengumuman kenaikan BBM pada 1 Oktober, tingkat kepuasan publik merosot hingga 63 persen.

Jika tingkat penurunan kepuasan itu dibedakan lagi secara lebih spesifik antara Presiden dan Wakil Presiden, penurunan terbesar dialami Jusuf Kalla sebesar 19 persen dibanding Yudhoyono yang 17 persen. Pada awal pemerintahan, Yudhoyono dan Kalla mengantongi "modal kepuasan" masyarakat sebesar 80 persen dan 77 persen, namun kini hanya tinggal 63 persen dan 58 persen (lihat tabel 1).

LSI merekam pendapat masyarakat melalui 1.137 responden di 33 provinsi dengan metode *multistage random sampling*. Berdasarkan lokasi tempat tinggal, 39,3 persen responden tinggal di kota dan 60,7 persen tinggal di desa. Survei dilakukan pada 22-26 Septem-

ber. "Jika survei opini publik ini dilakukan setelah kenaikan BBM dan bom Bali II, kemungkinan tingkat kepuasan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bisa lebih rendah lagi," tambah Saiful.

Penyebab utama penurunan kepuasan publik adalah soal perut. Baru sebulan pemerintah bekerja—pada November 2004—21 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi lebih buruk dibanding setahun sebelumnya. Akhir September 2005, penilaian negatif meroket lebih

dari dua kali lipat menjadi 47 persen. Ini kenaikan sentimen negatif publik tertinggi terhadap kondisi ekonomi nasional sepanjang Yudhoyono-Kalla memerintah. Bahkan, lebih tinggi dibanding saat-saat akhir pemerintahan Megawati pada Oktober 2003. Waktu itu penilaian negatif publik terpatri pada angka 41 persen.

Publik yang merasa keadaan ekonomi sekarang lebih baik dibanding awal pemerintahan Yudhoyono-Kalla pun menurun dari 41 persen menjadi 24 persen. Selebihnya menyatakan tidak ada perubahan (lihat tabel 2).

Bagaimana prospek setahun ke depan? Tingkat optimisme publik juga meredup. Anggota masyarakat yang yakin ekonomi nasional bisa lebih baik an-

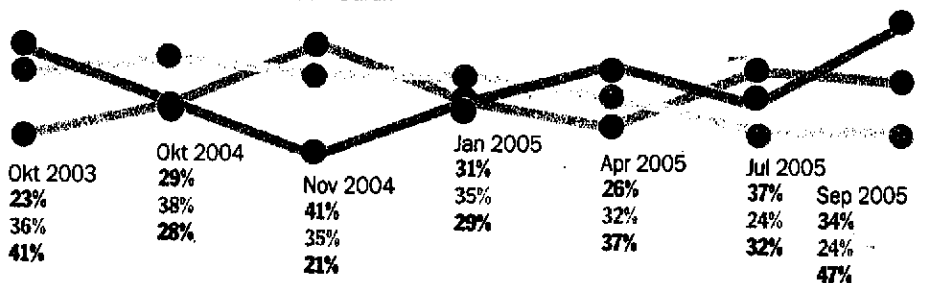
Presiden juga harus memutuskan sendiri apa yang hendak dia lakukan terhadap kabinetnya.

jalok dari 67 persen menjadi 42 persen. Artinya, lebih dari separuh masyarakat kini dihantui "wabah epidemik" baru selain demam berdarah dan flu burung: pesimisme massal (lihat tabel 3).

Terhadap parameter lain seperti

KEADAAN EKONOMI NASIONAL SEKARANG DIBANDING TAHUN LALU

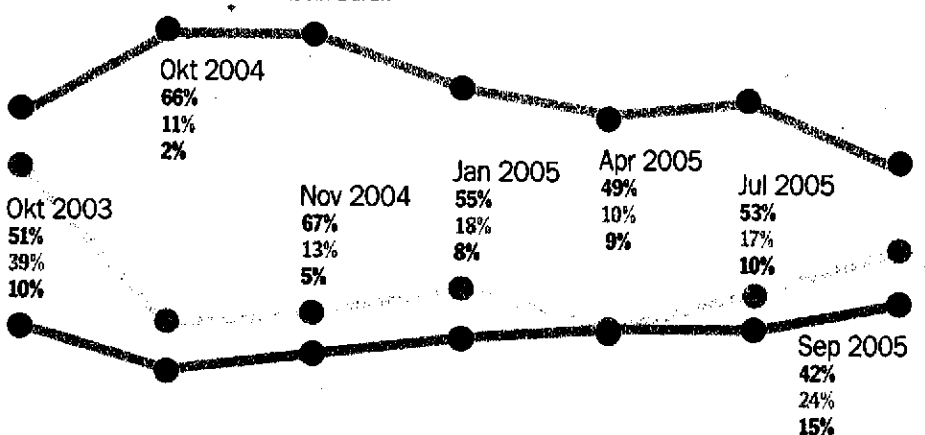
● Lebih Baik ● Sama ● Lebih Buruk



Tabel 2

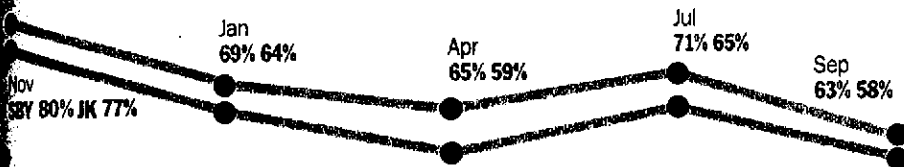
KEADAAN EKONOMI NASIONAL SETAHUN KE DEPAN DIBANDING SEKARANG

● Lebih Baik ● Sama ● Lebih Buruk



Tabel 3

KEPUASAN PUBLIK ATAS KINERJA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: PUAS ATAU SANGAT PUAS (2005)



Tabel 1

jumlah pengangguran dan orang miskin, pengendalian harga barang dan suplai BBM, terjadi pula penurunan kepercayaan yang cukup signifikan. Padahal respons untuk parameter ini diukur hanya dalam tiga bulan terakhir. Hanya pada kemampuan pemerintah mendatangkan investor luar negeri yang relatif tidak berubah di kisaran 47 persen. Hasil survei LSI ini menunjukkan kinerja bidang ekonomi kabinet Yudhoyono-Kalla pantas mendapat angka "merah" jika diukur dari pencapaian selama setahun terakhir (lihat tabel 4).

Untuk rapor non-ekonomi, Yudhoyono bisa menarik napas lega: 75,8 persen publik menilai pemerintah bekerja dengan baik dalam memberantas perjudian, korupsi (65,1 persen), mengatasi kriminalitas (76,8 persen) sampai menangani masalah GAM (75,9 persen). Untuk lengkapnya lihat tabel 5.

Begitu pula dengan kinerja di bidang sosial seperti penanganan masalah kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan (lihat tabel 6).

Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) yang dipimpin Todung Mulya Lubis melihat dalam satu tahun pemerintahan Yudhoyono-Kalla, masalah-masalah fundamental kembali hadir. Yang terparah adalah penurunan kualitas ketatanegaraan (*statecraft*) yang tercermin lewat tumpang-tindih jabatan kepartaian dan jabatan eksekutif seperti dilakukan Jusuf Kalla.

Merosotnya *statecraft* juga terlihat dengan makin derasnya politik uang dan komersialisasi jabatan politik di lembaga-lembaga tinggi negara. Yang paling membingungkan adalah ketidakjelasan bahkan ketegangan dalam keanggotaan susunan kelembagaan politik. Misalnya antara peran jabatan Presiden dan Wakil Presiden. "Akibatnya, muncul kerikohan permanen antara Presiden dan Wakil Presiden yang menyebabkan visi pemerintahan sulit diimplementasikan secara efektif," ujar Todung.

Menurut P2D, penurunan kualitas kebangsaan bisa terbaca dari mengentalnya politik primordial di elite pemerintahan dan partai, intoleransi terhadap perbedaan, atau meningkatnya kekerasan yang mengatasnamakan agama. "Corak utama dari kelemahan dan ma-



salah dalam satu tahun pemerintahan ini pada akhirnya terpulung pada kekuatan karakter kepemimpinan SBY sendiri," dia menambahkan.

Yudhoyono mulai memerintah dengan modal kepercayaan yang cukup besar—61 persen—dari masyarakat. Karena itu Perhimpunan Pendidikan Demokrasi merekomendasikan agar Presiden Yudhoyono harus berani bersikap tegas dalam memberikan garis politik kepada semua pembantunya. Yakni kembali pada visi dan misi pemerintahan yang dijanjikan kepada rakyat saat kampanye dulu. Presiden juga harus memutuskan sendiri apa yang hendak dia lakukan terhadap kabinetnya. Jika tidak, empat tahun ke depan akan terlalu lama bagi masyarakat.

Hasil kerja pemerintah dalam menangani permasalahan berikut:

Tabel 4: Menjamin Tersedianya BBM



Menjaga Harga Barang Terkendali



Mengurangi Jumlah Pengangguran



Mengurangi Jumlah Orang Miskin



Mengundang Investor



Tabel 5: Mengatasi Kriminalitas



Memberantas Perjudian



Memberantas Korupsi



Melindungi Kelompok Minoritas



■ ■ ■ Jul 2005 ■ ■ ■ Sep 2005

Tabel 6: Kesehatan



Pendidikan



Pemberdayaan Perempuan



Melindungi TKI



Mengatasi Illegal Logging



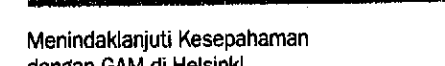
Mengatasi Pertambangan Liar



Mengatasi Konflik Papua



Menangani Masalah GAM



Menindaklanjuti Kesepahaman dengan GAM di Helsinki



Merukunkan Bekas Anggota GAM dengan Warga Indonesia Lainnya

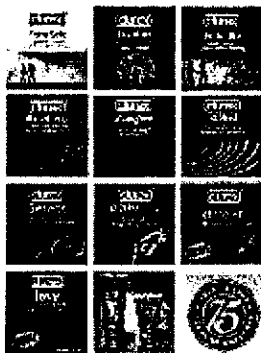


Koleksi Dokumen Hukum TERLENGKAP di Indonesia

detikNews | detikFinance | detikFood | detikHot | detiki-Net | detikSport | Foto | Indeks

Info Iklan | SMSiklan | Sepakbola | Ticket Box | newsUpdate | detikShop | News@Pondok Indah

:: Lifestyle | Cupid | Jodoh | 123 X-Fun | Iguana | boleh | mobile tren | fun dering | makan yoo ::



Setahun Tsunami BRR Akui Belum Maksimal

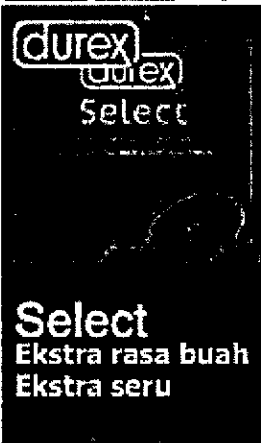
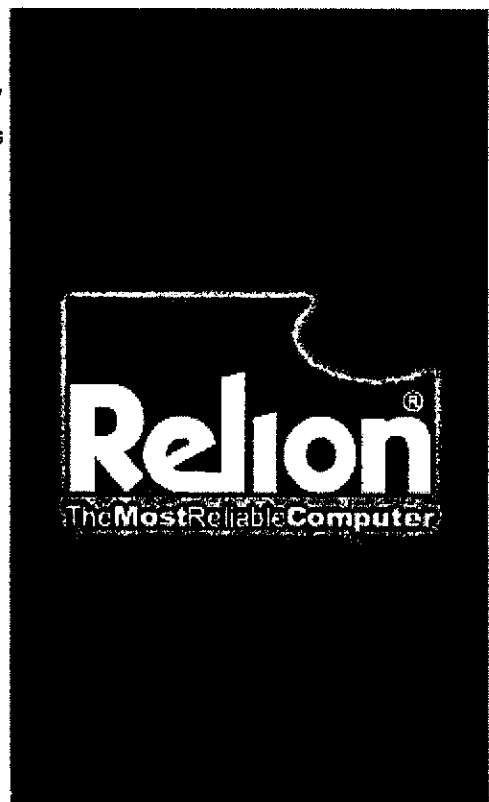
Muhammad Nur Hayid - detikcom

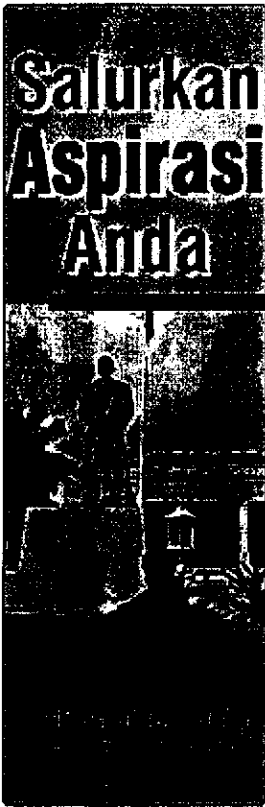
Jakarta - Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh dan Nias pasrah dibidang belum 'menghasilkan' apa-apa di dua wilayah yang tergerus tsunami, Aceh dan Nias. BRR mengakui kerjanya memang belum maksimal.

Director of Donor and International Relations BRR Aceh dan Nias, Heru Prasetyo di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (24/12/2005), menilai kelemahan BRR dalam menjalankan tugas selama ini disebabkan karena kendala transportasi.

Pasalnya setelah tsunami, jalan-jalan di Aceh mayoritas rusak. Bahkan jalan Banda Aceh menuju Meulaboh terputus, sehingga menyulitkan proses distribusi dan penyelesaian pembangunan.

Selain kendala itu, infrastruktur yang ada juga sangat terbatas akibat tsunami, dan tidak bisa digunakan secara maksimal.





detikNews

24/12/2005 15:35 WIB
Presiden Timor Leste
Misa Natal di Cathedral

detikNews

24/12/2005 14:50 WIB
Gagal Suksesnya
Penanganan Tsunami
Pengaruh Politik Aceh

detikNews

24/12/2005 14:42 WIB
Simpan Ganja 365 Kg,
Ibu Rumah Tangga
Diamankan Polisi

detikNews

24/12/2005 14:21 WIB
Hembusan Angin di Kota
Madinah Makin Kencang

detikNews

24/12/2005 14:12 WIB
Diduga Curi Tas Tamu
SBY, Penjual Barang
Antik Ditangkap di Blora

Selain itu, material untuk pembangunan juga terbatas, sehingga harus dikirim dari wilayah lain. Ditambah lagi persoalan prosedur karena unsur-unsur *emergency* dikalahkan oleh birokrasi seperti biasanya.

Pernyataan Heru ini menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 10-20 Desember di Aceh dan Nias. Hasil survei tersebut menunjukkan masyarakat Aceh dan Nias melihat belum banyak kemajuan yang dilakukan BRR. Mereka menganggap BRR bekerja kurang baik, kurang cepat dan kurang transparan dalam pengelolaannya.

Bahkan warga Nias persepsinya terhadap BRR lebih buruk lagi. Pada Desember yang merasa ada kemajuan hanya 18 persen.

Terhadap hasil penelitian itu, Heru berjanji akan menyikapinya dengan baik. "Kita akan tunjukkan kinerja BRR ke depan lebih konkret dan lebih baik dari saat ini," katanya.

Soal rencana pembangunan rumah permanen yang akan dilakukan BRR di dua wilayah itu, Heru menjelaskan, untuk tahun 2006, BRR akan membangun 40 ribu rumah dan menyerahkan pembangunan 38 ribu lainnya kepada LSM.

"Jadi tahun 2006 kita punya target membangun 78 ribu rumah. Kita akan lihat bersama-sama Desember 2006 terpenuhi atau nggak," ujarnya.

(umi)

Baca juga:

- Setahun Tsunami, Warga Aceh-Nias Kurang Puas Kerja Pemerintah
- Setahun Berlalu, Warga Thailand Masih Takut Hantu Tsunami
- 20 Negara Siap Hadiri Peringatan 1 Tahun Tsunami
- BRR Minta TNI Turut Percepat Pembangunan Aceh

SMS Iklan

WWW.12DAILYPRO.COM/?REF=120621 - DILLA (628158706569)

Lihat

Pasang

DIGITAL LIFE
detikcom

0 807 1 807 807
SERVA 10211 2131-18899
www.garuda.inikon.com

Dapatkan informasi penerbangan
via SMS ke no. 8070

* Untuk menu pilihan ketik HELP kirim ke no. 8070
* Sementara berlaku bagi pelanggan Telkomset & Indosat Tarif Rp. 1.000./SMS



Koleksi Dokumen Hukum TERLENGKAP di Indonesia

detikNews | detikFinance | detikFood | detikHot | detiki-Net | detikSport | Foto | Indeks

Info Iklan | SMSiklan | Sepakbola | Ticket Box | newsUpdate | detikShop | News@Pondok Indah

:: Lifestyle | Cupid | Jodoh | 123 X-Fun | Iguana | boleh | mobile tren | fun dering | makan yoo ::



Ingin tahu dim berpendirian
dan bijak dim melangkah??



Setahun Tsunami, Warga Aceh-Nias Kurang Puas Kerja Pemerintah

Muhammad Nur Hayid - detikcom

Jakarta - Setahun setelah bencana tsunami berlalu, warga Aceh dan Nias ternyata masih merasa kurang puas dengan bantuan pemerintah. Mereka lebih merasakan bantuan yang dilakukan negara lain dan relawan, baik dalam dan luar negeri.

Ketidakpuasan warga Aceh dan Nias itu tertuang dalam hasil survei yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 10-20 Desember.

Hasil Survei itu disampaikan peneliti LSI Anies Baswedan dalam jumpa pers di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (24/12/2005).

Kurangnya bantuan dari pemerintah Indonesia sendiri, membuat warga Aceh dan Nias merasa tidak mengalami perubahan setelah satu tahun pasca tsunami.





detikNews
24/12/2005 15:35 WIB
Presiden Timor Leste
Misa Natal di Cathedral

detikNews
24/12/2005 14:50 WIB
Gagal Suksesnya
Penanganan Tsunami
Pengaruh Politik Aceh

detikNews
24/12/2005 14:42 WIB
Simpan Ganja 365 Kg,
Ibu Rumah Tangga
Diamankan Polisi

detikNews
24/12/2005 14:21 WIB
Hembusan Angin di Kota
Madinah Makin Kencang

detikNews
24/12/2005 14:12 WIB
Diduga Curi Tas Tamu
SBY, Penjual Barang
Antik Ditangkap di Blora

Hasil penelitian LSI menunjukkan, tingkat kepuasan masyarakat Aceh dan Nias relatif rendah karena hanya 35 persen warga Aceh dan 18 persen warga Nias yang merasa mendapat perhatian dari pemerintah RI.

Sementara yang menyatakan lebih mendapat perhatian dari relawan luar negeri untuk warga Aceh mencapai 65 persen dan warga Nias mencapai 40 persen.

Selain itu, masyarakat Aceh dan Nias umumnya melihat dan merasa belum banyak kemajuan dalam perbaikan infrastruktur yang rusak akibat tsunami. Misalnya, jalan-jalan, gedung pemerintahan, sarana ibadah, sekolah dan rumah sakit, serta perbaikan kehidupan sosial ekonomi warga yang menjadi korban tsunami.

Mereka juga melihat belum banyak kemajuan yang dilakukan pemerintah dalam pendaftaran ulang hak milik tanah, dan membantu penyediaan pekerjaan bagi korban tsunami serta korban-korban lainnya agar dapat bekerja kembali.

Hasil penelitian juga menunjukkan masyarakat Aceh dan Nias melihat belum banyak kemajuan yang dilakukan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh dan Nias. Mereka menganggap BRR bekerja kurang baik, kurang cepat dan kurang transparan dalam pengelolaannya.

Beda Persepsi

Yang menarik, hasil penelitian LSI untuk survei nasional jauh berbeda dengan yang dirasakan rakyat Aceh dan Nias sendiri.

Hasil penelitian LSI yang dilakukan terhadap masyarakat Indonesia secara nasional menunjukkan arah positif dan ada kemajuan yang dilakukan pemerintah dalam pemulihan Aceh.

Dari data yang ada pada Juni 2005, hanya sebanyak 60 persen masyarakat menilai positif. Namun pada Desember 2005 ada peningkatan menjadi 75 persen. Ini berbeda dengan persepsi masyarakat Aceh yang menilai 24 persen pada Juni dan 27 persen pada Desember.

Sementara bagi warga Nias persepsinya terhadap BRR lebih buruk lagi. Pada Desember yang merasa ada kemajuan hanya 18 persen.

"Jadi ada gap yang cukup besar antara evaluasi positif masyarakat Indonesia dengan warga Aceh dan Nias. Ini harus diperhatikan oleh BRR dan pemerintah," tegas Anies.

Sekadar diketahui survei LSI dilakukan secara berkala, yakni pada 20-30 Juni dengan sampel 830 warga Aceh dan 10-20 Desember dengan sampel 833 warga Aceh.

Di Nias, survei dilakukan pada 10-20 Desember dengan sampel sebanyak 430 warga. Sedangkan survei nasional dilakukan pada Juni dengan sampel 1.396 dan Desember dengan sampel 1.119.

Metode sampel adalah *multystage random sampling* dengan jumlah sampel proporsional di masing-masing provinsi sesuai dengan jumlah penduduk untuk survei nasional.

(umi)

Baca juga:

- Setahun Berlalu, Warga Thailand Masih Takut Hantu Tsunami
- 20 Negara Siap Hadiri Peringatan 1 Tahun Tsunami
- BRR Minta TNI Turut Percepat Pembangunan Aceh
- Kerbau Australia Pergi ke Aceh

SMS Iklan

WWW.12DAILYPRO.COM/?REF=120621 - DILLA (628158706569)

Lihat

Pasang



GOL 2006

FLEXI detikcom
www.detik.com

Layanan TI: Beli Domain, Web Services - Sindikasi: Content, Foto, Mobile dan WAP

Fasilitas: Members, Polling, Forum, Suara Pembaca

Kolom: Aa Gym, Gede Prama, Rei Ki, Rhenald Kasali - Cerita: Kho Ping Hoo, Karl May

Info: Horoskop Jawa, Zodiak, Bioskop - Mitra: Hukum, e-Samuel, CyberMap

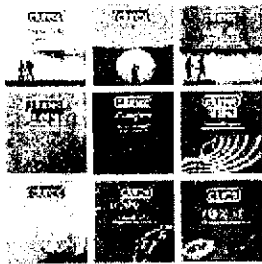
© 2005 **detikcom**, All Rights Reserved | Redaksi | Kotak Pos | Info Iklan | Disclaimer

Powered by:

agrokam

Koleksi Dokumen Hukum TERLENGKAP di Indonesia

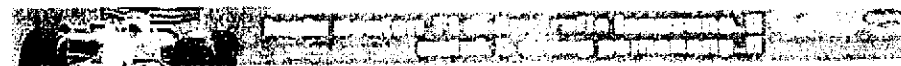
detikNews | detikFinance | detikFood | detikHot | detiki-Net | detikSport | Foto | Indeks
Info Iklan | SMSiklan | Sepakbola | Tiket Box | newsUpdate | detikShop | Surat dari Buncit
:: Lifestyle | Cupid | Jodoh | 123 X-Fun | Iguana | boleh | mobile tren | fun daring | makan yoo :



kode akses
(Nominal Pulsa)
- 8880

Isi ulang Pulsa
bebas PPN

DAPATKAN PAKET
Nonstop
BIG MATCH
Langsung di
OLD TRAFFIC



Gagal Suksesnya Penanganan Tsunami Pengaruhi Politik Aceh

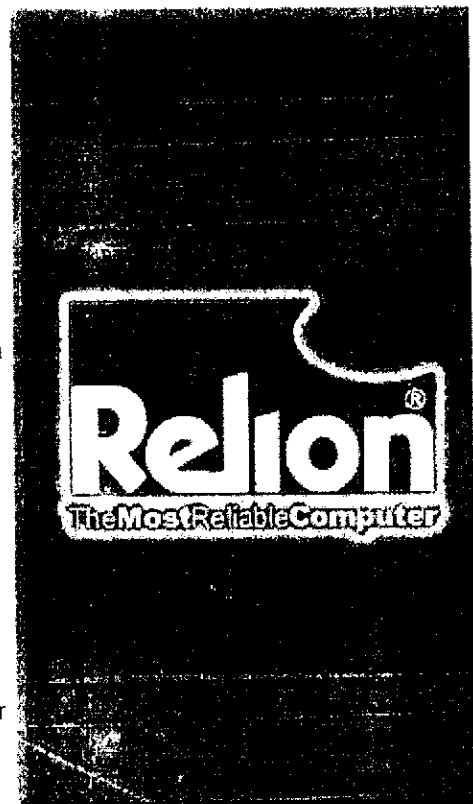
Muhammad Nur Hayid - detikcom

Jakarta - Kurangnya bantuan pemerintah pascatsunami seperti yang dirasakan masyarakat Aceh dikhawatirkan berimplikasi buruk terhadap politik di Aceh. Karena itu peran Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh dan Nias ke depan akan semakin diuji.

Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat Aceh dan Nias terhadap penanganan pemerintah relatif rendah. Hanya 35 persen warga Aceh dan 18 persen warga Nias yang merasa mendapat perhatian dari pemerintah RI.

Sementara yang menyatakan lebih mendapat perhatian dari relawan luar negeri untuk warga Aceh mencapai 65 persen dan warga Nias mencapai 40 persen.

Menurut peneliti LSI Anies Baswedan dalam jumpa pers di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (24/12/2005), implikasi politik dari penelitian ini bagi warga Aceh yang merasa cukup mendapat bantuan dari masyarakat dan pemerintah Indonesia, cenderung merasa bangga jadi orang Indonesia.





detikNews

03/01/2006 14:55 WIB
Theo Toemion Jadi Schib Hercules

detikNews

03/01/2006 14:17 WIB
Golkar Minta Depdagri
Pertemuan Badrul
dengan Nurmahmudi

detikNews

03/01/2006 14:17 WIB
Sakit, Sidang
Pemeriksaan Taufiq
Kamil Ditunda

detikNews

03/01/2006 14:14 WIB
Saksi: Taufiq Kamil Tidak
Bisa Lepas Tangan
Kasus DAU

detikNews

03/01/2006 14:00 WIB
Dilaporkan ke KPK, Andi
Bantah Terima Jaguar

"Namun sebaliknya, bagi yang merasa kurang dapat bantuan cenderung kurang bangga jadi warga Indonesia," kata Anies.

Sementara bagi warga yang mengevaluasi secara positif pemulihan Aceh cenderung lebih memilih calon gubernur dari tokoh non-GAM. Sebaliknya yang mengevaluasi secara negatif, cenderung memilih calon gubernur dari tokoh GAM.

"Jadi sukses atau gagalnya pemerintah melakukan pembangunan di Aceh aka mempengaruhi sentimen publik Aceh kepada Indonesia," kata Anies.

Dijelaskan Anies, jika BRR bekerja dengan baik dipastikan hal itu akan memperkuat ke-Indonesia-an masyarakat Aceh. Tapi sebaliknya, jika kurang berhasil justru akan memperlemah ke-Indonesia-an warga Aceh.

"Karenanya musibah tsunami adalah benar-benar momentum bagi masa depa Aceh dalam peta NKRI," katanya.

Bila rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh berlangsung dengan baik dan dirasakan warga Aceh sendiri tentu hal itu akan membawa berkah bagi penguatan peta NKRI. Sehingga ada kecenderungan politik yang memihak kepada tokoh-tokoh Aceh yang bukan tokoh GAM. "Namun bila BRR (pemerintah) gagal, maka Aceh akan hilang dari NKRI," tandas Anies.

Hal yang sama juga diungkapkan Director of Donor and International Relations BRR Aceh dan Nias, Heru Prasetyo. Menurutnya, jika BRR gagal memulihkan Aceh pascatsunami, maka cita-cita kemerdekaan akan gagal. Karenanya, ia minta semua pihak terlibat dalam pengawasan BRR agar programnya berjalan dengan sukses.

(umi)

Baca juga:

- Setahun Tsunami BRR Akui Belum Maksimal
- Setahun Tsunami, Warga Aceh-Nias Kurang Puas Kerja Pemerintah
- Setahun Berlalu, Warga Thailand Masih Takut Hantu Tsunami
- 20 Negara Siap Hadiri Peringatan 1 Tahun Tsunami

SMS Iklan

suzuki futura MB96 hijau met. mulus, AC/RT, rp36jtnego. Hub:jl.Tnh abang I/12Jl Jkt (6281513701591)



FLC XI detik.com
www.detik.com

Layanan IT: Bell Domain, Web Services, Simulasi Content, Pcp, Mobile dan WAP

PENYELESAIAN ACEH

Aceh Bisa Lepas dari NKRI jika Pemulihan Gagal

JAKARTA, KOMPAS — Rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana tsunami, terutama menyangkut kinerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR, benar-benar merupakan momentum penting sebagai penentu pendulum politik di Aceh dalam keterkaitannya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegagalan rehabilitasi-rekonstruksi Aceh berimplikasi politis, yang bisa-bisa menjadikan Aceh hilang dari peta Indonesia.

Implikasi politis dari tahapan rehabilitasi-rekonstruksi Aceh tersebut disampaikan peneliti utama Lembaga Survei Indonesia (LSI), Anies Rasyid Baswedan, Sabtu (24/12). Anies menyampaikan hasil survei evaluasi publik Aceh dan Nias setahun pascatsunami. Survei dilakukan tim LSI dengan metode tatap muka pada Desember 2005 dengan sampel 800-an orang di Aceh dan 400-an di Nias.

Menurut survei tersebut, ada korelasi antara kebanggaan orang Aceh menjadi orang Indonesia dan evaluasi terhadap kinerja pemulihan Aceh. Mereka yang cukup mendapat bantuan merasa sangat bangga menjadi orang Indonesia. Mereka yang kurang mendapat bantuan cenderung cukup atau malahan kurang bangga menjadi orang Indonesia. Sebanyak 16 persen orang Aceh kurang kebanggaannya menjadi orang Indonesia. Hanya 47 persen saja yang sangat bangga.

Dalam survei tersebut juga terungkap penilaian rakyat Aceh bahwa tidak ada perubahan setelah setahun tsunami. Baru sedikit saja kemajuan yang dirasakan rakyat Aceh. Umumnya rakyat Aceh juga melihat BRR bekerja kurang baik, kurang cepat, dan kurang transparan. Karena itu, pemulihan Aceh bisa menjadi berkah bagi penguatan peta NKRI dan penguatan keindonesiaan rakyat Aceh jika berjalan baik, demikian pula sebaliknya. "Gagal BRR, Aceh hilang dari NKRI," kata Anies.

Namun, peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Rizal Sukma, menilai pendapat Aceh akan lepas

jika rekonstruksi gagal merupakan pendapat yang masih terlalu jauh. Lebih-lebih jika kegagalan itu hanya ditumpukan semata-mata pada BRR. Survei soal kebanggaan menjadi orang Indonesia juga mesti mempertimbangkan konteks konflik yang membuat orang Aceh belum tentu leluasa menjawab pertanyaan itu. Namun, Rizal berpendapat jika dinyatakan bahwa berhasil-tidaknya rekonstruksi akan berkait dengan konflik di Aceh.

Rizal juga mengingatkan, BRR tidak bisa terfokus pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi saja.

Sementara itu, Direktur Bidang Hubungan Internasional dan Donor BRR Heru Prasetyo dalam kesempatan itu menjelaskan pencapaian BRR yang sebenarnya tidak bisa sepenuhnya divonis buruk. Jika dibandingkan dengan bencana di Kobe tahun 1995, misalnya, capaian pemulihan di Aceh-Nias tidak buruk. Penyebutan bahwa BRR korup dan lambat justru akan memperlambat realisasi janji bantuan dari luar negeri. "Banyak kemajuan, tetapi masyarakat belum melihat," kata Heru.

Soal parpol lokal

Dalam kesempatan terpisah Rizal Sukma menyatakan, kehadiran partai politik lokal di Aceh diyakini sebagai salah satu prasyarat perdamaian sekalipun tidak mesti seluruh rakyat Aceh akan menyalurkan aspirasinya pada parpol lokal tersebut. Dengan demikian, sudah semestinya pemerintah tidak memangkas ketentuan mengenai parpol lokal itu dalam Rancangan Undang-Undang mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang bakal diserahkan kepada DPR untuk dibahas bersama.

Menurut Rizal, dukungan rakyat Aceh terhadap pembentukan parpol lokal lebih karena impian mengenai perdamaian. Pembentukan parpol lokal diharapkan bisa meredakan konflik karena aspirasi rakyat Aceh dari semua kelompok bisa terwadahi sekalipun belum tentu rakyat nantinya akan memilih parpol lokal tersebut. (DIK)

Monday, December 26, 2005

Acehnese see little progress in reconstruction work

Hera Diani

The Jakarta Post/Jakarta

People in Aceh and Nias have expressed little satisfaction in the progress of reconstruction and rehabilitation work in tsunami-hit areas, despite the government's claim that the pace of rebuilding is picking up, according to a survey.

The survey, carried out by the Indonesian Survey Institute (LSI) in December, revealed that Acehnese think there has been a generous amount of aid given by local and foreign donors to help finance the reconstruction of areas ruined by the Dec. 26 tsunami, which killed over 170,000 people and made at least half a million people homeless in Aceh, in the northern tip of the island of Sumatra.

However, only 27 percent of 833 Acehnese respondents were happy with the progress of reconstruction work carried out by the government.

The level of satisfaction is below 40 percent with regards the development of housing, schools, clean water facilities, employment provision, medical facilities and so on in Aceh.

As for the performance of

the Aceh and Nias Rehabilitation and Reconstruction Agency (BRR), which has been given a mandate to lead the reconstruction work in the two regions, 38 percent of Acehnese think that BRR has performed generally well, 20 percent said the BRR worked fast, and 18 percent said that BRR's management was transparent and open.

In Nias, however, the level of satisfaction is even lower. Only 18 percent of 430 respondents said that a lot of progress had been made by the central government, 18 percent think that BRR performs well, 7 percent said BRR worked fast and 10 percent praised BRR's transparency and openness.

There is a gap, however, between the perception of people in Aceh and Nias and people in the rest of the country, in terms of the progress in reconstruction and rehabilitation work.

Out of 1,119 respondents throughout the country, 74 percent think that the government has made a lot of progress in the rehabilitation and reconstruction of Aceh and Nias.

Rizal Sukma, researcher and deputy director of the Centre for Strategic and Inter-

national Studies (CSIS) said that people in Aceh and Nias might be uninformed.

"People in the rest of the country might be picking up the news about the progress from the media, so they knew something is being done," he said.

Meanwhile, BRR's director of donor and international relation, Heru Prasetyo, admitted that reconstruction process in Nias was really struggling.

"(Development) in Nias is difficult because the infrastructure there is not good. But we do whatever we can," he said, adding that it even took Japan 10 years to complete reconstruction work after the Kobe earthquake.

As for the criticism of the plan to deploy 15,000 soldiers to help speed up reconstruction in Aceh, Heru said the expertise of noncombatant soldiers might help development, particularly in coastal areas.

"Meulaboh harbor for instance was built with the help of amphibious troops from Singapore who did construction work under the sea. Surely, we cannot ask for their help, or other foreign soldier's help again, can we?"

Para tamu dari
20 negara asing
akan hadir.

Hari Ini Peringatan Setahun Tsunami Aceh

BANDA ACEH—Peringatan satu tahun gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh yang jatuh hari ini akan dipusatkan di Masjid Ulee Lheu dan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tamu dari 20 negara dipastikan menghadiri acara tersebut.

"Presiden Yudhoyono juga akan mengunjungi Lhok Nga," kata Manajer Media Center Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Adh-lai Goldberg di Banda Aceh kemarin. Lhok Nga merupakan salah satu area kuburan massal korban tsunami yang menewaskan 200 ribu orang lebih itu. Selain di Lhok Nga, kuburan massal terdapat di Ulee Lheu.

Juru bicara Departemen Luar Negeri, Yuri Thamrin, mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan dipastikan tidak bisa hadir.

"Tapi akan mengirim asisten ahlinya ke Aceh," katanya. Kehadiran pejabat negara yang, ke-

meyakinkan bahwa kinerja Badan Rehabilitasi cukup kredibel.

Menurut Yuri, beberapa lembaga donor asing, seperti Palang Merah Internasional, Uni Eropa, dan Bank Pembangunan Asia, sudah siap mengucurkan bantuan untuk membangun kembali Aceh. Jumlah yang disetujui sampai saat ini US\$ 4,5 miliar. "Mereka melihat kredibilitas dan mekanisme penanganan bencana," katanya.

Sementara itu, hasil riset Lembaga Survei Indonesia menunjukkan, masyarakat Aceh dan Nias yang menjadi korban tsunami merasa bantuan dari pemerintah kurang. Masyarakat Aceh yang merasa mendapat bantuan dari pemerintah pusat hanya 35 persen. "Sedangkan di Nias hanya 18 persen," kata peneliti Lembaga Survei Indonesia, Antes Baswedan.

Survei yang melibatkan 833 responden di Aceh dan 430 responden di Nias ini berlangsung pada pe-

ngahan Desember lalu. Menurut Antes, bantuan terbayak untuk warga Aceh dan Nias justru dari sukarelawan luar negeri.

Deputi Hubungan Donor dan Internasional Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Heru Prasetyo mengatakan, bantuan sukarelawan asing memang diberikan secara langsung kepada masyarakat. Bahkan bantuan sukarelawan asing sebesar US\$ 982 juta sudah

diserahkan seluruhnya.

Menurut Heru, selama masa tanggap darurat, setidaknya ada 460 lembaga swadaya masyarakat asing yang terjun di Aceh. Hasil kerja yang positif membuat Badan Rehabilitasi mengajak mereka kembali pada masa rekonstruksi. "Hanya 160 lembaga yang bersedia membantu," katanya.

Heru mengatakan, Badan Rehabilitasi menargetkan 78 ribu rumah untuk peng-

ungsi korban tsunami selesai akhir tahun depan. Jumlah itu hanya sebagian dari 120 ribu rumah yang dibangun pemerintah.

Badan Rehabilitasi, kata dia, akan membangun 40 ribu rumah dan sisanya dibantu lembaga swadaya masyarakat asing. "Kami akan mengevaluasi target setiap kuartal hingga akhir Desember nanti," katanya.

● **ADRI WARSJUN (AMI APRILIANO)**
MARBU PERMABAND

Aceh Terancam Lepas dari Indonesia

Thamrin, Waria Kota

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terancam akan benar-benar lepas berdasarkan persepsi dan opini publik Aceh setelah pasca-tsunami. Ancaman terbesar lepasnya Aceh bukan terkait dengan rekonstruksi MoU RI-GAM, tapi terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh yang tengah dilakukan.

Demikian hasil survei yang dipresentasikan Lembaga Survei Indonesia (LSI) kepada pers, Sabtu (24/11), di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Pembicara yang tampil adalah Anis Baswedan (LSI), Heru Prasetyo (Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi/BRR), dan Rizal Sukma (peneliti CSIS).

Penelitian dilakukan LSI terhadap 1.663 orang Aceh, 430 orang Nias, dan 2.518 orang di seluruh Indonesia. Wawancara dilakukan oleh seorang pewawancara terlatih untuk 10 responden. *Quality control* dilakukan dengan melakukan *spot check* sebanyak 20 persen dari total responden yang dipilih secara random dan tidak ditemukan kesalahan.

"Sukses atau gagalnya pemerintah dalam melakukan pembangunan kembali

Aceh pasca-tsunami akan memengaruhi sentimen Aceh terhadap Indonesia. Pilihnya jelas, BRR gagal melaksanakan tugasnya, maka Aceh benar-benar lepas dari Indonesia," kata Anis Baswedan.

LSI menjelaskan, setelah enam bulan tsunami, Juni 2005, pada umumnya warga di Aceh memandang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pandangan serupa didapatkan dari masyarakat Nias, tapi pandangan secara nasional, pemberian bantuan itu cukup banyak. Masalahnya, setelah setahun, yakni sampai bulan Desember 2005, pandangan masyarakat Aceh belum berubah.

Dalam setahun itu mereka yang merasakan telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat hanya 35 persen. Secara spesifik, warga Aceh belum merasakan banyak kemajuan dalam perbaikan infrastruktur yang rusak akibat tsunami (jalan, kantor pemerintah, sarana ibadah, sekolah, dan rumah sakit). Di samping terdapat faktor lainnya terkait dengan kehidupan warga yang menjadi korban tsunami.

Dalam penelitian ditemukan, persepsi masyarakat Aceh terhadap bantuan bagi pemu-

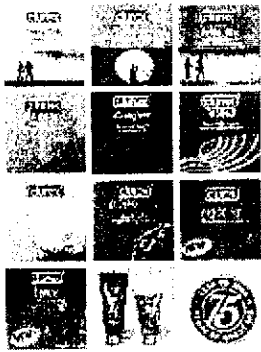
lhan pasca-tsunami terbanyak berasal dari luar negeri dan paling sedikit dari pemerintah. Perinciannya, 65 persen (relawan luar negeri), 56 persen (pemerintah negara lain), 50 persen (relawan dalam negeri), 43 persen (masyarakat Indonesia), dan 35 persen (pemerintah).

Persepsi tentang adanya kemajuan dalam membangun kembali, menurut warga Aceh terdiri atas 33 persen (air bersih), 26 persen (pertumahan), 27 persen (kantor-kantor), 24 persen (jalan raya). Persepsi tentang kemajuan dalam sejumlah bidang bagi korban tsunami, 36 persen (penyediaan obat-obatan), 23 persen (penyediaan kebutuhan pokok), 20 persen (pendaftaran ulang hak milik tanah), dan 10 persen (penyediaan lapangan kerja).

Implikasinya, menurut hasil penelitian LSI itu, warga Aceh yang merasa telah mendapatkan bantuan dari pemerintah Indonesia pada umumnya merasa bangga menjadi orang Indonesia, dan yang merasa kurang mendapatkan bantuan cenderung menyatakan cukup saja dan kurang bangga sebagai orang Indonesia. **[moel]**

Koleksi Dokumen Hukum TERLENGKAP di Indonesia

detikNews | detikFinance | detikFood | detikHot | detik-Net | detikSport | Foto | Indeks
 Info Iklan | SMSiklan | Sepakbola | Ticket Box | newsUpdate | detikShop | Surat dan Buncit
 :: Lifestyle | Cupid | Jedoh | 123 X-Fun | Tgusna | botol | mobile man | fun daring | makan you



Keterangan lebih lanjut hub Halo BCA
 (021) 52-999-888 / 69-888 via ponsel

DAPATKAN PAKET
 Nomor
BIG MATCH
 Langsung di
OLD TRAFFIC



Survei LSI: Popularitas SBY Turun 24%

Nurul Ken Yunita - detik.com

Jakarta - Dalam survei nasional yang dilakukan pada 14-18 Desember 2005 oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan adanya penurunan kepuasan publik atas kinerja Presiden SBY sebesar 24 persen. Padahal, hasil survei bulan November lalu 80 persen responden masih menyatakan puas atas kinerja presiden.

"Presiden seharusnya memikirkan hasil survei ini dengan serius. Jangan sampai SBY kehilangan popularitasnya," katanya Peneliti LSI Anies Baswedan di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (29/12/2005).

Penurunan popularitas SBY ini disebabkan banyaknya kebijakan SBY yang tidak populer seperti kenaikan BBM, dan kebijakan lainnya yang cenderung mengecewakan masyarakat.

Selain itu, LSI juga menemukan bahwa saat ini memang belum ada tokoh lain yang muncul dan mampu mengimbangi popularitas SBY. Meski demikian, penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SBY ini sudah menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan.





Jika hari ini diadakan pemilu, dari 100 persen responden, 40,1 persen masih memilih SBY, 22,3 persen memilih calon lain, sedangkan 37,6 persen menyatakan belum atau tidak tahu akan memilih siapa.

"Hasil ini harus menjadi perhatian SBY. Posisinya sangat rawan, memang sebagian besar publik masih memilihnya. Tapi itu belum ada proses kampanye dan sebagainya. Coba bayangkan jika ada angka itu bisa jadi menurun drastis," imbuh Anies.(san)

Baca juga:

- Dapat Ancaman, SBY Kurangi Salaman dengan Rakyat
- Kejagung Belum Terima Persetujuan Penahanan dari Presiden
- Rapor SBY-JK Soal Agama Merah
- Ada Ancaman, Pengamanan Presiden SBY Diperketat

SMS Iklan

jual notebook second eks Usa kondisi 90% grns 1bln full sparepart - 568939
Eddy Liu Regard's (6281514551313)



detikNews

03/01/2006 14:17 WIB
Goikar Minta Depdagri
Pertemuan Badrul
dengan Nurmahmudi

detikNews

03/01/2006 14:17 WIB
Sakit, Sidang
Pemeriksaan Taufiq
Kamil Ditunda

detikNews

03/01/2006 14:14 WIB
Saksi: Taufiq Kamil Tidak
Bisa Lepas Tangan
Kasus DAU

detikNews

03/01/2006 14:00 WIB
Dilaporkan ke KPK, Andi
Bantah Terima Jaguar

detikNews

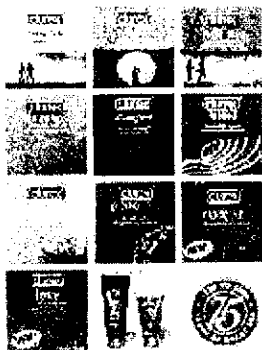
03/01/2006 13:46 WIB
Perpanjangan Izin AMM
Harus Dikonsultasikan ke
DPR



Layanan TI: Beli Domain, Web Services - Sindikasi: Content, Foto, Mobile dan WAP

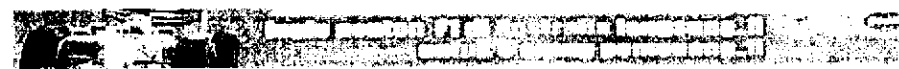
Koleksi Dokumen Hukum TERLENGKAP di Indonesia

detikNews | detikFinance | detikFood | detikHot | detiki-Net | detikSport | Foto | Indeks
Info Iklan | SMSIklan | Sepakbola | Ticket Box | newsUpdate | detikShop | Corp dari Buncit
:: Lifestyle | Cupid | Jodoh | 123 X-Fun | Iguana | boleh | mobil | Iron | Fun daring | makan you



Keterangan lebih lanjut hub Halo BCA
(021) 52-999-888 / 69-888 via ponsel

DAPATKAN PAKET
Nonstop
BIG MATCHES
Langsung di
OLD TRAFFIC



Andi Mallarangeng: Survei Tidak Lunturkan Popularitas SBY

Nurul Ken Yunita - detikcom

Jakarta - Hasil survei nasional yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan data, tingkat kepuasan responden atas kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun 24 persen. Tapi angka itu belum tentu menunjukkan lunturnya popularitas sang jenderal.

Demikian disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng usai mengikuti pemaparan hasil survei LSI di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (29/12/2005).

"Saya kira wajar jika dalam sebuah negara demokratis, *polling* itu turun naik. Apalagi saat pemerintah melakukan kebijakan yang tidak populer. Itu hal biasa, jadi hasil survei tidak lantas menjadikan popularitas SBY menurun," tegas Andi.

Bahkan Andi masih yakin, jika hari ini ditakukan pemilu, maka SBY masih akar menang. Walaupun survei LSI menunjukkan jika hari ini diadakan pemilu, dari 100 persen responden, 40,1 persen masih memilih SBY, 22,3 persen memilih calon lain, sedangkan 37,6 persen menyatakan belum atau tidak tahu akan





memilih siapa.

Andi Mallarangeng juga menyatakan selama masa pemerintahan SBY cukup ada peningkatan, terutama di bidang ekonomi. Selama ini Indonesia mengalami konsistensi tingkat pertumbuhan, yaitu pada tahun 2004 sebesar 5,1 persen, 2005 sebesar 5,5 persen, dan pada tahun 2006 nanti diprediksi akan mencapai 5,7 persen.

"Kita lihat negara lain seperti Cina, Malaysia, Thailand, Filipina, tingkat ekonomi mereka mungkin lebih tinggi dari Indonesia, namun mereka tidak konsisten. Sementara Indonesia menunjukkan angka yang terus meningkat," ujarnya. (sar

Baca juga:

- Survei LSI: Popularitas SBY Turun 24%
- Dapat Ancaman, SBY Kurangi Salaman dengan Rakyat
- Kejagung Belum Terima Persetujuan Penahanan dari Presiden
- Rapor SBY-JK Soal Agama Merah

SMS Iklan

jual notebook second eks Usa kondisi 90% grns 1bln full sparepart - 568939
Eddy Liu Regard's (6281514551313)



detikNews

03/01/2006 14:17 WIB
Golkar Minta Depdagri
Pertemuan Badrul
dengan Nurmahmudi

detikNews

03/01/2006 14:17 WIB
Sakit, Sidang
Pemeriksaan Taufiq
Kamil Ditunda

detikNews

03/01/2006 14:14 WIB
Saksi: Taufiq Kamil Tidak
Bisa Lepas Tangan
Kasus DAU

detikNews

03/01/2006 14:00 WIB
Dilaporkan ke KPK, Andi
Bantah Terima Jaguar

detikNews

03/01/2006 13:46 WIB
Perpanjangan Izin AMM
Harus Dikonsultasikan ke
DPR



FLIXI detik.com
www.detik.com

Layanan IT: Beli Domain, Web Services - Sindikasi Content, Foto, Mobile dan WAP

Popularitas Pemerintahan SBY-JK Menurun

JAKARTA — Popularitas Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla menurun setelah perombakan kabinet bulan lalu. Demikian hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia yang dipaparkan di Jakarta, Kamis (29/12).

Menurut peneliti utama lembaga itu, Anies Rasyid Baswedan, kesimpulan ini adalah gabungan dari semua hasil survei yang pernah dilakukannya sejak SBY dan Kalla memerintah. "Ini akibat kinerja ekonomi yang dinilai buruk oleh masyarakat," ujar Anies.

Dalam survei terakhir, 14-18 Desember, menurut Anies, popularitas pemerintah turun terutama karena langkah menaikkan harga bahan bakar minyak. Dengan hasil ini, kata Anies, jika pemilihan presiden dilakukan saat ini SBY akan gagal mempertahankan kursinya. Alasannya, menurut dia, Yudhoyono-Kalla hanya mendapat kepercayaan dari 40,1 persen responden. "Itu belum ditambah dengan kampanye calon lain," kata dia sebagaimana dikutip *Antara*.

Kecenderungan menurunnya popularitas ini, kata Anies, harus diperhatikan oleh pemerintah. "Kalau saya jadi presiden, saya akan tarik kencang kekurangan ini (di bidang ekonomi)," ujarnya.

Menurut Anies, survei menunjukkan bahwa tidak ada masalah pada kinerja bidang hukum, keamanan, dan sosial. Ekspektasi publik relatif sudah sesuai dengan kenyataannya, katanya.

Direktur Utama Institut For Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan mengatakan, kabinet bidang ekonomi harus memiliki terobosan. Yakni, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. "Kalau tidak dilakukan percuma saja," ujarnya.

Di tempat yang sama, juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng optimistis bahwa kinerja SBY sudah maksimal. Membantah hasil survei, ia mengatakan, "Terjadi tren peningkatan kepercayaan oleh masyarakat." (ad)

【インドネシア—建設】

首都地価、タムリン通り最高値維持予測

インドネシア不動産研究所 (P S P I) は、中央ジャカルタ・タムリン通り沿いの地価が1平方メートル当たり約2,250万ルピアとなり、今年も首都圏 (ジャカルタ、デボック、ボゴール、タンゲラン、プカシ) 29地区の最高値を維持するとの見通しを示した。インベストール・デイリーが伝えた。同研究所では、タムリン通りにつながるスディルマン通り沿いの地価が2位、タムリン～スディルマンとともに「黄金の三角地帯」

を形成するガトットスプロト通り、ラスナサイド通りの地価がこれに続くとの予測。タムリン通り沿いの地価は2004年当時の同1,900万ルピアから上昇を続けているものの、首都の心臓部としては妥当な水準との見解を示している。

一方、不動産業者協会 (R E I) のマルフ副会長は、都心の不動産開発の好適地として三角地帯の大通り沿いに比べて地価

が安い南ジャカルタのメガクニンガン地区を挙げている。不動産仲介業者協会 (Arebi) のティルタ会長は、車両通行規制「3 in 1」とも無縁な商業地域であるメガクニンガンの区画は同1,500万～2,000万ルピアに上昇するとの予測を示している。

首都圏の地価動向 (抜粋、2006年は予測値)

地区	2004年	2005年	2006年
タムリン通り	19,000	21,000	22,500
スディルマン通り	16,000	17,500	19,500
ガトット・スプロト通り	13,560	14,500	15,500
ラスナ・サイド通り	11,100	13,500	15,000
メガ・クニンガン	10,000	12,000	13,500

単位：千ルピア (1平方メートル当たり)

出所：インドネシア不動産研究所 (インベストール・デイリー)

【インドネシア—政治】

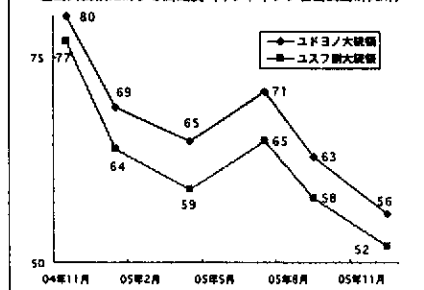
政権発足1年世論、満足度5割強に低下

インドネシア世論調査研究所 (L S I) は、政権発足1年を経て、正副大統領に対する国民の満足度が著しく低下したとの調査結果を発表した。昨年12月14～18日に全国33州の1,109人を対象に実施した同調査では、ユドヨノ大統領の業績に対する満足回答は56%、ユスフ副大統領の場合は52%に低下している。前年と比べて経済情勢が悪化したとの回答比率が53.4% (前回9月

調査時点では47%) に上ったことが満足度低下の主因になったと指摘し、過去と同様の傾向が続けば3カ月後には満足度が50%を切るとしている。1年後の経済情勢に対する楽観度も2004年11月の67%をピークに低下傾向が続き、昨年12月時点では40.2%に落ち込み、石油燃料値上げ後のインフレで生活必需品を中心とした購買力低下も実感されているとした。

なお、先の内閣改造については、回答者の50%以上が改善を楽観する回答を示し、特にプディオノ経済担当調整相に対しては40.1%と最も高い信頼度が示されている。

正副大統領に対する満足度 (インドネシア世論調査研究所)



【インドネシア—社会】《労使》

ビンタン島の最低賃金、前年比3割上昇

リアウ諸島州で日系企業が多く進出するビンタン島のあるリアウ諸島県の今年の最低賃金は、前年比33.7%上昇の月額76万7,000ルピアと決定した。隣接するパタム島の最賃上昇率28.3%を大幅に上回った。ビンタン島の最賃は、12月29日付で署名されたリアウ諸島州知事通達『2005年第184号』で決定した。ビンタ

ン島内にある州都タンジュンピナン市の最賃もリアウ諸島県と同額の76万7,000ルピアに決定している。同州の今年の最賃は76万ルピア。NNAの調べによると、4日時点で今年の最賃が決定していない州はランブン、ゴロンタロ、西イリアンジャヤ、パプアの4州。すべての州で知事の署名待ちの段階という。

12月26日以降に最賃の確定が明らかになったのは5州。西スマトラ州は前年比20.4%上昇の月額65万ルピアで同月26日付の知事通達で決定。北マラルク州は19日付の知事通達で20%上昇の52万8,000ルピア、北スラウェシ州18.9%上昇の71万3,500ルピア、中部スラウェシ州は12.7%上昇の57万5,000ルピア (28日付)、新設の西スラウェシ州は61万2,000ルピア (今月2日付) に決定している。

Publik Tidak Puas!

► Hasil Survei LSI terhadap Kinerja SBY-JK

Gambar, Warta Kota

LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan, telah terjadi penurunan yang tajam atas kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam rentang waktu satu tahun terakhir. Tapi Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng bilang, itu hal biasa.

"Memang biasa di negara-negara mana pun ketika ada kebijakan yang tidak populer, maka hasil *polling* bisa disimpulkan menurun, dan kondisi itu akan berubah jika ada kebijakan baru yang menarik rakyat. Itu adalah hal yang biasa," kata Andi Mallarangeng hasil survei LSI.

Dalam acara prospek SBY-Kalla tahun 2006 versi LSI di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (29/12), Andi Mallarangeng mengatakan, hasil *polling* harus dibaca dengan tepat. Meski terjadi tren menurun terhadap popularitas SBY-Kalla, hal itu tidak merisaukan. "Terjadi tren bahwa berdasarkan slot-slot dalam grafik hasil penelitian LSI ini, angkanya cenderung naik," katanya.

LSI menyebutkan bahwa berdasarkan survei opini publik nasional yang dilakukan terhadap 1.109 responden di 33 provinsi, mayoritas publik (53 persen) menilai kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibanding satu

tahun lalu. Menurut Anis Baswedan, salah seorang peneliti LSI, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan faktor dominan yang dikeluhkan publik, yang menunjukkan bahwa pemerintah gagal mengurangi beban masyarakat.

Dalam proyeknya, apabila ketidakpuasan publik atas kinerja ekonomi pemerintah terus memburuk, maka batas politik (50 persen) kemungkinan akan tertembus, dan duet Yudhoyono-Kalla bakal jadi pemimpin yang tidak disukai publik.

Berdasarkan survei LSI, yang memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan *marginal error* 2,95 persen serta menggunakan metodologi *multi-stage random sampling* itu, sebanyak 56 persen responden menyatakan puas atas kinerja Presiden SBY dan 52 persen menyatakan kepuasannya terhadap kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Namun angka itu telah berada di bawah angka *electoral* pasangan itu, yang diperoleh dalam Pemilu 20 Septem-

ber 2004 lalu sebesar sekitar 61 persen. "Angka itu bagi SBY adalah yang terendah, setelah ia dilantik sebagai presiden. Kepuasan publik atas kinerja SBY mencapai angka tertinggi (80 persen—**Red**) ketika ia baru sekitar dua bulan menjadi presiden, padahal waktu itu ia belum banyak bekerja," katanya.

Direktur Eksekutif Institute for Development Economic and Finance (Indef), Fadhill Hasan, yang tampil sebagai pembahas hasil survei LSI itu menyatakan, SBY-JK harus melakukan langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik. "Mereka harus mengubah kebijakannya, seperti selama ini menguras seperempat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN—**Red**) hanya untuk bayar utang dan membebarkannya pada kenaikan harga BBM," katanya.

Kondisi itu diakui Fadhill berdampak pada terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, industri dan investasi merosot, sementara tawaran restrukturisasi utang dan moratorium selalu dijegal. "Di antaranya soal Kepala Bappenas punya program untuk mengagukan keringanan utang atau menerima tawaran moratorium, oleh Menteri Sri Mulyani yang merupakan perpanjangan tangan IMF, usulan itu ditentahkan. Padahal, semua tahu SBY-Kalla bisa menaruh peniti hanya karena mereka mengampunayakan pengurangan pengangguran dan perbaikan sektor riil. Ternyata kesalahan serupa pemerintah sebelum ini dilakukan juga oleh SBY-Kalla. Itu jelas mengkhawatirkan," katanya. (mo-e)

New survey rates SBY's popularity as high

The Jakarta Post
Jakarta

In spite of mounting criticism of his administration following the fuel price increases, the latest survey shows that President Susilo Bambang Yudhoyono's popularity remains high, with over half of the population deeming that he is doing a good job.

However, they are unhappy with the government's economic performance.

Released by the Indonesian Survey Institute (LSI) here on Thursday, the poll, conducted in mid-December, put Susilo's job approval rating at 56 percent, a decline from 63 percent in an LSI survey issued in September.

The President won respect across the country for his integrity, as well as performance in the areas of legal,

security and social welfare ever since he took office 15 months ago.

The areas that people feel have room for improvement are medical services, crime and gambling elimination, corruption eradication, education and women's empowerment.

The majority of 1,100 respondents, however, are dissatisfied with the current government's economic performance, with 53.4 percent of them feeling that this year's economic condition was worse than in 2004.

The sentiment was mainly due to the steep fuel price increases, which averaged 126 percent.

The respondents said the fuel price hikes made it tougher for them to buy kerosene (90 percent), cooking gas (61 percent), gasoline (89 percent) and diesel fuel (73 percent).

The affordability of staple food has also declined, as well as people's financial ability to cover medical costs and school tuition.

For the year ahead, only 40.2 percent of the respondents think things will improve economically.

The toughest challenges for the Susilo administration this year were creating jobs, reducing poverty, maintaining stable prices, stabilizing the rupiah and spurring economic growth.

With regards to the recent Cabinet reshuffle, 41 percent of the respondents believe it will improve the performance of Susilo's administration, particularly his economics team.

Responding to Susilo's relatively stable popularity, presidential spokesman Andi Mallarangeng said that 56 percent was "not too bad" for a democracy.

SURVEY LSI

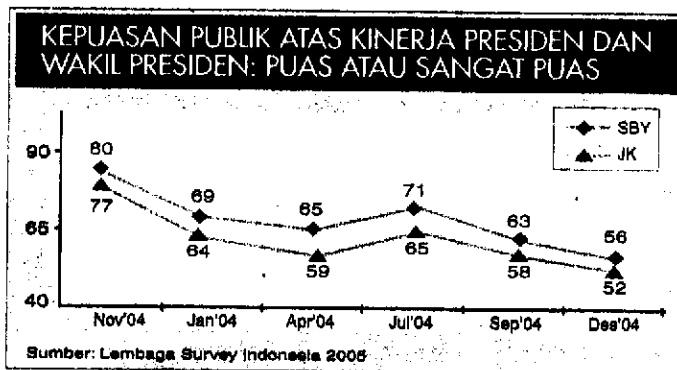
Kepuasan Publik atas Kinerja SBY Turun

JAKARTA – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tajam dalam rentan waktu setahun terakhir. Tingkat penurunan kepuasan publik ini melorot sampai menembus angka 56%.

Padahal, dua bulan ketika dilantik menjadi presiden, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SBY mencapai 80%. Demikian hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang di-launching, kemarin.

Apa penyebabnya? "Banyak kebijakan SBY, terutama di bidang ekonomi yang tidak populer seperti kenaikan BBM dan kebijakan lainnya yang cenderung mengecewakan masyarakat," kata Direktur LSI Syaiful Mujani, kemarin.

Syaiful menuturkan, tingkat kepuasan 56% adalah angka terendah sejak SBY dilantik menjadi presiden. Karena itu, dia berpendapat, penurunan tren tingkat kepuasan publik ini sudah menun-



jukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Apalagi secara umum dari waktu ke waktu terjadi penurunan tren.

Kendati terjadi penurunan angka kepuasan publik, bukan berarti peluang SBY untuk memenangkan pemilihan umum presiden lantas hilang. Sebab, sampai saat ini belum ada tokoh lain yang muncul dan mampu mengimbangi popularitas SBY.

Juru Bicara Kepresidenan,

Andi Malarangeng, berpendapat turunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden, belum tentu menunjukkan lunturnya popularitas SBY.

"Dalam sebuah negara demokratis wajar saja kalau terjadi tren naik turun. Apalagi saat pemerintah melakukan kebijakan yang tidak populer, itu hal biasa. Jadi, hasil survei tidak lantas menjadikan popularitas SBY menurun," katanya. (havid vebri)

Kejira Presiden sudah maksimal.

Survei: Popularitas Presiden Menurun

JAKARTA — Populartias pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla menurun setelah perombakan Kabinet Indonesia Bersatu pada bulan lalu. Demikian hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia yang dipaparkan di Jakarta kemarin.

Menurut peneliti utama lembaga itu, Anies Baswedan, kesimpulan lembaga ini merupakan gabungan semua hasil survei yang pernah dilakukannya selama masa pemerintahan Yudhoyono-Kalla. "Ini terjadi akibat kinerja ekonomi yang dinilai buruk oleh masyarakat," ujarnya. Anies mengatakan, survei itu mengambil responden masyarakat dengan tingkat bervariasi.

Dalam survei terakhir pada 14-18 Desember lalu, kata Anies, popularitas Presiden menurun terutama

karena kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak. Kebijakan itu berimplikasi pada hal lain, seperti naiknya harga bahan kebutuhan pokok. "Daya beli masyarakat menurun," ujarnya.

Menurut Anies, jika pemilihan presiden dilakukan saat ini, kemungkinan Yudhoyono tidak mencapai *electoral threshold*. "Persentase kepercayaan pemilih hanya 40,1 persen." Pemerintah harus memperhatikan penurunan popularitas ini sebab perombakan kabinet sudah terjadi. "Kalau saya jadi presiden, akan saya tarik kengang kekurangan di bidang ekonomi," ujarnya.

Namun, hasil survei tidak menunjukkan masalah kinerja pada bidang hukum, keamanan, dan sosial. "Harapan publik relatif sudah sesuai dengan kenyataan," kata Anies.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Institute for Development of Economics and Finance Fadhil Hasan mengatakan, kinerja di bidang ekonomi harus memiliki terobosan, yakni menciptakan lapangan kerja. Dengan perombakan kabinet, masyarakat berharap angka pengangguran yang mencapai 40,5 juta orang dapat dikurangi.

Menurut dia, pada masa kampanye pemilihan presiden, Yudhoyono berjanji mengurangi angka pengangguran sebagai langkah terobosan ekonomi. "Ini kan yang menjadi kekurangan Megawati saat itu," ujarnya. Di era Presiden Megawati Soekarnoputri, ekonomi makro stabil, tapi angka pengangguran relatif tidak berkurang.

Juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng, mengatakan bahwa

kinerja Presiden sudah maksimal dilakukan. Dia optimistis kepercayaan masyarakat meningkat. Bahkan, kata dia, setelah kebijakan tidak populer seperti kenaikan harga bahan bakar minyak dilakukan, kepercayaan masyarakat mulai terihat. "Terjadi tren peningkatan."

Dia menunjuk angka 64 persen bila pemilihan presiden dilakukan hari ini. Dia pun mengklaim menggunakan statistik yang sama dengan Lembaga Survei Indonesia. Bahkan, kata Andi, kepercayaan masyarakat meningkat bila dihitung dari ekspektasi masyarakat terhadap hasil survei 'Transparency International Indonesia terhadap pemberantasan korupsi. Hasilnya, Indonesia menempati hasil tertinggi, yakni 81 persen, dalam pemberantasan korupsi. ● TOPIC/ANINDA KURNIAWATI

LSI: Kinerja SBY-JK merosot tajam

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyimpulkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-JK telah menurun tajam dalam rentan waktu serahan terakhir.

Dari survei LSI yang dilakukan pada 14-18 Desember 2005 di 33 provinsi dengan sampel sebanyak 1.109 responden dan *marginal error* 2,95% pada tingkat kepercayaan 95%, disimpulkan bahwa mayoritas publik (53,4%) mengaku tidak puas atas kinerja SBY-JK. Ketidakpuasan publik itu bersumber pada persoalan ekonomi yang semakin memburuk. Apalagi, setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang me-

mukul daya beli masyarakat.

"Jika ketidakpuasan publik atas kinerja ekonomi dan kondisi daya beli masyarakat yang terus memburuk, maka SBY-JK akan menjadi pemimpin yang tak disukai mayoritas warga," ujar Peneliti LSI Anies Baswedan saat presentasi hasil survei mengenai *Review Akhir Tahun: Kinerja SBY JK* di Jakarta kemarin.

Meski demikian, lanjut Anies, ternyata ada 56% publik yang menyatakan puas atas kinerja Presiden, dan 52% menyatakan puas atas kinerja Wapres.

Namun, Anies menilai angka tersebut telah berada di bawah angka electoral pasangan SBY-JK yang pernah memperoleh suara pada pemilihan umum 20 Sep-

tember 2004 sebesar 61%.

"Angka tersebut [penelitian LSI] bagi SBY adalah yang terendah setelah dirinya dilantik menjadi Presiden," katanya.

Keputusan publik atas kinerja SBY, lanjut Anies, mencapai angka tertinggi ketika dirinya baru dua bulan menjadi Presiden. Waktu itu, walaupun belum banyak bekerja, 80% publik merasa puas terhadap apa yang telah dikerjakan SBY-JK.

"Kalau dibandingkan dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SBY JK pada November 2004 dan Desember 2005, maka penurunan kepuasan publik sebanyak 24%." Meski demikian, Anies memperkirakan hingga saat ini belum ada tokoh lain yang mam-

pu mengimbangi popularitas SBY. Karena itu, dia memperkirakan jika pemilihan Presiden dilaksanakan hari ini, maka SBY masih berpeluang akan memenangkan pemilihan Presiden tersebut.

Meski begitu, Anies menilai trend penurunan tingkat kepuasan publik itu sudah menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan. Dari waktu ke waktu trend tersebut mengalami fluktuasi dan secara umum selalu menurun.

"Artinya, apabila kondisi ekonomi dan politik relatif konstan dalam 3 bulan ke depan, maka bisa diprediksi bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SBY akan jatuh di bawah 50%," ujar Anies. (M03)